

Indonesia Climate
Change Trust Fund



Laporan Tahunan 2021



Indonesia Climate
Change Trust Fund



Laporan Tahunan **2021**



Kata Pengantar



**Ir. Arifin Rudiyanto,
M.Sc, Ph.D**

Ketua Majelis Wali
Amanat ICCTF
Deputi Bidang
Kemaritiman dan
Sumber Daya Alam
Kementerian PPN/
Bappenas

Peristiwa COVID-19 pada tahun 2021 membuat target pembangunan nasional dan upaya percepatan ekonomi Indonesia mengalami kelambatan dan digantikan dengan tindakan mendesak untuk memperkuat sektor-sektor esensial penanganan pandemi COVID-19. Disamping itu, upaya menuju pembangunan berkelanjutan yang didasarkan oleh kaidah lingkungan juga tidak dapat ditinggalkan.

Sektor kelautan dan perikanan, sebagai salah satu sektor penggerak pembangunan, tidak terkecuali menerima dampak berat dari pandemi ini. Sebagai Satuan Kerja di bawah Kementerian PPN/ Bappenas, ICCTF mempunyai mandat untuk mendukung pemerintah dalam memerangi dan memitigasi masalah perubahan iklim, terus melakukan aksi nyata untuk menghasilkan model inovasi pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, menuju sektor yang kokoh dan lepas dari kerentanan. Inovasi yang dilakukan dapat menciptakan keseimbangan

antara pilar lingkungan, ekonomi dan sosial. Kegiatan ekonomi diharapkan dapat meningkat kembali ke laju normal. Dalam upaya hal tersebut, perlu adanya konsistensi dalam upaya memelihara keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan.

Laporan tahunan ICCTF ini merupakan kumpulan dokumentasi dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan dalam tahun 2021 seperti kegiatan COREMAP-CTI World Bank, COREMAP-CTI Asian Development Bank, Blue Finance, Blue Carbon, kajian strategis lain dan kesekretariatan. Laporan ini juga mengulas hasil pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan inovasi, tantangan dalam mewujudkan resiliensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia, inovasi dan gambaran *Milestone Annual Work Plan ICCTF 2022*. Semoga laporan ini bisa bermanfaat sebagai media pembelajaran bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung Pembangunan di Indonesia.

PRAKATA



Dr. Sri Yanti JS

Direktur Kelautan dan
Perikanan
Kementerian PPN/
Bappenas

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah disusun pemerintah dalam mengembangkan sistem pengelolaan laut dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, ICCTF berkomitmen untuk fokus dalam pengembangan program berbasis laut yang mana mendukung tujuan SDGs ke-14 yaitu Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan. Upaya dalam pencapaian pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan ini juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang mengamankan pembangunan perikanan melalui pendekatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Salah satu upaya yang dilakukan ICCTF dalam mendukung arah kebijakan pemerintah adalah dengan melestarikan keanekaragaman hayati di daerah pesisir dan laut, termasuk terumbu karang dan ekosistem *blue carbon* (Mangrove dan Lamun) secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Tahun 2021, ICCTF kembali melanjutkan 2 (dua) proyek yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019 yaitu Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP - CTI) dengan sumber dana yang berasal dari World Bank (WB) dan Asian Development Bank (ADB). Lokasi proyek tersebut tersebar dalam 4 provinsi di Indonesia yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Papua Barat. Proyek tersebut berhasil membangun sarana dan prasarana dalam pengembangan wilayah pesisir laut seperti Pusat Informasi, Menara Pengawas,



Stasiun Pantau Pari Manta, Menara Pantau Cetacean, Keramba Jaring Apung (KJA) dan sebagainya. Jika ditinjau dari pengembangan sumber daya manusia, ICCTF juga telah memberikan beberapa pelatihan rehabilitasi, pengawasan, wisata, dan penanganan *bycatch* dengan total peserta kumulatif sebanyak 876 orang tersebar di Indonesia. Selain itu, ICCTF juga berhasil merehabilitasi ekosistem mangrove seluas 10.000 m² melalui dana WB dan seluas 20.000 m² melalui dana ADB.

Selain berperan dalam pelestarian *blue carbon*, ICCTF juga bertugas untuk pelaksanaan proyek bioekonomi perikanan dan menginisiasi implementasi pendanaan inovatif di sektor perikanan dan kelautan melalui mekanisme Blended Finance. Mewakili Sekretariat ICCTF, saya mengucapkan terima kasih

kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan dan capaian ICCTF di tahun 2021, khususnya kepada Majelis Wali Amanat, pemerintah pusat dan daerah, Kementerian/Lembaga terkait, lembaga donor, mitra pelaksana, dan seluruh manajemen serta staf ICCTF.

Saya yakin bahwa ICCTF mampu dalam mendukung arah kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah dan proyek-proyek yang telah dijalankan dapat menghasilkan inovasi berupa tata kelola maupun rekomendasi kebijakan yang dapat memberikan dampak ke wilayah lainnya serta memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat setempat.

Izinkan kami bersama ini menyampaikan Laporan Tahunan ICCTF 2021 untuk berbagi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan

sebagai media pembelajaran dalam penanganan isu perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan. Kami berharap seluruh pihak yang terlibat dapat terus mendukung ICCTF untuk melaksanakan tugas dan fungsi agar dapat mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia. Kritik dan saran yang membangun dari para pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja ICCTF ke depannya.

Terima kasih.



RINGKASAN EKSEKUTIF



Dr. Tonny Wagey

Executive Director
Indonesia Climate Change
Trust Fund - Kementerian
PPN/ Bappenas

Membaiknya situasi dunia di tahun 2021 khususnya Indonesia setelah terkena dampak pandemi COVID-19 menjadi kesempatan untuk ICCTF menyusun rencana percepatan pencapaian target dari program-program yang dijalankan. Penyusunan rencana dan usaha percepatan pencapaian target juga mendapatkan dukungan Bappenas melalui komunikasi dan monitoring intensif. Mekanisme ini mendorong adanya efektivitas organisasi yang menjadi faktor penting atas pencapaian-pencapaian ICCTF selama tahun 2021.

Terkait dengan monitoring intensif, ICCTF memfasilitasi pertemuan dengan mitra pelaksana untuk menghasilkan analisis yang akurat dan komprehensif terkait dengan perkembangan capaian, identifikasi prioritas kegiatan dan efektivitas penyerapan anggaran khususnya untuk proyek COREMAP-CTI baik yang didanai oleh World Bank (WB) maupun Asian Development Bank (ADB).

Pada 2021, COREMAP-CTI WB telah mendukung pembangunan enam sarana dan prasarana di tiga wilayah intervensi proyek yaitu Laut Sawu, SAP Raja Ampat dan KKPD Raja Ampat. Selain itu, dukungan juga diberikan untuk penguatan pengawasan kawasan konservasi oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Terkait dengan peningkatan kapasitas, masyarakat dan pemangku pemangku kepentingan mendapatkan pelatihan terkait dengan konservasi, usaha alternatif dan ekowisata.

Sedangkan untuk COREMAP-CTI ADB, kegiatan-kegiatan prioritas yang sempat tertunda karena pembatasan untuk pencegahan penularan COVID-19, telah mulai dijalankan dan menghasilkan perkembangan.



Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP), Kajian untuk mendukung konservasi ekosistem terumbu karang dan penyusunan desain infrastruktur sarana dan prasarana pendukung ekowisata telah memasuki tahapan penyusunan draf final. Walaupun belum di semua wilayah intervensi proyek, kegiatan konservasi yaitu penanaman mangrove telah mulai dilakukan.

Selain pencapaian diatas, perkembangan positif juga ditunjukkan melalui capaian *window* Blue Carbon dan Blue Finance. Terkait dengan Blue Carbon, Pada tahun 2021, ICCTF melakukan kerjasama dengan dua mitra pembangunan, yaitu dengan Department of Industry, Science, Energy and Resources (DISER), Australia, dan dengan Agence Française de Développement (AFD), Perancis. Sedangkan untuk Blue

Finance, Selama Januari – Oktober 2021, telah dilaksanakan beberapa pertemuan dengan berbagai institusi yaitu, BPD LH, BLU LPMUKP, Kehati, BNI, WB, dan ADB untuk membahas skema dan konsep dari blue finance dan potensi kerja sama terkait *Blue Financing* sebagai bagian penyusunan *Policy Note*.

Dengan perkembangan dan capaian-capaian yang telah diraih, ICCTF, optimis dapat berkomitmen untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh Bappenas dan pemangku kepentingan lainnya. Pembelajaran penting juga telah diidentifikasi untuk pelaksanaan dan pengelolaan program yang lebih baik di tahun 2022.

Harapan kami, Laporan Tahunan ICCTF 2021 memberi manfaat terhadap pengetahuan para pembaca. Saran perbaikan untuk lembaga kami sangat diharapkan.





Benang Merah / Silver Lining

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dibentuk pada tahun 2009 oleh Pemerintah Indonesia sebagai lembaga pendanaan perubahan iklim yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mengkoordinasikan dan menyalurkan dana dalam mendukung kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Sejauh ini ICCTF telah melalui dua fase kelembagaan, yaitu fase pertama, fase persiapan (PREP-ICCTF) periode 2010-2014 dimana United Nation Development Programme (UNDP) bertindak sebagai *interim trustee* dengan sistem keuangan yang digunakan adalah sistem UNDP, dilanjutkan dengan fase kedua sejak tahun 2015 sebagai lembaga dana perwalian nasional (*Nationally Managed Trust Fund*) dengan bentuk kelembagaan sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian PPN/Bappenas dengan menggunakan mekanisme APBN.

ICCTF terus melakukan upaya melalui implementasi program dan proyek pilot dalam rangka menekan emisi gas rumah kaca serta aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan

iklim melalui 4 (empat) area fokus (*window*), yaitu *land-based window*, *energy window*, *adaptation and resilience window*, serta *marine-based window*. *Marine-based window* baru ditambahkan pada tahun 2018 untuk penanganan perubahan iklim pada ekosistem karbon biru yang didukung dengan diterbitkannya Kepmen Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor: 111 Tahun 2018, dimana dalam struktur Majelis Wali Amanat (MWA) ICCTF terdapat 3 (tiga) Kelompok Kerja (Pokja), yaitu: 1) Pokja I Bidang Lingkungan Hidup; 2) Pokja II Bidang Energi Terbarukan; dan 3) Pokja III Bidang Kelautan dan Perikanan.

Seiring dengan perkembangan situasi pada tatanan global dan nasional, peran dan fungsi ICCTF tidak hanya terbatas pada aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pada tahun 2019, ICCTF melakukan *scaling-up* pada proyek-proyek *marine-based* untuk menjangkau penanganan perubahan iklim pada ekosistem laut dan pesisir yang merupakan ekosistem vital bagi Indonesia dengan memulai persiapan program Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI). Beberapa potensi pendanaan

baru pun dijabari yaitu terkait Blended Finance dan Blue Carbon.

Pada tahun 2020, sesuai dengan perubahan kebijakan dan kegiatan prioritas Kementerian PPN/Bappenas maka Pokja I dan Pokja II melaksanakan kegiatan mandiri yang terpisah dari program kerja ICCTF serta dikoordinasikan langsung oleh Direktorat Lingkungan Hidup dan Direktorat Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan. Untuk itu, sejak tahun 2020 ICCTF melalui dukungan Sekretariat berfokus pada program Pokja III Bidang Kelautan dan Perikanan di bawah koordinasi Direktorat Kelautan dan Perikanan. Pokja III ICCTF mendapatkan dukungan pendanaan dari Rupiah Murni APBN untuk operasionalisasi kegiatan Sekretariat ICCTF dan hibah dari Global Environment Facility (GEF) melalui World Bank (WB) dan Asian Development Bank (ADB) untuk melaksanakan program COREMAP – CTI. Fokus kegiatan di bidang kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh ICCTF sejak tahun 2020 adalah

A

Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI),

merupakan salah satu upaya nyata dari pemerintah Indonesia untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan pesisir serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program COREMAP-CTI WB mendanai 6 (enam) program yang berlokasi di Laut Sawu – NTT dan Raja Ampat – Papua Barat. Program COREMAP-CTI ADB juga mendanai 6 (enam) program yang berlokasi di Nusa Penida – Bali serta Gili Matra dan Gili Balu – NTB, termasuk kegiatan kajian *Supply Chain Tuna, Snapper dan Seaweed*, serta beasiswa *Master Degree Program (S2)*;

B

Blended Finance

merupakan salah satu inovasi strategi untuk pembiayaan terkait pesisir dan laut khususnya pendanaan inovatif untuk investasi yang mendukung target-target *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan *Sustainable Blue Finance Institution (SBFI)* melalui dukungan *Pro-Blue Program World Bank*;

C

Blue Carbon,

merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung pengembangan Karbon Biru Indonesia (*Indonesia Blue Carbon Strategy Framework*) sebagai framework yang dapat diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga dalam pengembangan karbon biru. Kejadiannya berupa *Policy Dialogue* melalui dukungan DISER-Australia dan pengembangan proposal pendanaan karbon biru;

D

Bioekonomi,

merupakan salah satu kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait jumlah armada optimal, *resource rent tax/ penerimaan negara bukan pajak (PNBP)*, serta instrumen pengendalian pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Kejadiannya berupa kajian bioekonomi perikanan udang di Laut Arafura, serta *workshop nasional dan short course bioekonomi*.

2009

ICCTF diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan pendanaan perubahan iklim

2010

ICCTF berhasil mendanai proyek-proyek mitigasi dan adaptasi yang penting secara nasional

2014

Hingga 2014, UNDP adalah pengelola dana sementara. Bank Mandiri ditunjuk sebagai Fund Manager ICCTF

2015

ICCTF telah berubah menjadi Satuan Kerja di bawah Bappenas dan terus mendanai Program Hibah Skala Kecil yang sukses di seluruh Indonesia

2018

ICCTF melaksanakan scale-up program dan pilot project Marine Based

2020 - 2022

ICCTF mendanai proyek Marine based dan inisiasi blended finance pada bidang kelautan dan perikanan



Pada Tahun Anggaran 2021, jumlah dana yang dikelola Pokja III ICCTF adalah sebesar Rp 6.592.015.000 dari dana Rupiah Murni APBN, Rp 25.650.000.000 dari dana Hibah World Bank, dan Rp 19.170.000.000 dari dana Hibah *Asian Development Bank*. Tahun 2021 ini ICCTF telah mengimplementasikan 12 program (*on going*) untuk *marine-based window* yang tersebar di 7 lokasi di Indonesia, sehingga secara total sejak tahun 2010 ICCTF telah mengimplementasikan 88 program yang tersebar di 114 lokasi di Indonesia.

Desa Terlibat WB

Total Desa | 92

Papua Barat | 50 NTT | 42

Desa Terlibat ADB

Total Desa | 11

Bali | 5 NTB | 6

Penerima Manfaat/ Aset WB ADB

Jumlah Pemda	6		5
Jumlah Kelompok	63		14
NTT	33		-
NTB	-		11
Bali	-		3
Papua Barat	30		-

Pendampingan Pokmaswas WB ADB

23 | 5

Infrastruktur dan Aset WB

Pusat Informasi	3		PLTS	9 Modul
Menara Pengawas	6		Kapal Pengawas	9
Stasiun Pantau Pari Manta	2		Peralatan Pengawasan	18 Paket
Menara Pantau Cetacean	1		Peralatan Industri Rumah Tangga	12 Paket
KJA	2		Peralatan Pencegah Bycatch	8 Paket
Hiking Track	-		Aplikasi online dan website	3
Jetty Apung	-		Cold Storage Mobile	8



Workshop & FGD

WB**ADB**

Jumlah Workshop dan FGD	24		47
Total peserta	929		1359
Perempuan	288		303
Laki-laki	641		1056



Pelatihan

WB**ADB****Sekretariat**

Jumlah Pelatihan	19		2		1
Jumlah Modul Pelatihan	23		-		1

- Modul untuk pelatihan rehabilitasi
- modul untuk pelatihan pengawasan
- Modul untuk wisata
- Modul untuk penanganan bycatch

Total peserta	552		324		33
Perempuan	238		115		13
Laki-laki	314		209		21



Luasan Rehabilitasi Ekosistem

WB**ADB**

Mangrove (m ²)	10.000		20.000
Lamun (rumpun bibit)	1521		1359
Terumbu Karang (fragmen Karang)	1600		303





Kinerja Kelembagaan ICCTF 2021

A

INFORMASI KEUANGAN PERIODE JANUARI- DESEMBER 2021

Sebagai satu-satunya Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Nasional di Indonesia, ICCTF selalu memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan terkait keuangan sehingga prinsip tata kelola organisasi dapat tercapai.

Bagian Keuangan ICCTF secara rutin mengadministrasikan, menyiapkan dan melaporkan semua kegiatan pelaksanaan secara tertib dan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik. Pelaksanaan program dan kegiatan ICCTF mendapatkan

dukungan yang berasal dari Rupiah Murni APBN serta pendanaan hibah luar negeri. Anggaran DIPA untuk Kegiatan ICCTF tercatat di 2 (dua) Satuan Kerja, yaitu Satuan MWA ICCTF sendiri dan Satker Bappenas, sehingga total anggaran yang dikelola oleh Satuan Kerja Majelis Wali Amanat ICCTF menjadi Rp 80 Miliar, dengan alokasi di Satker ICCTF sebesar Rp 56 Miliar dan alokasi di Satker Bappenas adalah Rp 24 Miliar. Adapun rincian alokasi anggaran ICCTF Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel Rincian Alokasi Dana ICCTF TA 2021

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Kegiatan	Kode Output	Kode Komponen	Sub Komponen	Uraian Sub Komponen	Pagu
1	017312	Kantor Menteri Negara PPN/ Bappenas	6260	EAC	655	T	PPK PPN XIV (ICCTF)	Rp 700.000.000
2	017312	Kantor Menteri Negara PPN/ Bappenas	6260	EAA	002	E	Layanan Perkantoran ICCTF	Rp 655.100.000
3	017312	Kantor Menteri Negara PPN/ Bappenas	6259	EAB	647	D	ICCTF	Rp 2.800.912.000
4	017312	Kantor Menteri Negara PPN/ Bappenas	6271	AEA	903	CR	Lintas Bidang	Rp 100.000.000

5	966010	Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ ICCTF	6264	ABS	301	A-C	Kegiatan Dukungan Satker Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ ICCTF	Rp	6.392.015.000
6	966010	Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ ICCTF	6264	ABS	301	D	Dana Hibah COREMAP-CTI World Bank	Rp	51.017.769.000
7	966010	Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ ICCTF	2935	ABS	301	E	Dana Hibah COREMAP-CTI Asian Development Bank	Rp	19.170.000.000
TOTAL									80.835.796.000

Total penyerapan di tahun 2021 ini adalah 99,39%. Penyerapan ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada 2021, anggaran ICCTF juga mengalami *refocusing* untuk mendukung pendanaan penanganan pandemi COVID-19. Dari alokasi Rp 12 Miliar, menjadi Rp 6,3 Miliar. Pemotongan ini dilaksanakan hanya pada alokasi anggaran Rupiah Murni. Adapun rincian penyerapan untuk Satker MWA ICCTF tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Penyerapan Dana Satker ICCTF TA 2021

OUTPUT	KEGIATAN	Alokasi 2021	DIPA Revisi (Refocusing Anggaran)	Total Penyerapan		Sisa Dana
RM	Rupiah Murni	12.000.000.000	6.392.015.000	6.340.320.759	99,19%	51.694.241
Sub Komponen 301-A	Pendampingan Kegiatan Proyek Hibah	4.293.170.000	1.425.986.000	1.410.222.743	98,89%	15.763.257
Sub Komponen 301-B	Penggalangan Dana (Fundraising) & Komunikasi	1.418.980.000	896.105.000	892.783.722	99,63%	3.321.278
Sub Komponen 301-C	Pelaksanaan Dukungan Kegiatan Operasional ICCTF	6.287.850.000	4.069.924.000	4.037.314.294	99,20%	32.609.706
HLN	Hibah Luar Negeri	44.820.000.000	70.187.789.000	69.771.410.048	99,41%	416.378.952
Sub Komponen 301-D	Hibah COREMAP-CTI WB	25.650.000.000	51.017.789.000	50.732.256.635	99,44%	285.532.365
Sub Komponen 301-E	Hibah COREMAP-CTI ADB	19.170.000.000	19.170.000.000	19.039.153.413	99,32%	130.846.587
		56.820.000.000	76.579.804.000	76.111.730.807	99,39%	468.073.193

Pada tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2021 ini implementasi anggaran untuk kegiatan program COREMAP-CTI WB dan COREMAP-CTI ADB sudah dapat terlaksana dengan baik dan sudah beradaptasi dengan segala keterbatasan kegiatan di masa pandemi COVID-19. Penyerapan dana WB dari alokasi Rp 51 Miliar adalah 99,43% dan penyerapan dana ADB dari alokasi Rp 19,1 Miliar adalah 99,18%. Sedangkan untuk dana Rupiah Murni dari alokasi Rp 6,3 Miliar adalah 99%.

Pada satker Bappenas, alokasi dana ICCTF tahun anggaran 2021 ini adalah sebesar Rp 4,2 Miliar yang terdiri dari 4 sub komponen. Total penyerapan di akhir tahun 2021 ini adalah sebesar 99%.

Tabel Rincian Penyerapan Dana ICCTF di Satker Bappenas TA 2021

Sub Komponen	Kegiatan	Alokasi Anggaran 2021	Total Penyerapan s.d Desember 2021		Sisa Anggaran
Sub Komponen-D	ICCTF	2.800.912.000	2.800.910.640	100%	1.360
Sub Komponen-E	LAYANAN PERKANTORAN ICCTF	655.100.000	613.821.440	93%	41.278.560
Sub Komponen-T	PPK PPN XIV (ICCTF)	685.000.000	684.680.725	99%	319.275
Lintas Bidang	ICCTF	100.000.000	99.987.508	99%	12.492
TOTAL		4.241.012.000	4.199.400.313	99%	41.611.687

B

MANAJEMEN PENDANAAN

Sejak 2015, ICCTF adalah Satuan Kerja di bawah Kementerian PPN/Bappenas. Sebagai Lembaga Wali Amanat, ICCTF sudah mengelola dana Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri sejak tahun 2015 sampai dengan 2021. Total Rupiah Murni APBN yang dikelola sejak 2015 sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar Rp 84 miliar serta Hibah Luar Negeri yang dikelola ICCTF sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 ini adalah sebesar Rp 242 Miliar. Untuk Portofolio sampai dengan 2022, ICCTF telah mengelola dana hibah sebesar equivalenten Rp 305,4 Miliar dari 3 donor bilateral yaitu USAID, UKCCU, dan DANIDA serta 2 donor multilateral dari WB dan ADB dan Technical Assistance dari BMUB/INFIS. Portofolio hibah ICCTF dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 bisa dilihat dalam table di bawah ini:

					Technical Assistant
USAID	UKCCU	DANIDA	WORLD BANK	ADB	BMUB / GIZ / INFIS
USD 5 mil	GBP 4 mil	DKK 5 mil	USD 6,2 mil	USD 5,2 mil	EUROS 3,5 mil
2015 - 2019			2019 - 2022		

C

AUDIT

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas, Laporan Keuangan ICCTF setiap tahunnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk tahun 2021 ini telah dilakukan audit khusus untuk Hibah COREMAP-CTI WB TA 2020 dan COREMAP-CTI ADB TA 2020. Laporan Keuangan *Audited* 2020 telah disusun oleh BPK di tahun 2021. BPK telah mengeluarkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** untuk Laporan Keuangan Hibah COREMAP-CTI WB dan ADB tahun anggaran 2020 dan hasil tersebut telah disampaikan kepada Donor yaitu World Bank dan Asian Development Bank dan telah mendapatkan persetujuan (*accepted*) dari Donor.



D

ADMINISTRASI & SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dasar hukum dalam pengelolaan hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan pembangunan tertentu diamanatkan di dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Lembaga Wali Amanat yang merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh Kementerian / Lembaga untuk mengelola Dana Perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah. Kementerian PPN/Bappenas memiliki Majelis Wali Amanat (MWA) dalam pengelolaan dana hibah yang masuk ke pemerintah yang kemudian dituangkan ke dalam Keputusan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor: 111 Tahun 2018 tentang Pembentukan MWA Dana

Perwalian Perubahan Iklim Indonesia / Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), yang memiliki tugas:

Menetapkan pengelola dana amanat.

- a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan program, melaksanakan kegiatan dan mengelola dana sebagaimana disepakati dalam perjanjian hibah.
- b. Memilih dan menetapkan Direktur Eksekutif.
- c. Menetapkan rencana kerja dan penganggaran kegiatan berkala.
- d. Menyusun laporan keuangan Indonesia Climate Change Trust Fund.
- e. Melakukan penarikan dana Hibah dari Pemberi Hibah.
- f. Memerintahkan pembayaran Dana Perwalian kepada pihak-pihak yang terkait.
- g. Melakukan proses pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ ICCTF dengan misi memobilisasi, mengelola, dan mengalokasikan dana dari dunia internasional serta sektor publik dan swasta, ICCTF pada tahun 2021 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) tenaga ahli/ konsultan dan 10 (sepuluh) jasa lainnya/pendukung dengan rincian:

Jumlah Staf TA 2021	Jenis Kelamin		Jasa Konsultan/ Jasa Lainnya		Sumber Pembiayaan			Progres		Jumlah sampai Desember 2021
	L	P	Konsultan	Lainnya	APBN	WB	ADB	Mengundurkan diri	Habis Kontrak	
32	20	12	22	10	20	4	8	3 Orang	3 Orang	26 Orang

Sejak pertengahan Maret 2020, ICCTF menerapkan Sistem Kerja dari Rumah/ *Work From Home (WFH)* dan Sistem Kerja dari Kantor / *Work From Office (WFO)* secara bergiliran terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 ini, seluruh pegawai ICCTF yang mendapat persetujuan dokter untuk divaksin, telah divaksin bersama dengan pegawai Kementerian PPN/ Bappenas lainnya untuk mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19.



Kegiatan Sekretariat ICCTF

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan maupun kinerja staf khususnya, selama tahun 2021, ICCTF telah mengikuti kegiatan-kegiatan diantaranya:

1

Rapat Koordinasi penyusunan laporan kuartal 1 yang dilaksanakan di hotel Margo Depok tanggal 10 Maret 2021. Agenda rapat adalah Pembahasan seluruh progres kegiatan ICCTF TA untuk Kuartal I 2021 dan Pembahasan finalisasi MoU dengan ADB untuk *proposed loan* “*Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture*”.

2

Rapat Pembahasan Rekonfirmasi Usulan Pagu Anggaran PHLN Kementerian PPN/Bappenas TA 2022 dan Prakiraan Maju 2023-2026 tanggal 25 Juni 2021.

Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penetapan Pagu Indikatif 2022 melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. S-361/MK.02/2021 dan B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021, serta dalam rangka penyusunan Pagu Anggaran RAPBN 2022 yang lebih kredibel, terutama untuk penganggaran kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dan hibah.

3

Sosialisasi Perdirjen No. Per-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga pada tanggal 28 Juni 2021.

4

Rapat Petunjuk Teknis Koreksi Penyusutan Aset Tetap Tidak Susut pada Satker MWA ICCTF TA 2020 tanggal 9 Juli 2021

5

Rapat persiapan *refocusing* anggaran tanggal 23 Juli 2021. Rapat diadakan oleh Biro Perencanaan Organisasi dan Tata laksana Kementerian PPN/Bappenas. Rapat membahas perihal adanya rencana pemotongan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas. Pada rapat ini, ICCTF diminta untuk mengajukan besaran usulan anggaran untuk *refocusing*. ICCTF telah melakukan *exercise* terkait pengurangan pagu anggaran pada Satker ICCTF. Berdasar *exercise* tersebut, besaran pemotongan untuk *refocusing* maksimum diusulkan sebesar **Rp 400.000.000,-**. Kegiatan utama satker ICCTF adalah pendampingan terhadap proyek COREMAP-CTI, yang akan berakhir di Juni 2022 (WB) dan Desember 2022 (ADB). Untuk itu, tahun 2021 merupakan tahun penting bagi ICCTF untuk melakukan pendampingan untuk memastikan pekerjaan mitra pelaksana diselesaikan dengan baik

6

Training aplikasi STEP (*Systematic Tracking of Exchange in Procurement*), dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2021. *Training* dibimbing oleh Ibu Tuti dan Bapak Andre dari bagian *procurement* World Bank. Peserta *training* terdiri dari bagian program dan *operation* ICCTF.

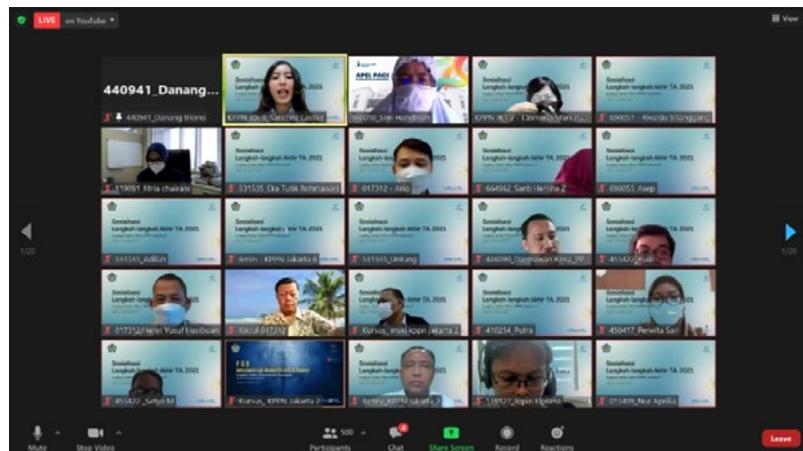
Tujuan *training* STEP ini adalah untuk memperbaharui pengetahuan staf ICCTF dalam pengelolaan sistem pengadaan, dimana semua pengadaan harus tercatat dalam STEP. STEP Ini adalah merupakan aplikasi dari World Bank yang digunakan untuk melacak semua proses pengadaan yang dibiayai dari hibah/pinjaman World Bank.

7

Bimbingan Teknis Pelaksanaan SPSE Versi 4.4 & Persiapan Dokumen Rencana Usulan Pengadaan Barang & Jasa TA 2022 dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2021 melalui *Zoom Conference*.

8

Sosialisasi langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2021 Satker Mitra KPPN Jakarta II dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2021. Rapat diadakan oleh Kementerian Keuangan. Rapat diadakan setiap akhir tahun anggaran dan setelah diterbitkannya pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor.PER-9/PB/2021 tentang pedoman pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021 kepada seluruh Satuan kerja mitra KPPN Jakarta II melalui Surat KPPN Jakarta II Nomor: S-1406/WPB.12/KP.02/2021 tanggal 12 Oktober 2021. Tujuan diadakannya sosialisasi tersebut adalah untuk menyamakan persepsi atas pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran.



9

Workshop *Procurement* COREMAP-CTI ADB dilaksanakan 13 Oktober 2021.

10

Rapat Penelaahan usul revisi anggaran pembukaan blokir, pemenuhan kekurangan *refocusing* tahap IV dan penambahan hibah luar negeri Kementerian PPN/Bappenas TA 2021 pada tanggal 14 – 15 Oktober 2021.

11

Penelaahan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 Kementerian PPN/Bappenas 25 Oktober 2021.

Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2022 (1/2)

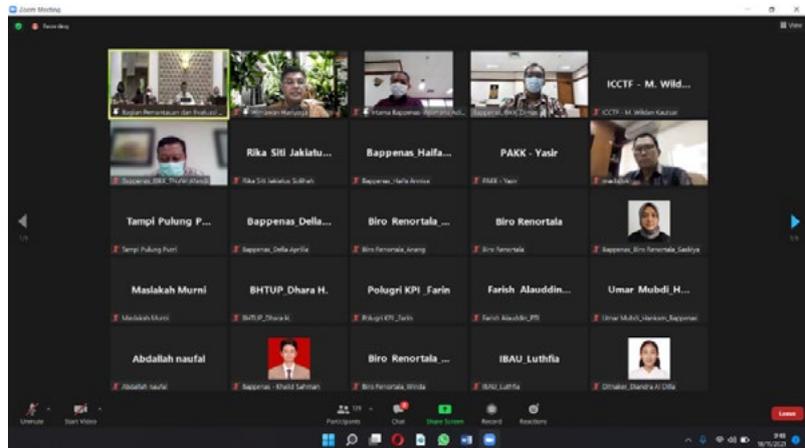
Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2022

Program	RM	RMP	Pinjaman	Hibah	Jumlah
Perencanaan Pembangunan Nasional	635,30	3,02	56,46	51,82	746,60
Dukungan Manajemen	629,29	-	-	-	629,29
Jumlah	1.264,59	3,02	56,46	51,82	1.375,89

Rincian:
 • Belanja Operasional Rp 392,95 miliar
 • Bel. Non Operasional Rp 982,94 miliar

12

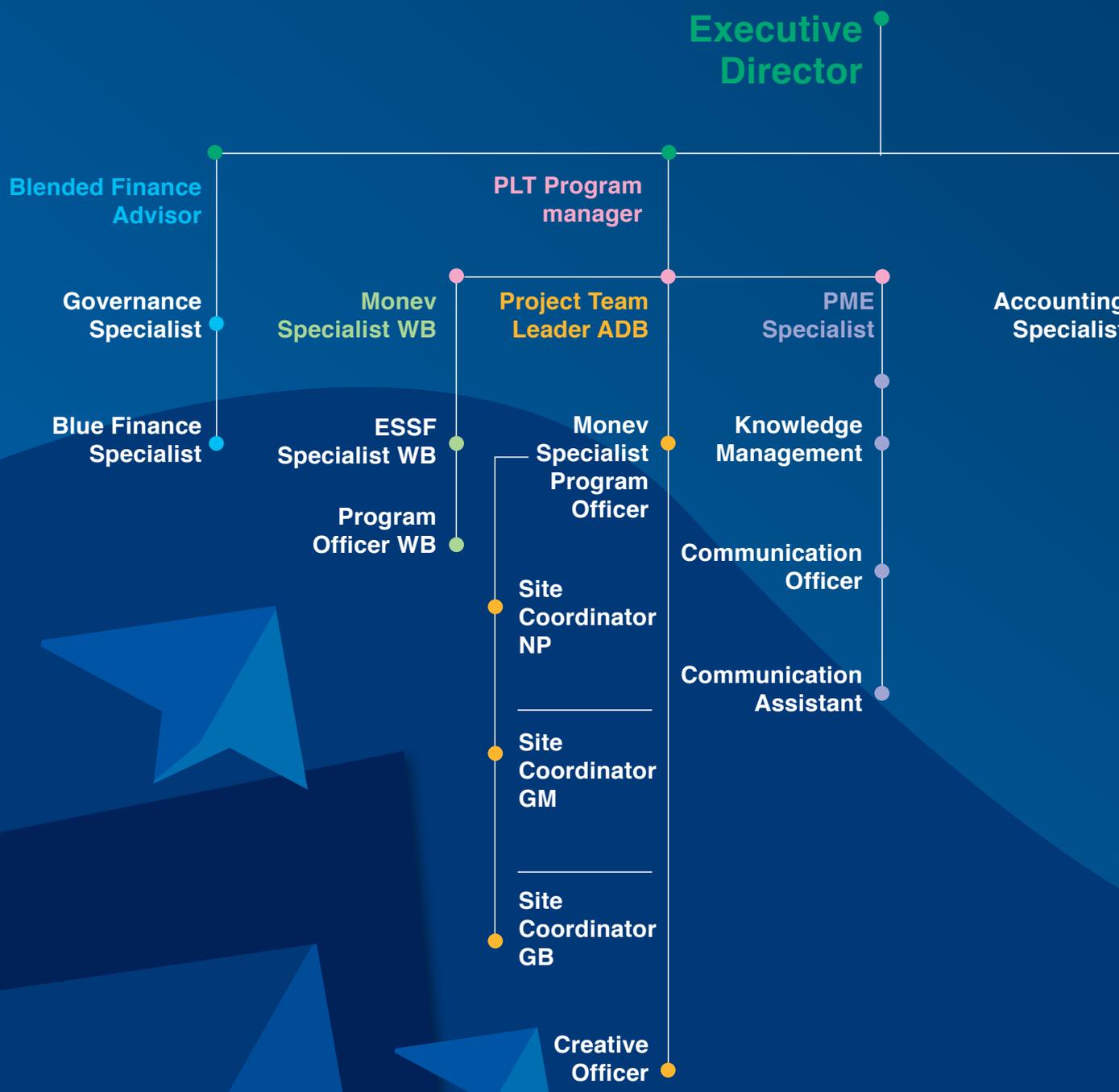
Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 dan Pendampingan Pengisian e-Performance di Kementerian PPN/ Bappenas dilaksanakan tanggal 18-19 November 2021



13

Annual Evaluation dan Penyusunan Laporan Tahunan Satuan Kerja MWA ICCTF tahun anggaran 2021, yang dilaksanakan tanggal 21 Desember 2021, di Hotel Fairmont Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan menyusun laporan tahunan Satker ICCTF tahun anggaran 2021.

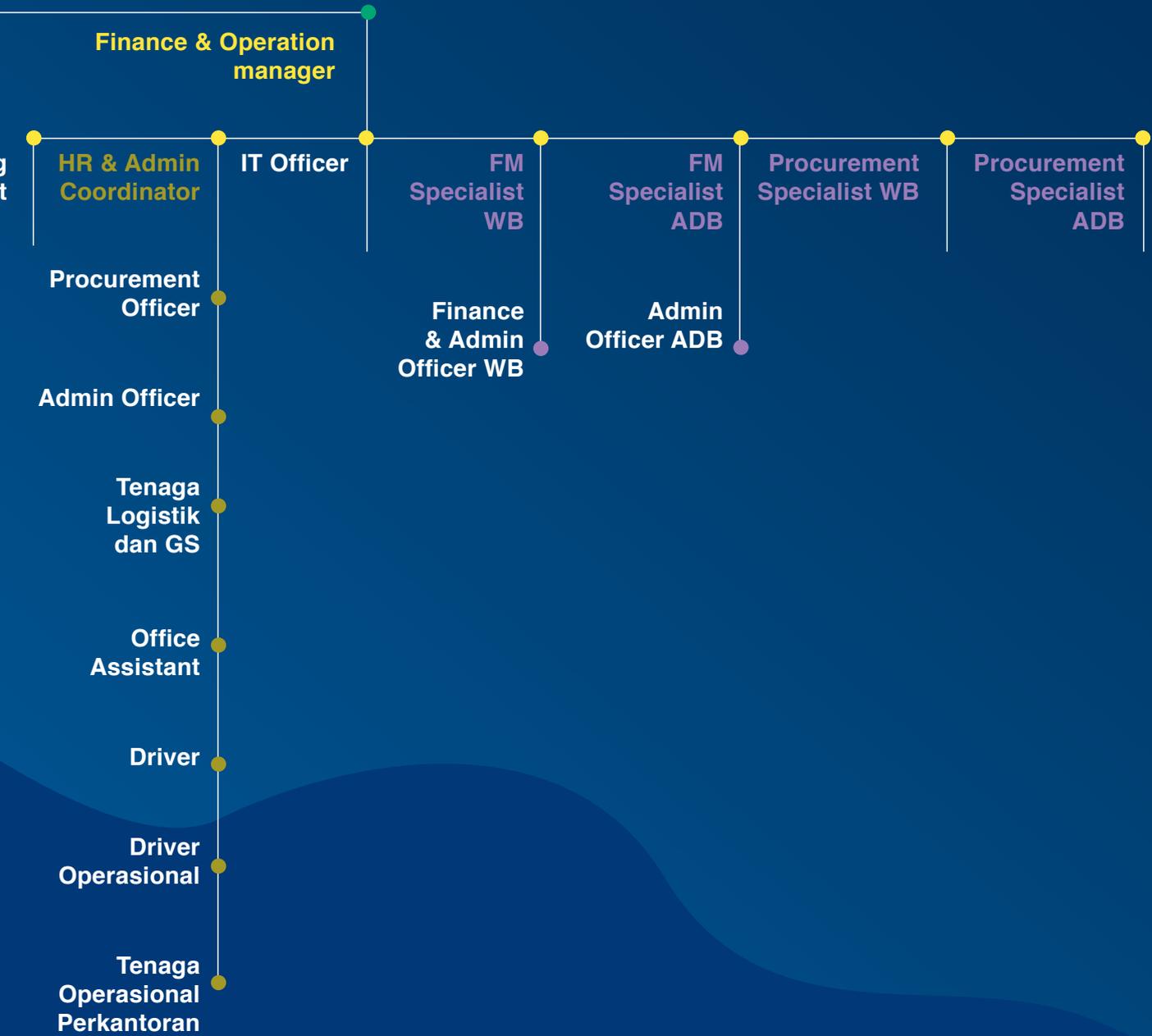






Struktur Organisasi ICCTF

sampai Desember 2021





PROGRESS & CAPAIAN 2021 COREMAP-CTI WORLD BANK (WB)

COREMAP-CTI merupakan salah satu upaya nyata dari Pemerintah Indonesia untuk menjaga kelestarian sumberdaya laut dan pesisir serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pada tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pembatalan (*cancelation*) atas program COREMAP-CTI. Setelah dilakukan koordinasi antar instansi, disepakati adanya restrukturisasi COREMAP-CTI untuk kegiatan yang didanai oleh World Bank. LIPI melanjutkan kegiatan yang didanai dari pinjaman, sementara Bappenas, melalui Satker ICCTF melanjutkan kegiatan COREMAP-CTI khususnya untuk kegiatan yang didanai dari hibah GEF. Restrukturisasi ini menghasilkan pembaharuan tujuan (*objective*) program yaitu untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam pemantauan dan penelitian ekosistem pesisir untuk menghasilkan informasi bagi pengelolaan sumberdaya berdasarkan bukti dan peningkatan efektifitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas.

COREMAP-CTI World Bank memiliki empat komponen kegiatan, dimana tiga

komponen dilaksanakan oleh LIPI (komponen 1, 2, dan 4) dan satu komponen dilaksanakan oleh ICCTF Bappenas (komponen 3). Komponen tiga adalah peningkatan efektifitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas yang dilakukan di dua lokasi yaitu Papua Barat (SAP Raja Ampat, SAP Kep. Waigeo sebelah barat, dan KKPD Raja Ampat) dan Nusa Tenggara Timur dengan fokus area di Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Tujuannya adalah meningkatkan nilai efektifitas pengelolaan ekosistem target menuju Kawasan Konservasi Perairan yang terkelola secara optimal yaitu setidaknya 75% level biru.

Komponen tiga terdiri dari tiga sub komponen dan enam paket kegiatan yang dilakukan dengan mekanisme pemberian hibah bantuan pemerintah melalui *call for proposal*. Terdapat enam paket kegiatan yang diimplementasikan oleh lima mitra pelaksana sejak Agustus 2020, yaitu:





Paket **Kegiatan 1**

Pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan oleh masyarakat di Raja Ampat. Mitra pelaksana paket ini adalah Yayasan Terangi dengan dana hibah sebesar USD 1,245,300 dan lokasi implementasi di Raja Ampat

Paket **Kegiatan 2**

Pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan oleh masyarakat di TNP Laut Sawu. Mitra pelaksana paket ini adalah YAPEKA dengan dana hibah sebesar USD 751,600 dan lokasi implementasi di TNP Laut Sawu

Paket **Kegiatan 3**

Pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan oleh masyarakat di TNP Laut Sawu. Mitra pelaksana paket ini adalah YAPEKA dengan dana hibah sebesar USD 751,600 dan lokasi implementasi di TNP Laut Sawu

Paket **Kegiatan 4**

Implementasi terhadap wilayah pengelolaan pesisir terpadu. Mitra pelaksana paket ini adalah PKSPL-IPB dengan dana hibah sebesar USD 869,000 dan lokasi implementasi di Papua Barat

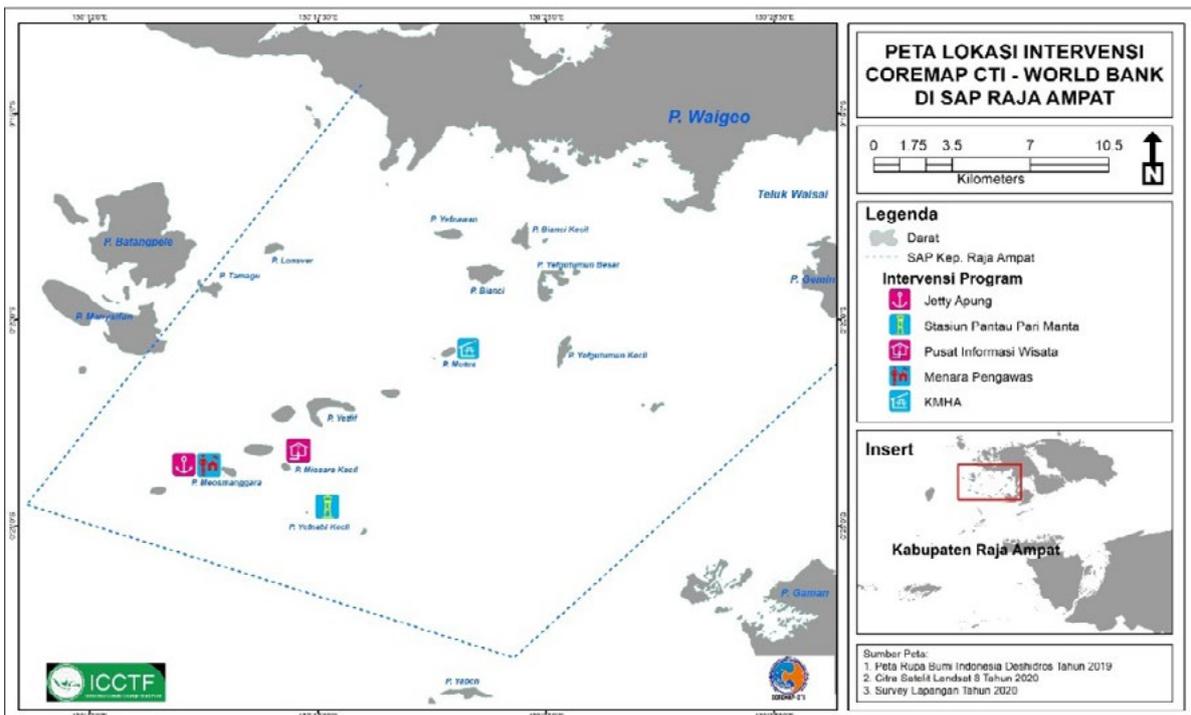
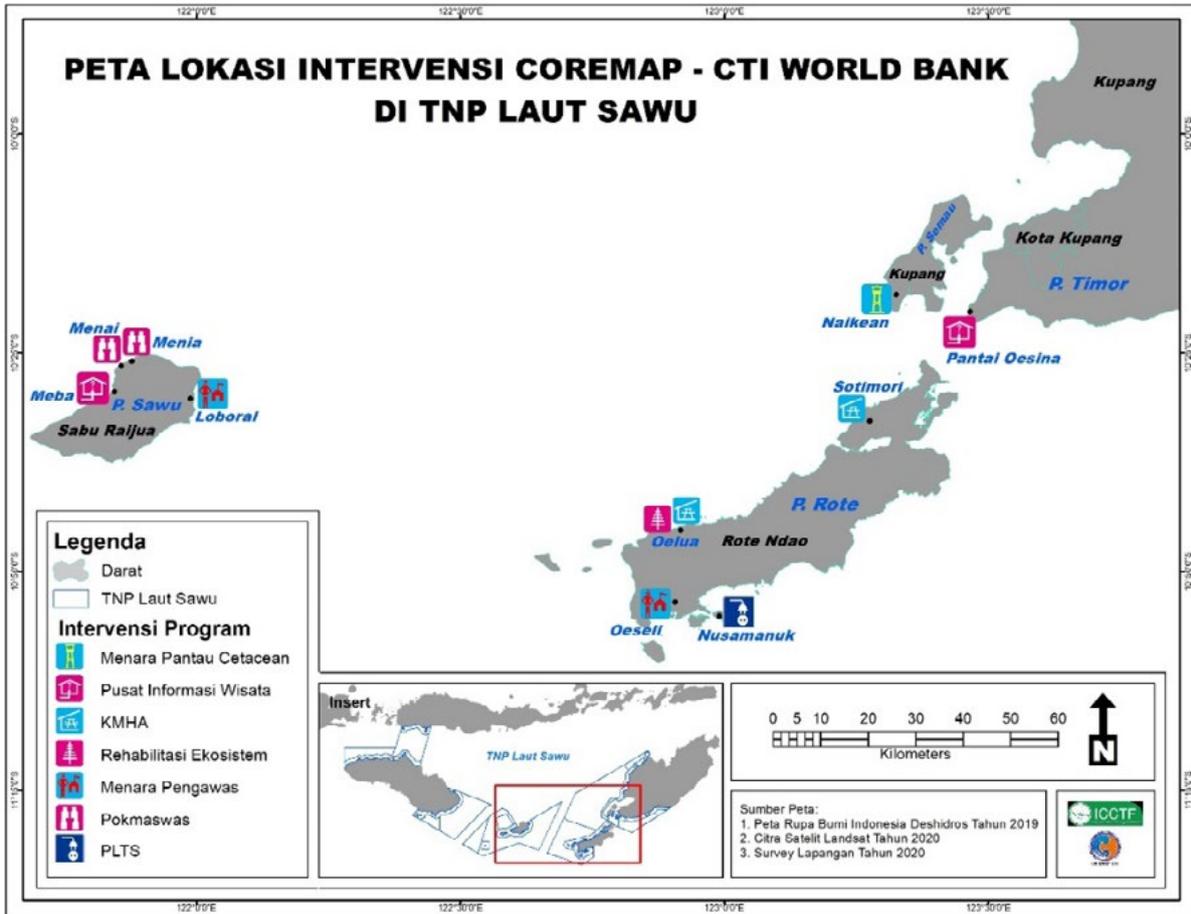
Paket **Kegiatan 5**

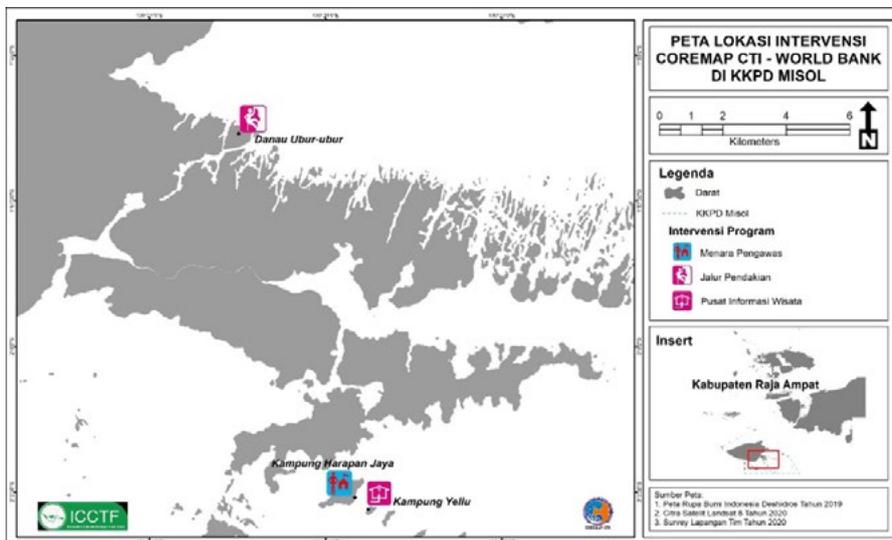
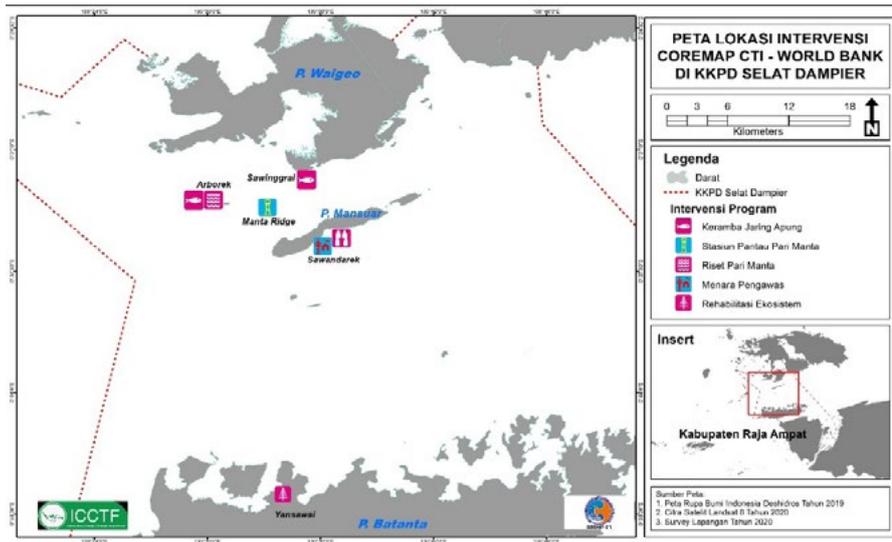
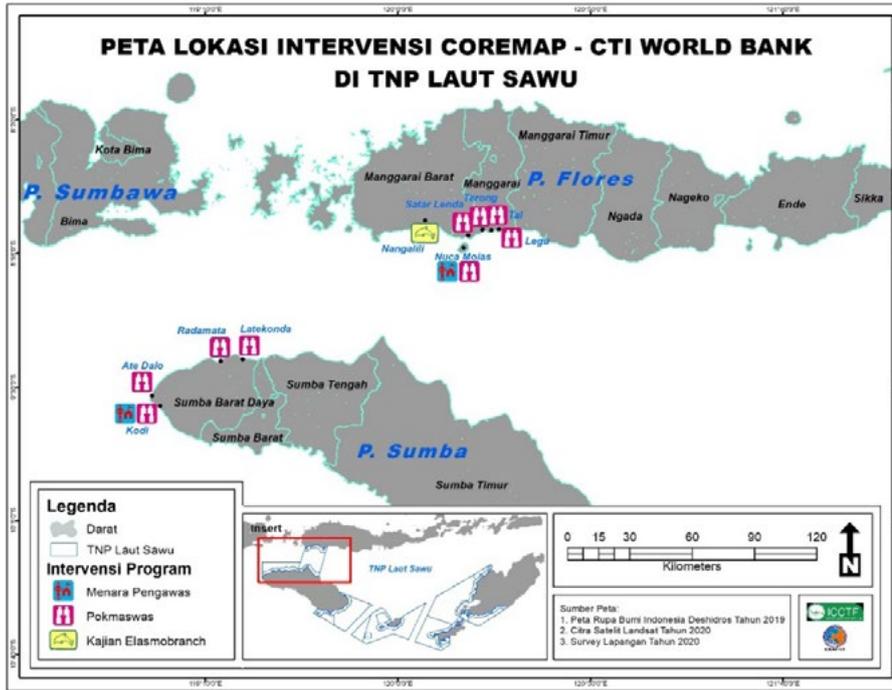
Dukungan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Mitra pelaksana paket ini adalah Yayasan Terangi dengan dana hibah sebesar USD 1,344,300 dan lokasi implementasi di TNP Laut Sawu dan Raja Ampat

Paket **Kegiatan 6**

Akses wilayah pengelolaan sumber daya perikanan untuk masyarakat. Mitra pelaksana paket ini adalah PILI dengan dana hibah sebesar USD 598,000 dan lokasi implementasi di TNP Laut Sawu dan Raja Ampat

Peta Lokasi Kegiatan COREMAP-CTI WB





Capaian Milestone Program **COREMAP-CTI WB**

Di tahun 2021 COREMAP-CTI WB sudah mencapai beberapa target yang menjadi milestone di tahun ini. Pencapaian tersebut diukur sesuai dengan *Result Framework* yang sudah disusun dan menjadi capaian yang juga dilaporkan ke World Bank.

1

Pembangunan Sarana dan Prasarana Skala Kecil

Sebagai penunjang untuk peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan, COREMAP-CTI WB menargetkan sejumlah sarana dan prasarana skala kecil dapat dibangun pada periode ini terutama untuk mendukung pengembangan ekowisata, pengawasan dan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi sebagai bagian dari pemanfaatan berkelanjutan. Sarana dan prasarana ini sebagian besar di bangun di 3 kawasan konservasi yang menjadi lokasi intervensi COREMAP-CTI WB yaitu TNP Laut Sawu, SAP Raja Ampat, KKPD Raja Ampat dan diperuntukkan bagi masyarakat di kawasan. Pembangunan sarana dan prasarana ini dilakukan oleh mitra pelaksana kegiatan COREMAP-CTI WB paket 1, paket 2, dan paket 5.

1.1 Sarana dan prasarana ekowisata

Di tahun 2021, COREMAP-CTI WB sudah membangun enam (6) sarana dan prasarana ekowisata di tiga lokasi program. Sarana dan prasarana tersebut adalah Pusat Informasi Ekowisata (3 unit), Stasiun Pemantauan Pari Manta (2 unit) dan Menara Pantau Cetacean (1 unit). Infrastruktur ini akan di Kelola oleh kelompok masyarakat yang sudah dibekali juga dengan SOP untuk pemanfaatan dan pemeliharannya.

Gambar Pusat Informasi Ekowisata dan Rangka Tulang Lumba-lumba pemandu sirip pendek (*Short Fin Pilot Whale*) yang ada di dalam pusat informasi ekowisata.

Pusat informasi ekowisata ini 2 unit dibangun di TNP Laut Sawu yaitu di Oesina, Kupang dan di Mebba, Sabu, NTT. Pusat informasi ini akan dikelola oleh Pokdarwis dimasing-masing lokasi



Gambar Pusat Informasi Ekowisata di SAP Raja Ampat, Papua Barat

yang menggunakan desain dari rumah adat setempat. Pusat informasi ini juga akan dijadikan sebagai pintu masuk utama para wisatawan yang datang ke SAP Raja Ampat



Gambar Menara Pantau Cetacean di Desa Naikean, Semau, NTT,

sebagai dukungan untuk pengembangan wisata berbasis spesies. Menara ini akan di kelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang menjadi dampingan dari mitra pelaksana COREMAP-CTI World Bank



Gambar. Stasiun pemantauan pari manta yang sudah dibangun di Yef Nabi Kecil, SAP Raja Ampat, Papua Barat.

Satu unit stasiun pemantauan lainnya ditempatkan di Dayan, KKPD Selat Dampier. Stasiun pemantauan ini akan dikelola oleh kelompok yang sudah dibentuk bersama dengan BKKPN Kupang Satker Raja Ampat.



1.2 Sarana dan prasarana pengawasan

Untuk penguatan kelompok masyarakat pengawas, beberapa sarana dan prasarana juga sudah tersedia untuk menunjang kegiatan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya. Dari 7 unit menara yang direncanakan akan dibangun, sudah terlaksana pembangunan untuk 6 unit menara pengawas di enam lokasi yaitu Nuca Molas – Manggarai, Oeseli – Rote Ndao, Laborai – Sabu Raijua, Kendu wela – Sumba Barat Daya, Meosmanggara – Raja Ampat, Suwandarek – Raja Ampat. Satu menara pengawas yang akan dibangun ada di Harapan Jaya – Misool.



Gambar lokasi menara pengawas yang sudah dibangun di TNP Laut Sawu, NTT. Menara ini dikelola oleh kelompok Pokmaswas



Gambar lokasi menara pengawas yang sudah dibangun di Raja Ampat, Papua Barat. Menara ini dikelola oleh kelompok Pokmaswas yang didampingi oleh mitra pelaksana COREMAP-CTI. Untuk satu lokasi di Misool dalam proses pembangunan.

Selain menara pengawas, COREMAP-CTI juga memberikan dukungan 9 unit sarana transportasi pengawasan (kapal pengawasan) yang akan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Pokmaswas dan BLUD KKPD Raja Ampat. Untuk TNP Laut Sawu akan mendapatkan 5 unit kapal dan untuk Raja Ampat akan mendapatkan 4 unit kapal pengawas.



Gambar kapal pengawasan yang diberikan untuk mendukung kegiatan pengawasan oleh Pokmaswas di TNP Laut Sawu, SAP Waigeo sebelah barat, SAP Raja Ampat, dan KKPD Raja Ampat.

1.3 Sarana dan prasarana perikanan berkelanjutan

Untuk mendukung Pemanfaatan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi, COREMAP-CTI WB memberikan sarana dan prasarana budidaya perikanan berupa Keramba Jaring Apung (KJA) kepada kelompok masyarakat dampingan. 2 unit KJA dari 3 unit yang direncanakan sudah terbangun dan dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat di Yensawai Barat dan Yensawai Timur. KJA ini juga sudah mulai dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat dampingan



Gambar sarana dan prasarana Keramba jaring apung (KJA) yang sudah mulai dimanfaatkan oleh kelompok dampingan.

Selain KJA, untuk kegiatan perikanan yang ada saat ini, mitra pelaksana COREMAP-CTI juga membuat 8 *mobile cold storage* yang digunakan oleh kelompok untuk menjaga kesegaran hasil tangkapan sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih baik (gambar bawah)



Gambar. *Mobile Cold Storage*

2

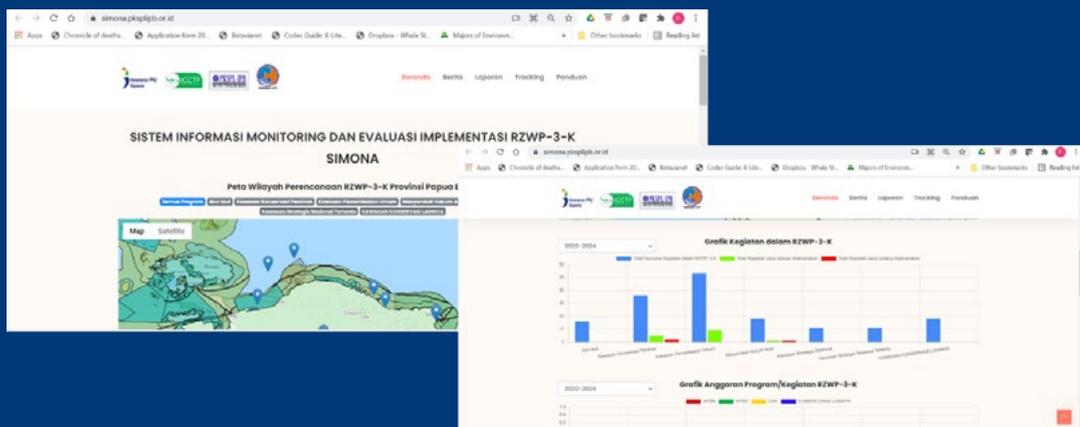
Pengembangan Sistem Monitoring dan Pengumpulan Data



2.1 Sistem monev RZWP3K

Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu bagian didalam kerangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karenanya diperlukan suatu sistem yang dapat memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dari indikatif program dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). COREMAP-CTI WB melalui mitra pelaksana PKSPL-IPB memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan membuat suatu sistem monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan untuk memantau implementasi dilapangan.

Sistem yang dibangun oleh PKSPL berbasis *website* dan dapat diakses oleh masyarakat umum untuk melihat informasi terkait alokasi pemanfaatan ruang dan juga melaporkan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan alokasi ruang atau kegiatan ilegal lainnya. Sampai dengan Desember 2021, sistem monitoring ini masih dalam tahap ujicoba dan pengisian database kegiatan dari masing-masing organisasi perangkat daerah dan mitra pelaksana COREMAP-CTI WB. Semua kegiatan yang dilakukan oleh mitra pelaksana COREMAP-CTI yang sesuai dengan indikatif program dalam RZWP3K Papua Barat dapat dilihat dalam sistem monitoring ini



Gambar tampilan halaman depan website sistem monitoring dan evaluasi dan jumlah kegiatan indikatif program yang sudah diimplementasikan

2.2 Aplikasi pengumpulan data Elasmobranch dan Cetacean

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan jenis terancam adalah ketersediaan data dan informasi. Untuk itu YRCI sebagai mitra COREMAP-CTI WB membuat suatu aplikasi pengumpulan data yang dapat digunakan oleh semua pihak (*citizen science*) untuk menyampaikan data dan informasi terkait hiu, pari, pari manta, lumba-lumba dan paus. Aplikasi ini akan berkontribusi kepada *database* dari masing-masing jenis terancam. Ada dua aplikasi yang dibuat yaitu khusus untuk hiu, pari dan pari manta (*elasmobranch*) dan untuk cetacean (lumba-lumba dan paus). Aplikasi ini sudah dapat di download di *app store* dan juga *google play store*



Gambar tampilan halaman depan website sistem monitoring dan evaluasi dan jumlah kegiatan indikatif program yang sudah diimplementasikan

3

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu rencana kerja yang dilakukan oleh COREMAP-CTI WB. Untuk tahun 2021 ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk monitoring dan evaluasi yaitu:

3.1 Monitoring program dan keuangan

Kegiatan ini diadakan secara berkala setiap 2 – 3 bulan sekali untuk memonitor perkembangan capaian kegiatan dari 6 mitra pelaksana. Dalam setiap monitoring dilakukan pemaparan capaian kegiatan dan juga permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh mitra pelaksana selama implementasi kegiatan di lapangan. Selain itu juga disampaikan progress penyerapan dari masing-masing mitra dan rencana kerja kedepannya. Pemeriksaan dokumen pendukung capaian kegiatan dan juga administrasi keuangan juga dilakukan terutama pada saat monitoring yang dilakukan secara *offline*.

Berikut ini adalah jadwal kegiatan monitoring yang dilakukan oleh PIU COREMAP WB, ICCTF dan Bappenas:

Monitoring 1:

akhir Januari – awal Februari 2021

Monitoring 2:

April 2021

Monitoring 3:

Juli 2021

Midterm evaluasi workshop:

November 2021

Annual evaluasi workshop:

Desember 2021

3.2 Monitoring infrastruktur

Selain monitoring reguler yang dilakukan, PIU COREMAP-CTI, ICCTF dan Bappenas juga melakukan kunjungan lapang untuk melihat perkembangan pembangunan infrastruktur dan bertemu dengan calon penerima manfaat atau kelompok yang akan mengelola infrastruktur yang sudah dibangun. Dalam kegiatan monitoring infrastruktur juga dilihat kesesuaian pembangunan dengan perencanaan yang sudah dibuat (DED dan RAB) untuk menjamin kualitas dan juga kesesuaian administrasi. Kegiatan monitoring yang dilakukan adalah sebagai berikut:

**a. Monitoring infrastruktur Raja Ampat:
April 2021**

Monitoring dilakukan terhadap 4 unit bangunan yaitu menara pengawas di Meosmanggara dan Suwandarek, Pusat informasi ekowisata dan Stasiun pemantauan pari manta di Miosara kecil.

**b. Monitoring infrastruktur Sabu Raijua:
Mei 2021**

Monitoring dilakukan terhadap 2 unit bangunan yaitu menara pengawas di Desa Laborai dan Pusat informasi ekowisata di Mebba

**c. Monitoring infrastruktur – Kupang,
Manggarai dan Sumba Barat Daya:
September 2021**

Monitoring dilakukan terhadap 4 unit bangunan yaitu menara pantau Cetacean di Naikean, Semau, Pusat informasi ekowisata di Oesina, Kupang, menara pengawas di Nuca Molas, Manggarai dan Kendu wela Sumba Barat Daya.

**d. Monitoring infrastruktur Raja Ampat:
November 2021**

Monitoring dilakukan untuk 3 unit bangunan yaitu Keramba Jaring Apung (KJA) di Yensawai, Pusat informasi di Miosara dan Menara pengawas di Suwandarek.

3.3 World Bank Mission

Mission WB dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan yaitu pada bulan Mei, September dan November 2021. Hasil dari mission dituangkan kedalam *Aide Memoire* yang kemudian ditindaklanjuti oleh PIU COREMAP-CTI sesuai dengan rencana aksi yang sudah disepakati.

4 Exit Strategy

Mendekati penyelesaian proyek diperlukan suatu *exit strategy* yang dapat menjamin proses transfer aset, transfer *knowledge* dan keberlanjutan kegiatan yang memerlukan pendampingan setelah proyek selesai berjalan dengan baik dan melibatkan berbagai pihak terkait. Untuk itu diadakan kegiatan workshop *exit strategi* dengan para mitra pelaksana dan para pemangku kepentingan terkait. Kegiatan diadakan di Kupang pada tanggal 15-17 Desember 2021. Hasil dari workshop tersebut sebagai berikut:

EXIT STRATEGY



Pengelolaan Aset Sarana dan Prasarana

- ❑ Mengintegrasikan kelompok-kelompok yang ada (POKDARWIS, POKMASWAS, KUB) ke dalam BUMDes untuk menjamin keberlanjutan kegiatan kelompok untuk operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana
- ❑ Mengintegrasikan kegiatan pengawasan dan operasionalnya ke dalam rencana kerja desa yang didanai dari dana desa dengan persetujuan masyarakat desa
- ❑ Mengintegrasikan kegiatan Coremap-CTI dengan kegiatan pada Kementerian/Lembaga (pembinaan, bantuan pemerintah)
- ❑ Mendorong akses pendanaan melalui pendanaan alokasi khusus untuk sarpras lain yang masih dibutuhkan dan juga anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana
- ❑ Menghubungkan kelompok dengan pihak swasta untuk dapat mengakses CSR
- ❑ Meningkatkan kapasitas kelompok dalam mengelola sarana dan prasarana dan mengakses pendanaan untuk keberlanjutan kegiatan

EXIT STRATEGY



Transfer Knowledge

- ❑ Mendokumentasikan capaian hasil proyek (policy brief, kajian, pembelajaran) dengan baik dan menjamin dokumen dapat diakses oleh semua pihak
- ❑ Hasil kajian, policy brief dan dokumentasi pembelajaran disampaikan kepada para pemangku kepentingan terkait (pemerintah nasional, pemerintah daerah, universitas dan masyarakat) untuk dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan dan rencana kerja

Highlight Implementasi Kegiatan Mitra Pelaksana

Paket Kegiatan 1:

Pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan oleh masyarakat di Raja Ampat

Yayasan Terangi



Pada periode tahun 2021, Yayasan Terangi sebagai mitra pelaksana paket 1 sudah mengimplementasikan beberapa kegiatan antara lain pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas, dan pengembangan usaha. Capaian yang sudah dihasilkan antara lain:

1.1 Pembangunan infrastruktur



1.2 Peningkatan kapasitas

Kegiatan peningkatan kapasitas juga dilakukan oleh Yayasan Terangi melalui paket 1 antara lain:

Workshop Rehabilitasi Ekosistem Pesisir untuk Terumbu Karang, Lamun dan Mangrove. Rehabilitasi ekosistem pesisir merupakan salah satu upaya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya, untuk melakukan kegiatan ini diperlukan pengetahuan tentang ekosistem itu sendiri serta metode-metode yang dapat digunakan untuk rehabilitasi. Peningkatan kapasitas diikuti oleh staff

pemerintah daerah, pengelola kawasan dan juga kelompok masyarakat yang sudah dibentuk untuk kegiatan rehabilitasi. Kegiatan ini diikuti oleh 138 peserta (laki-laki = 109 orang; Perempuan = 29 orang).

Workshop pemandu wisata bahari. Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan kegiatan pariwisata, dilakukan *workshop* pemandu wisata bahari dan juga sertifikasi untuk pemandu selam dan pemandu snorkeling. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta. 17 orang mendapatkan sertifikasi pemandu selam dan 23 orang mendapatkan sertifikasi pemandu snorkeling

Workshop pengelolaan kawasan konservasi pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Kegiatan ini diikuti oleh 45 orang peserta yang juga mengikuti *assessment* sertifikasi kompetensi perencanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Dari hasil *assessment*, 21 orang mendapatkan sertifikasi level operator dan 19 orang mendapatkan sertifikasi level teknis.

Workshop pengolahan hasil perikanan dan cinderamata. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pengembangan usaha rumah tangga masyarakat lokasi proyek. *Workshop* ini diikuti oleh 25 peserta untuk pengolahan hasil perikanan dan 19 peserta untuk pembuatan cinderamata.

Gambar kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh paket 1.



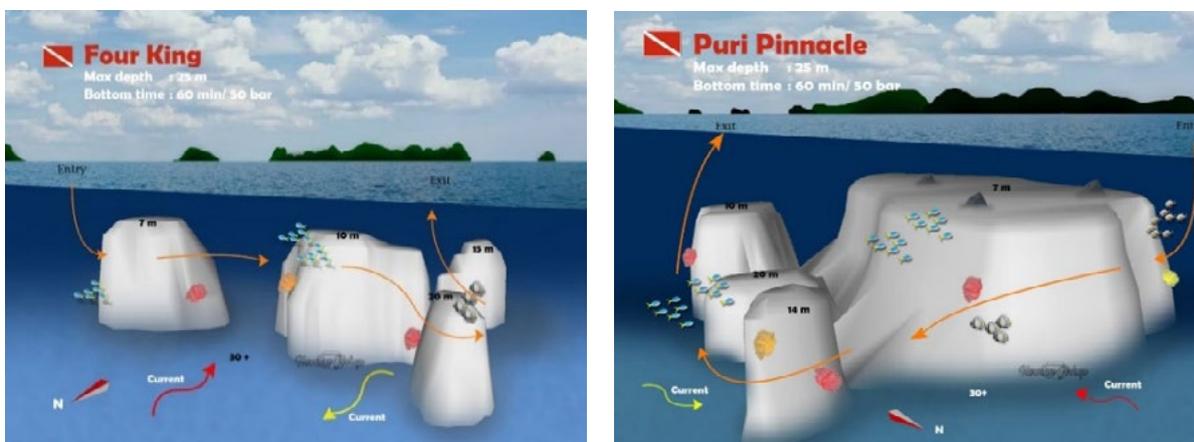
Proses asesmen sertifikasi kompetensi perencanaan pengelolaan kawasan konservasi dan pelatihan pengolahan hasil perikanan.



Proses sertifikasi pemandu wisata bahari.

1.3 Survey dan monitoring

Selain pembangunan infrastruktur dan juga peningkatan kapasitas, Paket 1- Yayasan Terangi juga melakukan survey dan monitoring ekosistem pesisir berbasis masyarakat untuk melihat kondisi ekosistem dan memetakan lokasi penyelaman untuk mendukung pengembangan wisata di dua lokasi yaitu di SAP Waigeo Sebelah Barat dan KKPD Misool. Survey ekosistem pesisir difokuskan pada ekosistem terumbu karang yang hasilnya dapat dijadikan sebagai data berkala untuk monitoring ekosistem oleh pengelola kawasan dan menjadi masukan dalam pengelolaan kawasan. Untuk pemetaan lokasi penyelaman, dihasilkan 10 peta profil penyelaman di dua lokasi tersebut yang dapat digunakan sebagai materi promosi dalam pengembangan wisata selam oleh masyarakat, pemerintah daerah ataupun swasta dan juga informasi yang dapat digunakan dalam pengarahannya sebelum penyelaman oleh para operator selam untuk meningkatkan *safety* dan pemahaman wisatawan.



Gambar profil peta penyelaman untuk pengembangan wisata selam

Paket Kegiatan 2:

Pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan oleh masyarakat di TNP Laut Sawu

YAPEKA



Pada periode tahun 2021, YAPEKA sebagai mitra pelaksana paket 2 sudah mengimplementasikan beberapa kegiatan antara lain pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas, dan pengembangan usaha. Capaian yang sudah dihasilkan antara lain:

2.1 Pembangunan infrastruktur



Gambar PLTS di Nusa Manuk, Rote Ndao yang dibangun untuk mendukung pengembangan usaha pengolahan sumber daya perikanan masyarakat.

PLTS terdiri dari 9 unit modul yang digunakan oleh rumah produksi dan juga membantu penyediaan listrik untuk Nusa Manuk yang belum memiliki aliran listrik.

2.2 Peningkatan kapasitas

Selain infrastruktur, YAPEKA juga melakukan kegiatan peningkatan kapasitas untuk pengelola kawasan, staf pemerintah daerah dan juga kelompok masyarakat. Kegiatan yang sudah dilakukan selama tahun 2021 adalah:

Pelatihan rehabilitasi ekosistem pesisir

Peningkatan kapasitas untuk rehabilitasi ekosistem juga sudah dilakukan oleh YAPEKA yang diikuti oleh 20 peserta pelatihan untuk rehabilitasi mangrove di Desa Holulai Kab. Rote Ndao dan 20 peserta pelatihan untuk rehabilitasi terumbu karang di pantai Oesina. Selain pelatihan rehabilitasi juga di buat *demonstration plot* (Demplot) terumbu karang di perairan pantai Oesina.

Pelatihan pengembangan ekowisata

Untuk mendukung pengembangan ekowisata di TNP Laut Sawu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan ketrampilan dalam kegiatan ekowisata. Untuk itu YAPEKA membuat satu modul pelatihan dan melakukan pelatihan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di dua lokasi yaitu Desa Napu dan Desa Palanggay, Kab Sumba Timur. Kegiatan ini diikuti oleh 24 peserta yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan pembuatan rencana kerja dari POKDARWIS Napu dan Palanggay.

Pelatihan pencegahan Bycatch

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan pemanfaatan perikanan berkelanjutan, YAPEKA mengadakan pelatihan penanganan *bycatch* untuk para nelayan di Desa Tablolong. Kelompok nelayan diperkenalkan dengan alat mitigasi *bycatch* berupa lampu LED yang disebut PISCES dan dilatih untuk pemasangan serta penggunaan alat PISCES pada alat tangkap jaring yang digunakan oleh nelayan agar tidak ada tangkapan sampingan seperti penyu dan hiu yang ikut terjaring. 34 orang nelayan mengikuti kegiatan ini dan kegiatan ujicoba pemasangan alat pada jaring untuk dimonitor efektivitasnya.

Pelatihan pengolahan hasil rumput laut dan perikanan

Sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan memberikan nilai tambah dan pada hasil rumput laut dan perikanan tangkap, sehingga memiliki nilai jual lebih. YAPEKA melakukan kegiatan pelatihan pengolahan rumput laut dan perikanan untuk masyarakat agar memiliki ketrampilan dalam mengolah hasil panen dan tangkapan. Selain itu juga diberikan bantuan peralatan pengolahan kepada kelompok masyarakat dampingan



Gambar pelatihan rehabilitasi ekosistem pesisir mangrove dan terumbu karang yang dilakukan sekaligus dengan praktik penanaman mangrove dan transplantasi karang pada lokasi demonstrasi (*Demonstration Plot*)



Gambar pelatihan rehabilitasi ekosistem pesisir mangrove dan terumbu karang yang dilakukan sekaligus dengan praktik penanaman mangrove dan transplantasi karang pada lokasi demonstrasi (*Demonstration Plot*)



Gambar pengenalan alat pencegahan *bycatch* PISCES dan pengoperasian alat yang sudah dipasang pada jaring nelayan.



Gambar bantuan peralatan pengolahan rumput laut dan perikanan serta pelaksanaan kegiatan pelatihan pengolahan rumput laut dan perikanan.

2.3 Penyusunan SOP dan Policy Brief

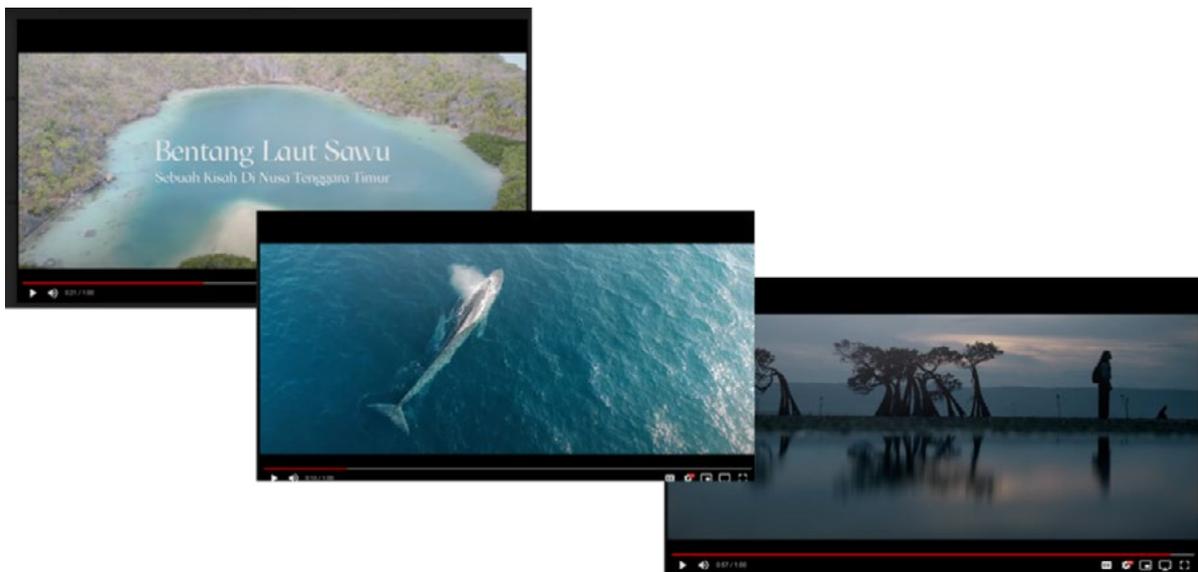
Pada tahun 2020 yang lalu, YAPEKA melakukan kajian investasi bisnis wisata yang kemudian pada tahun 2021 dikembangkan menjadi suatu *policy brief* pengembangan ekowisata di TNP Laut Sawu Nusa Tenggara Timur. *Policy brief* ini dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan



pemanfaatan TNP Laut Sawu yang sedang disusun oleh BKKPN Kupang. Untuk melengkapi kajian dan juga policy brief yang sudah disusun, YAPEKA bersama dengan pemangku kepentingan terkait termasuk mitra pelaksana COREMAP-CTI lainnya juga menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Pariwisata Alam.

2.4 Penyusunan materi publikasi dan promosi wisata

Sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan wisata berkelanjutan di TNP Laut Sawu NTT, YAPEKA membuat film promosi wisata yang nantinya dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mempromosikan wisata berkelanjutan yang ada di TNP Laut Sawu. Selain film juga dbuat materi publikasi cetak dalam bentuk *leaflet*, *factsheet* dan poster.



Paket Kegiatan 3:

Implementasi RAN/NPOA Jenis terancam

Yayasan Reef Check Indonesia



Paket 3 yang diimplementasikan oleh Yayasan Reef Check Indonesia (YRCI) sudah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian target dan indikator yang tercantum dalam *Result Framework* (RF) proyek. Target yang harus dicapai pada tahun 2021 ini adalah 6 kegiatan yang tercantum dalam RAN Hiu, Pari Manta dan Cetacean dapat diimplementasikan melalui kegiatan yang dilakukan oleh YRCI. Sampai dengan Desember 2021, YRCI telah mengimplementasikan 19 kegiatan yang ada dalam RAN Hiu, Pari Manta dan Cetacean, mencakup beberapa hal antara lain kajian populasi; pengembangan wisata; penyusunan panduan; sosialisasi; peningkatan kapasitas dan pengumpulan data. Dari 16 kegiatan tersebut untuk RAN Hiu Pari ada 5 kegiatan yang sudah terlaksana, sedangkan untuk RAN Pari Manta ada 6 kegiatan yang diimplementasikan dan untuk RAN Cetacean 8 kegiatan yang terlaksana.

3.1 Implementasi RAN Hiu dan Pari

- Melakukan penelitian keragaman jenis Ikan Hiu dan Pari
- Melakukan kajian stok dan lokasi penangkapan
- Melakukan kajian alat tangkap Ikan Hiu dan Pari
- Menyusun bahan publikasi dan sosialisasi
- Melakukan diseminasi bahan sosialisasi dan *public awareness*

Kajian keragaman jenis dan Kajian stok dan lokasi penangkapan difokuskan di wilayah Sorong dan Raja Ampat. Pendataan hasil tangkapan hiu dan pari di lokasi pendaratan perikanan di Sorong dilakukan secara berkala untuk mendapatkan data base jenis dan jumlah penangkapan. Data yang sudah terkumpul adalah bulan Mei sampai Desember 2021. Data ini akan digunakan sebagai bahan masukan dalam pengelolaan jenis terancam di kawasan konservasi



Gambar kegiatan pendaratan ikan dan pencatatan hasil tangkapan hiu dan pari

Uji coba penggunaan lampu LED pada alat tangkap nelayan sebagai mitigasi bycatch pari dan hiu dilakukan oleh YRCI di Desa Nangalili dan Desa Nuca Molas, sebagai bagian dari kajian alat tangkap yang ramah lingkungan sesuai dengan strategi yang ada dalam rencana aksi. Selain melakukan ujicoba efektifitas alat tangkap, YRCI juga menyusun Panduan dalam penggunaan lampu dan mitigasi *bycatch* untuk dapat digunakan oleh para pihak yang berkepentingan.



Gambar kegiatan ujicoba penggunaan lampu LED untuk mitigasi bycatch hiu dan pari

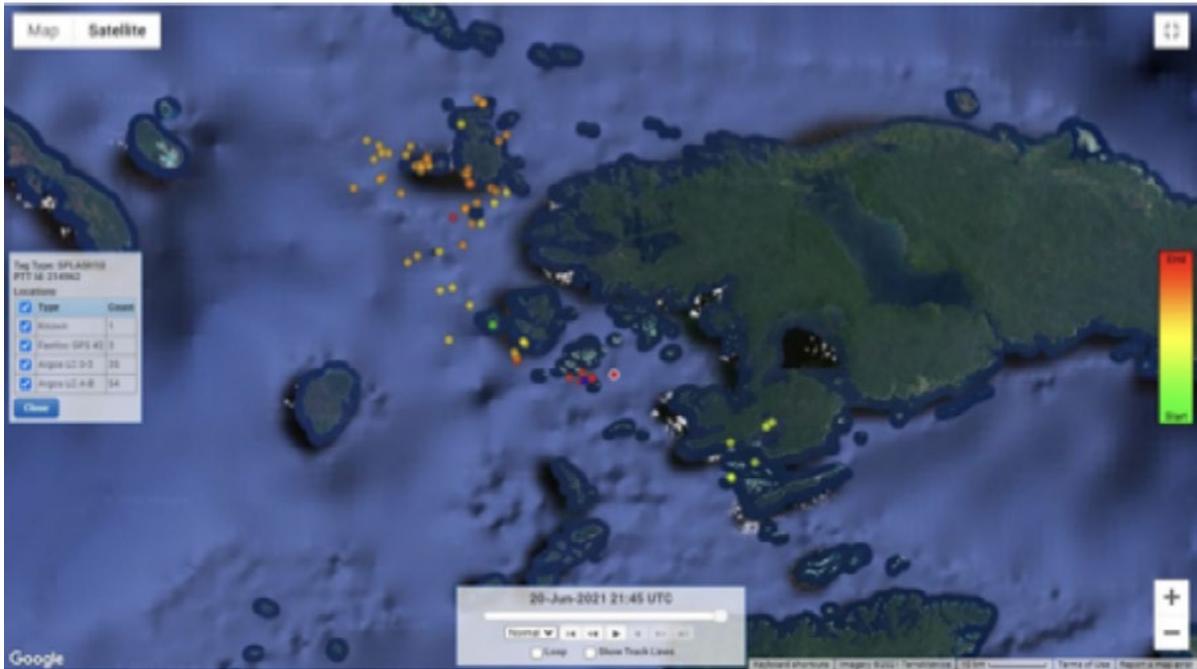
3.2 Implementasi RAN Pari Manta

- Melaksanakan survei *baseline* dan *monitoring* status populasi Pari Manta
- Melakukan penandaan dengan penandaan satelit
- Melakukan survei populasi dan pola kemunculan Pari Manta
- Melakukan sosialisasi regulasi perlindungan Pari Manta ke aparat penegak hukum, pedagang, dan masyarakat nelayan
- Membuat kajian pengembangan ekowisata Pari Manta
- Menyusun pedoman ekowisata Pari Manta

Salah satu kegiatan utama dalam RAN Pari Manta yang dilaksanakan oleh YRCI adalah penandaan (*tagging*) pari manta dengan penanda satelit (*satellite tag*) dan penanda akustik untuk melihat pergerakan dan penggunaan habitat dari pari manta di wilayah Raja Ampat. Selain itu juga dilakukan sensus populasi pari manta dengan menggunakan metode photo identifikasi (Photo ID).



Gambar kegiatan pemasangan penanda satelit pada pari manta dan pengambilan photo ID untuk sensus populasi pari manta



Gambar pergerakan pari manta dari hasil penandaan satelit di wilayah kawasan konservasi perairan

Dari hasil penanda satelit dapat terlihat bahwa pari manta bergerak disepanjang wilayah yang menjadi kawasan konservasi. Data pergerakan ini masih dalam proses pengumpulan dan analisa yang nantinya rekomendasi yang dihasilkan akan disusun menjadi *policy brief* sebagai masukan untuk pengelolaan kawasan dan jenis terancam dan dilindungi

Sedangkan dari data photo ID didapatkan 35 individu yang berhasil diidentifikasi dan dicocokkan dengan katalog pari manta yang ada di Raja Ampat. Dari hasil photo ID ini didapatkan 14 individu yang belum pernah terdata dan tidak ada dalam katalog pari manta Raja Ampat, sehingga kegiatan yang dilakukan YRCI ini berkontribusi kepada data base pari manta di Raja Ampat.



Gambar 3. Basis data pari manta karang per 31 Juli 2021. Pari manta karang dengan tanda * merupakan individu baru yang belum pernah teridentifikasi di basis data foto pari manta karang BLKB.

Gambar data base pari manta berdasarkan photo ID (Juli 2021). Terdapat individu baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya.

3.3 Implementasi RAN Cetacean

- Melaksanakan survei dan monitoring sebaran kemunculan, keterancaman, jalur migrasi dan habitat penting Cetacea
- Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas peneliti
- Melakukan kajian habitat penting, termasuk koridor Cetacea
- Melakukan pemetaan habitat penting, termasuk koridor migrasi Cetacea
- Meneliti konektivitas cetacean di kawasan konservasi mamalia laut
- Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan ekowisata Cetacea
- Membangun percontohan ekowisata Cetacea
- Melaksanakan bimbingan teknis penanganan mamalia laut terdampar bagi dokter hewan

Survey monitoring sebaran kemunculan, jalur migrasi dan habitat penting cetacea dilaksanakan pada November 2021 di wilayah perairan Kupang dan Sabu Raijua. Dalam survei ini juga dilakukan penandaan satelit untuk tiga paus yaitu 2 paus biru (*Blue whale*) dan 1 paus sperma (*Sperm*). Hasil dari pemantauan melalui satelit dapat terlihat bahwa paus biru yang berada di perairan laut sawu (warna biru dan warna hijau) bergerak kearah selatan hingga ke perairan Australia dan Samudera Hindia menunjukkan penggunaan ruang wilayah perairan antar negara. Untuk paus sperma (warna merah) terlihat masih berada di sekitar perairan Indonesia. Data-data ini dapat digunakan untuk pengelolaan kawasan dan jejaring antar kawasan konservasi terkait dengan konservasi mamalia laut (lumba-lumba dan paus). Penandaan menggunakan satelit untuk paus yang dilakukan YRCI merupakan yang pertama di Indonesia, sehingga hasil kajian ini akan sangat membantu dalam pengambilan kebijakan terkait mamalia laut.



Gambar survei sebaran kemunculan dan habitat penting mamalia laut



Gambar peta pergerakan satelit dari paus biru dan paus sperma yang ditandai di wilayah TNP Laut Sawu

Pengembangan pariwisata berbasis spesies juga dilakukan oleh COREMAP-CTI melalui YRCI. Untuk TNP Laut Sawu kegiatan wisata yang dikembangkan adalah *dolphin watching* atau pengamatan lumba-lumba dan juga wisata pari manta sedangkan di Raja Ampat difokuskan untuk wisata pari manta. Pengembangan wisata ini didahului dengan pelaksanaan kajian pengembangan wisata spesies berbasis masyarakat. Kemudian dilakukan pelatihan dan juga pendampingan kepada kelompok masyarakat yang akan mengimplementasikan wisata berbasis spesies ini. Selain itu juga pelatihan pembuatan produk lokal untuk mendukung wisata berbasis spesies seperti pembuatan sabun dari bahan minyak kelapa, buah mangrove dan rumput laut.

Paket Kegiatan 4:

Implementasi terhadap wilayah pengelolaan pesisir terpadu

PKSPL-IPB



4.1 Peningkatan kapasitas

Mitra pelaksana paket 4 – PKSPL IPB melakukan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir terpadu antara lain:

- Workshop implementasi platform ICZM di Provinsi Papua Barat
- Pelatihan Jasa ekosistem
- Kampanye Penysadartahuan
- Pelatihan SIG dan tata ruang pesisir (*coastal zone planning*)
- Pelatihan Aplikasi Sistem *monitoring* dan evaluasi RZWP3K
- Pelatihan ICZM untuk masyarakat

Pelatihan ICZM untuk masyarakat lokal dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Acara tersebut dihadiri oleh 35 peserta *offline* dari kampung yang ada di Raja Ampat yaitu kampung Yensawai, Arborek, Friwen, Yenbuba, Spokren, Saukabu, dan Saonek. Pelaksanaan kegiatan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pemangku kepentingan dalam pengelolaan pesisir terpadu. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman secara menyeluruh tentang dinamika sistem ekologi dan sistem sosial budaya serta pemasalahannya dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil skala lokal guna mendukung percepatan implementasi pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat dengan pendekatan pengelolaan secara terpadu/ICM.

Pelatihan Sistem Informasi Geographis (SIG) dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 dengan 47 peserta yang berasal dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Diharapkan peserta dapat mengelola data spasial perencanaan dan implementasi zonasi sesuai RZWP-3-K, mengenal teknologi SIG, membuat peta tematik, mengaplikasikan SIG dalam pengelelolaan spasiaal, mengolah berbagai jenis data menjadi data SIG/data spasial, menganalisis kesesuaian dengan zonasi dalam mendukung implementasi RZWP-3-K, dan menyajikan berbagai data dalam bentuk spasial yang siap pakai sesuai dengan tujuan pengguna sebagai masukan kepada pengambilan kebijakan dalam menyusun program pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu (ICM).



4.2 Rehabilitasi ekosistem pesisir

Berdasarkan hasil kajian penilaian kondisi ekosistem yang sudah dilakukan di tahun 2020, PKSPL kemudian menentukan lokasi rehabilitasi untuk ketiga ekosistem pesisir prioritas yaitu di kampung Yensawai. Dalam pelaksanaan rehabilitasi ini, PKSPL membentuk kelompok rehabilitasi untuk ketiga ekosistem. Rehabilitasi mangrove dilakukan dengan beberapa metode penanaman antara lain Teknik Penanaman Rumpun Berjarak; Teknik Penanaman Rumpun Berjarak Berpagar (Gigi Hiu) dan Teknik Penanaman Korbon Pancang. Luas lahan yang direhabilitasi untuk mangrove adalah 10.000 m² dengan 5000 bibit jenis mangrove *R. mucronata*, *R. apiculata*, dan *R. stylosa*.

Rehabilitasi Lamun dilakukan dengan penanaman sebanyak 1521 rumpun bibit dengan jenis yang ditanam adalah *Enhalus acoroides*, *Halodule uninervis*, *Cymodocea rotundata*, dan *Thalassia hemprichii*. Transplantasi lamun di lokasi ini menggunakan 4 teknik yaitu *sprig anchored*, *sprig unanchored*, *hessian bag*, dan *timbun sedimen*.



Paket Kegiatan 5:

Dukungan untuk kelompok masyarakat pengawas

(Pokmaswas) -
Yayasan Terangi



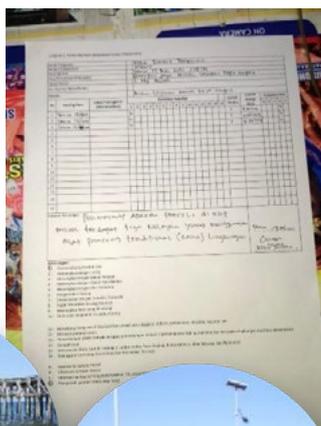
5.1 Peningkatan kapasitas

Sebagai bagian dari dukungan kepada Pokmaswas dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas untuk anggota Pokmaswas. Sebanyak 18 Pokmaswas mendapat pelatihan level 1 tentang dasar-dasar pengawasan, 20 Pokmaswas mendapat pelatihan level 2 tentang pengawasan lanjutan dan level 3 tentang pengawasan menggunakan teknologi aerial.



5.2 Dukungan operasional pengawasan

Dukungan operasional pengawasan diberikan kepada Pokmaswas untuk mendukung kegiatan pemantauan sumber daya. Skema pemberian dukungan operasional didiskusikan dan disepakati antara mitra pelaksana COREMAP-CTI dengan Pokmaswas dan Dinas Kelautan dan Perikanan agar tidak menimbulkan konflik di dalam kelompok. Dukungan diberikan sesuai pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan rencana kerja Pokmaswas yang sudah disusun. Kelompok diharuskan juga untuk menyertakan *log book* dan laporan kegiatan pemantauan. 20 Pokmaswas sudah mendapatkan dukungan operasional dan melakukan kegiatan pemantauan secara berkala minimal 1 kali dalam seminggu. Selain dukungan operasional, Pokmaswas juga mendapatkan alat pengawasan antara lain binokuler, pelampung, Kompas, radio dan HT.



Paket Kegiatan 6:

Akses wilayah pengelolaan sumber daya perikanan untuk masyarakat

PILI



6.1 Kelembagaan Masyarakat

Terkait dengan kelembagaan masyarakat adat, PILI memfasilitasi revitalisasi kelembagaan masyarakat adat di Rote Ndao dan membentuk kelembagaan masyarakat adat di Mutus Raja Ampat. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengakuan dan perlindungan akses masyarakat adat melalui penguatan kelembagaan adat di tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Mekanisme kerja untuk POKJA KMHA di Rote Ndao dan Mutus Raja Ampat sudah disusun dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan POKJA.



6.2 Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan

PILI melakukan serangkaian diskusi untuk penyusunan dan finalisasi RBSFM baik di lokasi Raja Ampat dan Laut Sawu. Kegiatan ini melibatkan BKKPN Kupang, Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao, Kantor Diskoperindag Kab. Rote Ndao, Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Kepala Desa Sotimori, serta pemangku kepentingan lainnya untuk RBSFM di Laut Sawu. Sedangkan untuk penyusunan dan finalisasi RBSFM di Mutus Raja Ampat melibatkan BKKPN Kupang Satker Raja Ampat, Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat, Dinas PMK Kabupaten Raja Ampat, PSDKP Tual Wilker Raja Ampat, serta kampung-kampung di wilayah SAP Kepulauan Raja Ampat. Dari hasil pertemuan tersebut terdapat rencana penyusunan peraturan kampung terkait pengelolaan perikanan dengan Kampung Mutus sebagai model. Untuk itu perlu ada diskusi lebih lanjut mengenai rencana penyusunan perkam ini bersama Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Mutus untuk merumuskan draft peraturan kampung.

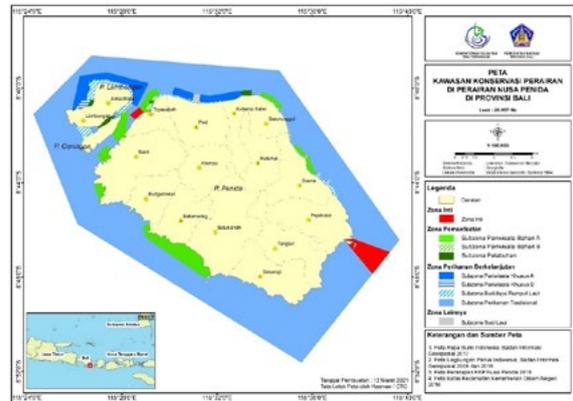
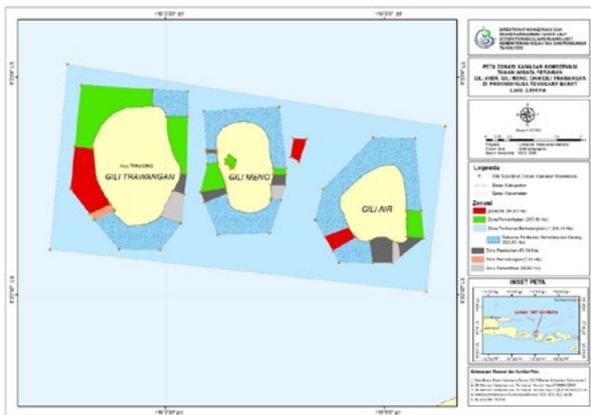
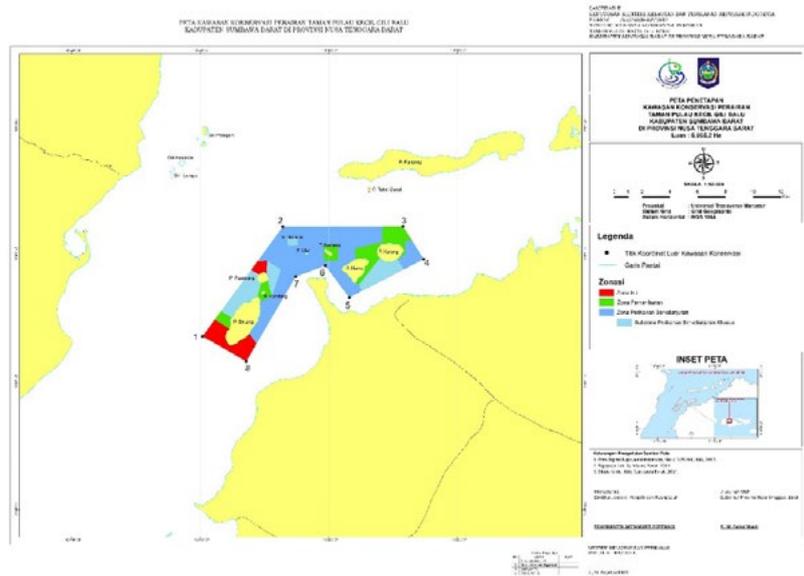






COREMAP-CTI ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)

Peta Lokasi
Kegiatan
COREMAP-CTI
ADB



Output 1

Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang

COREMAP-CTI ADB, selama 2021, telah melakukan usaha percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian terkait penguatan kelembagaan. Mitra pelaksana pada Desember 2021, melaporkan perkembangan terkait target capaian yang berkontribusi pada *output* proyek, antara lain:



Panduan Pengelolaan Kawasan Konservasi



Imbal Jasa Pengelolaan Ekosistem



Pembangunan Pondok Informasi Wisata



Peningkatan Kapasitas



Program Pasca Sarjana

Perkembangan dari target-target tersebut telah dilaporkan oleh mitra pelaksana di tiga kawasan implementasi proyek yaitu, Nusa Penida, Gili Matra dan Gili Balu. Penjelasan terkait perkembangan di masing-masing wilayah intervensi proyek disampaikan pada pembahasan sebagai berikut:



1.1 Panduan Pengelolaan dan Wisata Kawasan Konservasi

1.1 Panduan Pengelolaan dan Wisata Kawasan Konservasi

Penyusunan SOP pengelolaan kawasan konservasi diimplementasikan di Nusa Penida, Gili Matra dan Gili Balu. Untuk wilayah Gili Matra, penyusunan SOP diawali dengan pertemuan koordinasi pada Agustus 2021 untuk mengidentifikasi SOP Prioritas pengelolaan Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan BKKPN Kupang, Site Coordinator ICCTF dan Tenaga Ahli bidang SOP yang menghasilkan kesepakatan terkait SOP prioritas yaitu SOP Rehabilitasi dan Restorasi Terumbu Karang dan SOP Pengelolaan Wisata Selam. Kegiatan penyusunan SOP ini merupakan bagian dari kegiatan Paket Kegiatan 2.

Selanjutnya, mitra pelaksana Paket Kegiatan 2 memfasilitasi kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk SOP Prioritas yang telah ditentukan. Kegiatan ini diikuti oleh Bappenas dan BKKPN untuk memberikan pengarahannya dalam penyusunan SOP. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Dinas Perhubungan, UPP II Pamenang, Pokdarwis, dan Pokmaswas. Proses selanjutnya adalah penulisan draf SOP Prioritas. Kegiatan tersebut mulai dilakukan pada November 2021 dengan melibatkan Bappenas ICCTF, BKKPN Kupang, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara (KLU), Bappeda KLU, Pokmaswas, dan Pokdarwis. Kegiatan dimulai dengan pemaparan draf SOP yang kemudian disepakati hal-hal penting yang akan menjadi substansi SOP diantaranya mekanisme



Pelaksanaan FGD untuk membahas SOP Prioritas

penentuan lokasi rehabilitasi, metode rehabilitasi, sumber bibit dan jenis karang yang dianjurkan berdasarkan perundangan yang berlaku.

Sedangkan di kawasan TWP Gili Balu, mitra pelaksana paket Kegiatan 3 telah mengidentifikasi tiga SOP Prioritas yaitu SOP Pengawasan, SOP Perizinan dan SOP Penguatan Kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen Kawasan Konservasi Gili Balu. SOP yang disusun nantinya akan memberikan panduan tentang aspek-aspek untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan TWP Gili Balu. Identifikasi dan pembahasan perencanaan penyusunan SOP prioritas dimulai pada September 2021, dengan melibatkan Organisasi Pengelola Daerah diantaranya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, satker PSDKP Wilayah Kerja (wilker) NTB, Syahbandar, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (CDK) Sumbawa-Sumbawa Barat, BKKPN Kupang, Universitas mataram, Universitas 45, Universitas Gunung Rinjani, dan Wildlife Conservation Society (WCS). Pada Desember 2021, mitra pelaksana Paket Kegiatan 3 telah melaporkan penyusunan draf 3 SOP dengan ringkasan substansi sebagai berikut:



SOP Pengawasan

Pada SOP Pengawasan terdapat 7 kegiatan utama yaitu:

- Penyampaian rencana kegiatan pengawasan,
- Mekanisme review rencana kegiatan pengawasan,
- Pencairan dana kegiatan pengawasan dan pengajuan surat permohonan personil (PPNS, Polsus WP3K, TNI AL, POLAIR, dan pihak terkait lainnya,
- Pencatatan temuan,
- Penyusunan laporan hasil kegiatan Pengawasan, dan
- Pengarsipan

Untuk wilayah Nusa Penida, mitra pelaksana Paket Kegiatan 1 juga telah mengidentifikasi SOP prioritas yaitu SOP Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi dan SOP Penataan Kawasan



Konsultasi SOP pengelolaan dengan Dit KKHL KKP Nusa Penida

Konservasi yang meliputi penyadartahuan masyarakat di Kawasan Konservasi yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan MPA dan implementasi ETP NPOA di Nusa Penida.



SOP Perizinan

SOP Penerbitan Karcis Masuk Untuk Kegiatan Pariwisata Alam Perairan Di Kawasan Konservasi. SOP Penerbitan Karcis Masuk menghendaki terlaksananya beberapa kegiatan yaitu:

- Permohonan Karcis Masuk kepada kepala CDK melalui Petugas CDK,
- Pemeriksaan, dan
- Pengisian Formulir dan Pembayaran



SOP Penguatan Kelembagaan

- SOP Penguatan Kelembagaan Aktif

SOP ini mengatur pelaksanaan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dengan tahapan dan proses yang dijelaskan

- SOP Penguatan Kelembagaan Pasif

SOP ini mengatur pelaksanaan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dengan tahapan dan proses yang dijelaskan.

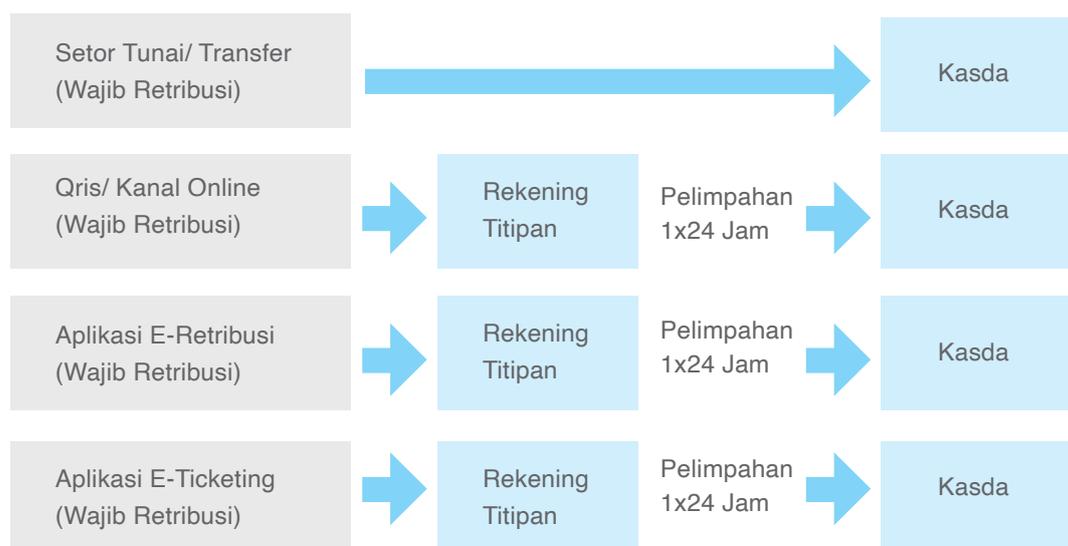


1.2 Imbal Jasa Lingkungan

Penguatan kelembagaan untuk pengelolaan kawasan konservasi, juga meliputi penyusunan Naskah Akademik *Payment Ecosystem Service (PES)* atau imbal jasa lingkungan yang diharapkan dapat mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Nusa Penida, Gili Matra dan Gili Balu. Pertemuan Koordinasi dalam menyusun kajian konsep PES untuk mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida yang merupakan bagian dari Paket Kegiatan 1 ini dilaksanakan pada November 2021 secara *online* dan *offline* dengan melibatkan UPTD Nusa Penida, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Tenaga Ahli. Kegiatan ini ditujukan untuk membahas mekanisme Pemungutan Retribusi Jasa Usaha di kawasan konservasi perairan Bali dimana pungutan retribusi tersebut digunakan untuk mengatur pengelolaan, penataan dan juga menjaga kawasan konservasi perairan yang dimanfaatkan.

Pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi pengelolaan mekanisme imbal jasa lingkungan yaitu:

1. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Bali yang efektif dan efisien maka diperlukan kerjasama dan koordinasi antar instansi dan *stakeholder* terkait secara berkelanjutan;
2. Pemungutan retribusi jasa usaha di KKP Bali diharapkan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta kelestarian lingkungan di sekitar kawasan konservasi melalui mekanisme digital;
3. Mekanisme penyetoran retribusi di daerah disampaikan secara ringkas seperti pada bagan berikut:



4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali/ UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali diharapkan dapat secara intensif terlibat dalam penyusunan SOP Mekanisme Pemungutan Retribusi Jasa Usaha di Kawasan Konservasi;
5. Perlu upaya integrasi Retribusi Jasa Usaha di KKP dengan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Klungkung dan manajemen pariwisata Nusa Penida dalam satu sistem aplikasi Portal Bali;
6. Langkah awal yang harus dilaksanakan setelah diadakannya FGD adalah sosialisasi PERDA Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PERDA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha kepada *stakeholder* terkait yang memanfaatkan kawasan konservasi perairan;
7. Pembahasan hal teknis dan permasalahan yang dihadapi akan dilaksanakan melalui pertemuan lanjutan sesuai dengan kebutuhan.



Kegiatan FGD membahas mekanisme pemungutan Retribusi Kawasan Konservasi Nusa Penida

Sedangkan untuk Paket Kegiatan 2 di Kawasan Konservasi Gili Matra, pertemuan koordinasi kajian konsep PES untuk mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional TWP Gili Matra dilaksanakan pada Agustus 2021. Hasil dari kegiatan ini adalah konsep PES khususnya aspek, komponen dan mekanisme dengan kesimpulan dan usulan diantaranya:

- Dinas Pariwisata diharapkan dilibatkan dalam menyusun konsep dokumen PES
- Semua stakeholder mendukung dan mengapresiasi kegiatan penyusunan dan pengembangan skema PES beserta pengelolaannya
- Dibutuhkan pembinaan kelembagaan dari pelaku wisata khususnya snorkling untuk menjamin agar wisatawan nyaman dan berwisata sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di zona TWP Gili Matra
- Masing-masing Pemda dan BKKPN telah memiliki satu pemahaman terkait dengan zonasi pengelolaan dalam hal PES.
- Konsep PES kedepannya perlu mengakomodir retribusi yang berbeda untuk setiap kegiatan pariwisata yg berbeda.
- Pihak Pemda berharap adanya pengembalian item pajak kegiatan diving yang ditarik oleh pemerintah pusat dan dikembalikan lagi ke item pajak hiburan sebagai sumber PAD Kabupaten Lombok Utara.

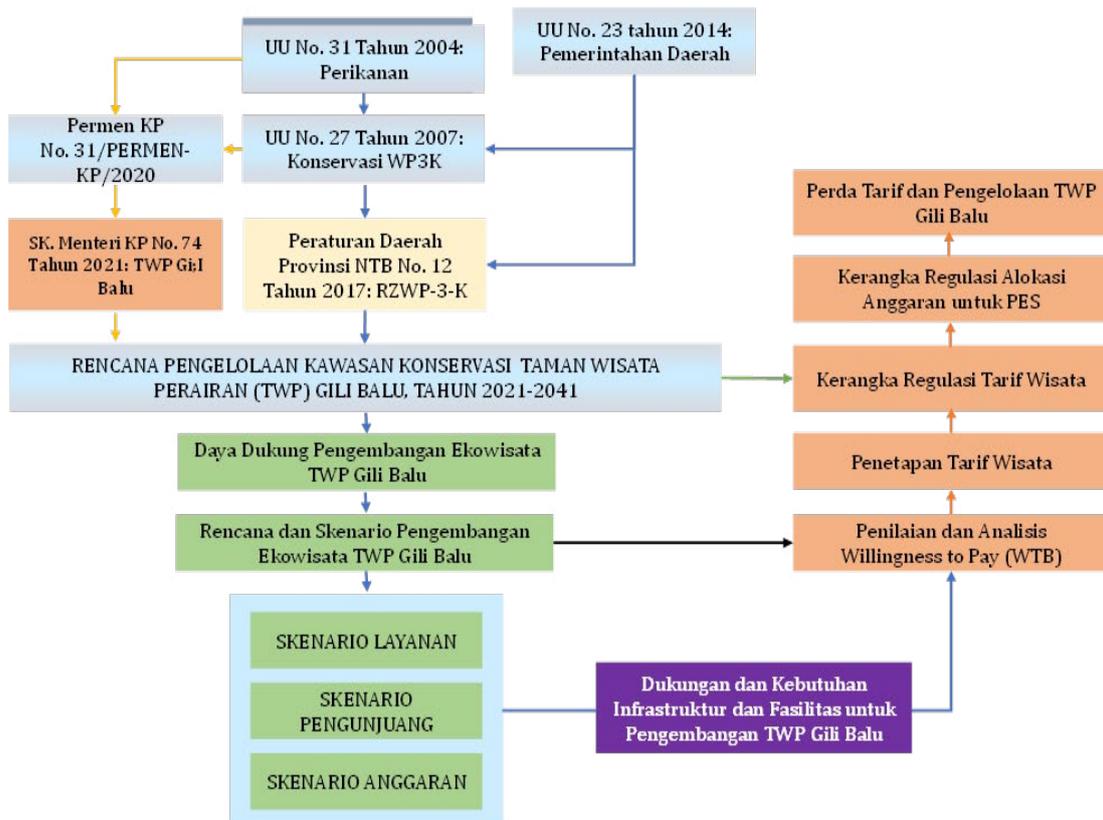
Selanjutnya dilakukan FGD dengan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan TWP Gili Matra pada tanggal September 2021 yang menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya:

- Peserta diskusi memahami bahwa konsep PES adalah suatu skema untuk menyediakan insentif baik dalam bentuk uang atau bukan uang bagi pengelola lahan untuk mengelola dan melindungi lingkungan guna mempertahankan fungsi ekosistem.
- Adanya rencana pengenaan retribusi (biaya) untuk pengusaha rental perahu (*boat*) dan akan melibatkan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)
- Adanya rencana penarikan dana satu pintu sesuai dengan aturan dan kebijakan sebagaimana hasil kajian PES

Selain Nusa Penida dan Gili Matra, COREMAP-CTI ADB juga menghitung “kerelaan membayar” (*Willingness to Pay/WTP*) untuk mendukung mekansime imbal jasa lingkungan di Kawasan Gili Balu yang mencakup beberapa komponen yaitu:

1. Identifikasi dan rencana penilaian pengembangan
2. Pelaksanaan penilaian WTP
3. Penyelesaian laporan penilaian WTP

Penyusunan Kerangka Kerja dan Regulasi PES Pengelolaan Kawasan Konservasi TWP Gili Balu disusun melalui persyaratan dan proses dengan payung hukum yang jelas seperti skema berikut:



Gambar. Skema *Payment for Environmental Services (PES)* Pengelolaan Kawasan Konservasi TWP Gili Balu



1.3 Pondok Informasi Ekowisata

Proyek COREMAP-CTI ADB mendukung pembangunan infrastruktur untuk penguatan pengelolaan ekosistem terumbu karang, yaitu pembangunan Pondok Informasi yang dibangun di Kawasan Konservasi Nusa Penida, Gili Matra dan Gili Balu. Pada Desember 2021, seluruh mitra pelaksana COREMAP CTI-ADB telah menyelesaikan penyusunan DED setelah menerima *review* teknis terkait desain pondok informasi.

Terkait dengan hal tersebut, mitra pelaksana kegiatan di kawasan Nusa Penida melakukan serangkaian kegiatan terkait *soil test* dan diskusi desain bangunan bersama UPT KKP Nusa Penida. Kemudian sebagai konsep, desain pondok informasi akan berbentuk bangunan berlantai dua dimana bagian bawah terbuka dengan sisi samping timur ber dinding sebagaiantisipasi hujan angin timur. Sedangkan untuk

penggunaan ruangan, pada lantai atas terdapat ruang server dan ruang rapat internal tertutup. Area Pondok Informasi relatif kecil yaitu berukuran 4x5 meter, berada dalam lingkungan kantor UPT KKP Nusa Penida dengan status lahan meminjam asset Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sedangkan untuk pengelolaan, Pondok Informasi akan dikelola oleh UPT Provinsi.

Untuk wilayah Gili Matra, pembangunan Pondok Informasi akan dilengkapi dengan Papan Informasi, *Boundary Signage*, dan *Sign Flag* Instansi Terkait. Lokasi dan lahan yang akan digunakan awalnya direncanakan berlokasi di Pelabuhan Bangsal namun berdasarkan diskusi lanjutan terkait penggunaan lahan, diputuskan bahwa lokasi infrastruktur berada di Terminal Pelabuhan Teluk Nare. Pondok Informasi ini nantinya akan terintegrasi dengan *Visitor Management System (VMS)*.





Keterangan: Hasil DED untuk Pondok Ekowisata sebagai syarat pembangunan infrastruktur Proyek COREMAP-CTI

Sedangkan untuk kawasan Gili Balu, Infrastruktur Pusat Informasi Ekowisata Gili Balu merupakan bangunan yang nantinya akan digunakan sebagai sarana dan prasarana pusat informasi kepariwisataan di Gili Balu. Infrastruktur Pusat Informasi Ekowisata memiliki ukuran bangunan sebesar 11 x 7.5 meter dimana memiliki bentuk panggung mengikuti bentuk umum bangunan tradisional di Desa Poto Tano.

Lokasi pembangunan Infrastruktur Pusat Informasi Ekowisata telah mendapat surat persetujuan lahan dari Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dimana bangunan tersebut akan dibangun berdekatan dengan lokasi dermaga kapal cepat penyebrangan Tano-Kayangan. Sebagai penerima dari infrastruktur Pusat Informasi Ekowisata, Bupati KSB nantinya akan meneruskan ke Dinas terkait untuk penggunaan bangunan tersebut.



1.4 Peningkatan Kapasitas



Peningkatan kapasitas yang didukung oleh COREMAP-CTI ADB ditujukan baik untuk staf pemerintah, pemangku kepentingan maupun kelompok masyarakat. Kegiatan ini juga cakupan dari Paket Kegiatan 1, 2 dan 3 dengan lokasi seperti yang telah disebutkan pada sub topik sebelumnya. Untuk mendukung kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi, peningkatan kapasitas juga diberikan kepada anggota Pokmaswas. Di kawasan Nusa Penida, mitra pelaksana telah mengidentifikasi dan memfasilitas pelatihan pada 2 Pokmaswas yaitu:

- Pokmaswas Baruna Jaya (Desa Suana)
- Pokmaswas Gili Buana (Desa Lembongan)

Pelatihan terhadap kedua Kelompok Pokmaswas ini diberikan kepada 43 anggota dan mendapat pendampingan dari UPT KKP

Nusa Penida, ICCTF, UPT KKP Bali. Adapun materi yang dibekali yaitu:

1. Dasar hukum pemanfaatan Sumber Daya Perairan
2. Jenis, tujuan KKP dan Aturan di dalam Zonasi
3. Strategi dan implementasi konservasi
4. Definisi dan struktur organisasi Pokmaswas
5. Kontribusi dan peran Pokmaswas
6. Mekanisme operasional dan pengumpulan data (penjelasan SMS gateway)
7. Cara mengidentifikasi dan menentukan masalah prioritas (metode USG)
8. Pedoman pengetahuan, pelatihan, praktek lapangan tentang peran, kewajiban dan kegiatan yang dilakukan oleh Pokmaswas.

Tidak hanya sebatas pemberian materi, praktik juga dilakukan melalui patroli keliling pulau untuk mengetahui kondisi/ aktivitas yang ditemukan di zonasi kawasan konservasi perairan, dan juga tindakan yang harus dan tidak harus dilakukan di lapangan (menjaga jarak jika melihat kecurigaan/ resiko yang akan terjadi). Selain itu, anggota Pokmaswas juga berlatih melakukan penginputan dan penyajian data hasil pengawasan.



Data-data tersebut dapat dijadikan informasi untuk Dinas atau pihak-pihak terkait. Sedangkan di wilayah Gili Balu, terdapat 4 Pokmaswas dan 1 Forum Pokmaswas yang teridentifikasi yaitu Bualawa, Liang Kuru, Pasir Putih, Tanjung Parapat, dan Bangka Bela. Namun, hanya dua Pokmaswas yang telah mendapatkan SK dari Pemerintah Provinsi NTB. Semenjak terbentuknya, Pokmaswas kerap mendapat pelatihan maupun pendampingan dari organisasi non-pemerintah dan pemerintah melalui DKP Provinsi. COREMAP-CTI ADB akan mendukung peningkatan kapasitas bagi anggota Pokmaswas setelah proses indentifikasi anggota Pokmaswas selesai dilakukan pada kuartal I 2022.

Nantinya Pokmaswas juga akan mendapatkan bantuan perahu patroli sebanyak dua unit lengkap dengan peralatannya. Perundingan dengan Pokmaswas telah dilakukan beberapa kali untuk membahas Pokmaswas yang layak menerima bantuan perahu patroli tersebut, Ukuran perahu patroli, Sistem pengelolaan penggunaan perahu patroli dan Pangadaan biaya operasional pasca COREMAP-CTI.

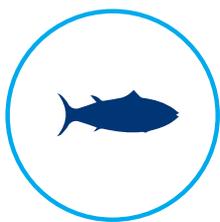


1.5 Program Pasca Sarjana

Program Master Degree COREMAP-CTI dimulai pada bulan Februari 2021 dibawah kolaborasi antara Bappenas, ICCTF, University of Queensland, Australia ditandai dengan Perjanjian Kerjasama antara Bappenas ICCTF dengan IPB. Saat ini, empat orang mahasiswa sesuai quota kegiatan tengah melakukan kegiatan perkuliahan secara *online* (daring) dan memasuki kuliah untuk dua semester dan summer semester. Keempat mahasiswa merupakan hasil seleksi yang berlangsung sejak tahun 2020 hingga pertengahan Juni 2021. Awalnya terdapat dua calon mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan

karena kualifikasi nilai kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL/IELTS) yang tidak memenuhi persyaratan dan terbatasnya minat calon mahasiswa dari pemerintah daerah dan juga Perguruan Tinggi di daerah lokasi Program COREMAP-CTI. Memasuki tahun 2021, Bappenas ICCTF memberikan kesempatan kepada calon di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian terkait lainnya, hingga akhirnya pada bulan Juni 2021, seluruh mahasiswa terpilih untuk mengikuti Program *Master Degree* COREMAP-CTI. Adapun keempat mahasiswa tersebut adalah:

Nama	Jenis kelamin	Lembaga
Urai Ridho Abdussyahid MFB	Laki-laki	KKP
Ratu Fathia Rahmadyani	Perempuan	Bappenas ICCTF
Zakiyah Chairunnisa	Perempuan	Bappenas ICCTF
Amrullah Rosadi	Laki-laki	PPNS KKP



1.6 Pelatihan Tuna

Jumlah perikanan tangkap Indonesia setiap tahunnya cukup tinggi, rata-rata diatas 5 juta ton per tahun sampai dengan 8,55 juta ton pertahun. Namun volume ekspor masih sangat rendah setiap tahunnya hanya sekitar 1 juta ton/ tahun dengan nilai ekspor 3,7 miliar USD hingga 5,2 miliar USD. Hal ini menunjukkan Perikanan Indonesia belum bisa menguasai perdagangan ikan dunia, dan sebab utamanya adalah syarat dan permintaan atas jaminan mutu perikanan Indonesia masih rendah. Beberapa permasalahan dalam Perikanan Tuna di Indonesia:

1. Tuna *longline* merupakan salah satu produk unggulan perikanan Indonesia. Namun, pengelolaan & pemanfaatannya belum optimal untuk dapat meningkatkan nilai jualnya
2. Perlu diperkuat Pengelolaan Sumber Daya Perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Kementerian KP beberapa tahun belakangan ini telah menghasilkan peraturan baru dalam rangka memperkuat Perikanan Berkelanjutan, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi.
3. Harga yang diterima nelayan *longline* ditentukan dari pengelolaan perikanan tuna di wilayah operasi dan tingkat kepatuhan

semua bagian dalam rantai pasok terhadap peraturan IOTC & CCSBT meningkat demi tercapainya MSC certification

4. Untuk memperkuat strategi pemasaran dan pengelolaan perikanan tuna *longline* secara efektif dan berkelanjutan, maka perlu diselenggarakan *Short Course*.

Tujuan pelaksanaan *Short Course* ini adalah Meningkatkan kapasitas *stakeholders* terkait pengelolaan perikanan tuna *longline* untuk memenuhi standar sertifikasi produk yang meliputi praktik terbaik, model analisis, pengembangan dan simulasi untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2020-2024 terkait pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut.

Pelatihan diikuti oleh sebanyak 34 orang. Peserta berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Akademisi, NGO dan Kelompok Nelayan Lokal. Didukung oleh 10 orang Narasumber dari berbagai kalangan sehingga *Short Course* ini bernilai tinggi. Pada akhir *Short Course*, hasil *pre-test* dan *post test* menunjukkan peserta meningkat pemahamannya sekitar 85%.

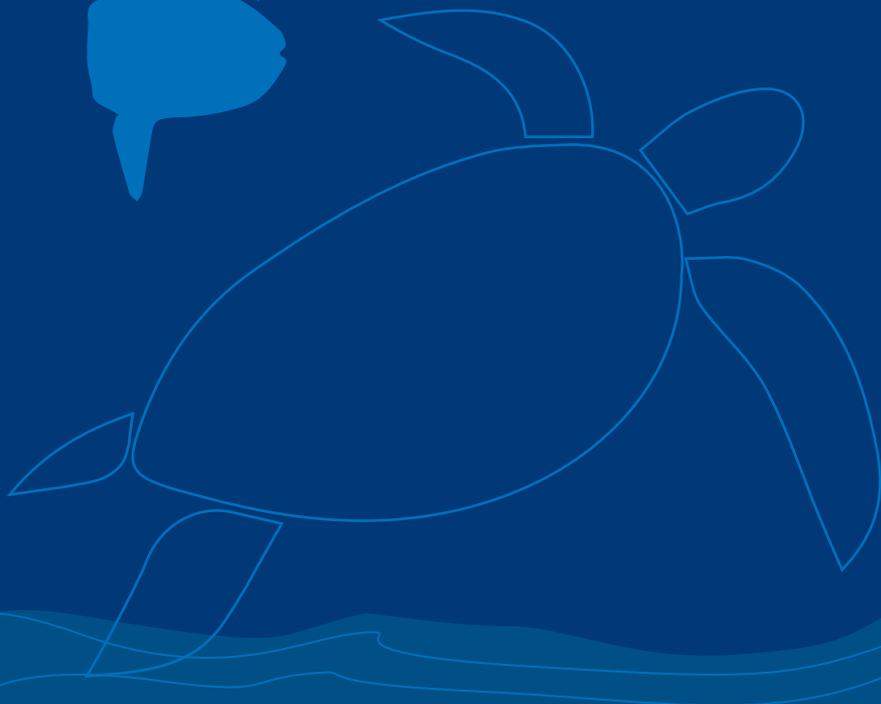


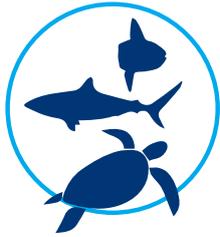
Keterangan: Penyampaian materi oleh narasumber dalam Pelatihan Tatakelola Perikanan Tuna di Indonesia

Output 2

Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekosistem

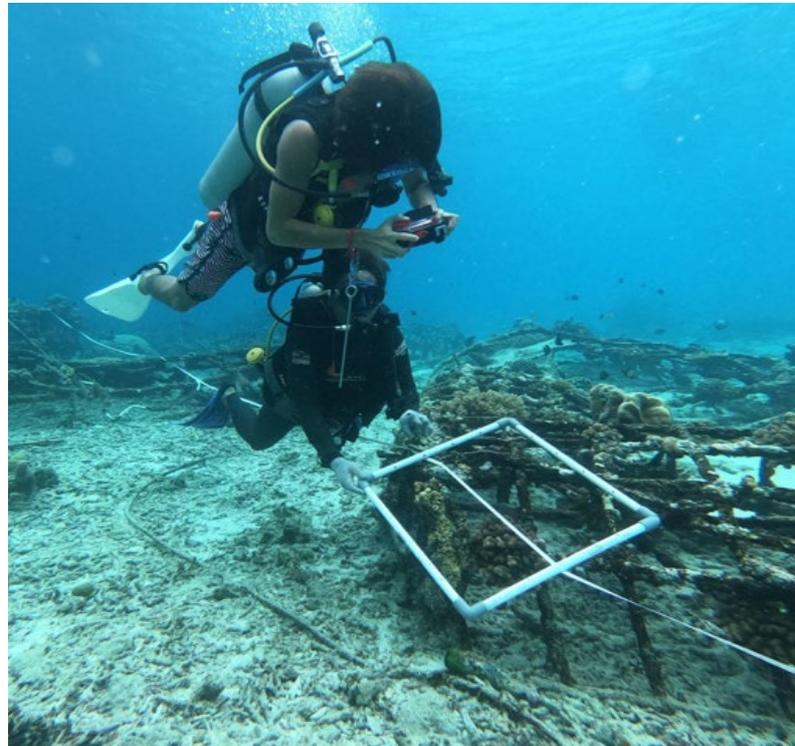
Output kedua dari proyek COREMAP-CTI ADB berkaitan dengan pengembangan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis ekosistem. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan ini meliputi konservasi terumbu karang dan mangrove. Dalam kaitannya dengan perikanan, COREMAP-CTI ADP juga mendukung kajian terkait dengan satwa laut yang dilindungi.





2.1 Kajian Mola-mola, Dinamika Populasi Hiu dan Penyu

Salah satu ikonik Nusa Penida, selain Pari Manta dan Terumbu Karang adalah keberadaan ikan Mola-mola yang menjadi daya tarik tersendiri. Untuk melindungi ikan Mola-mola, mitra pelaksana Paket Kegiatan 1 di wilayah Nusa Penida melakukan kajian naskah akademik daya dukung untuk melindungi Ikan Mola-mola. Periode kemunculan ikan Mola-mola adalah antara Bulan Agustus-Oktober, terkadang juga muncul di bulan lain (frekuensi terlihat sedikit). Oleh karena itu, kajian ini sangat perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian ikan tersebut. Kegiatan ini didasarkan dengan beberapa survei yang sudah dilakukan oleh operator wisata di Nusa Penida. Konsultasi publik juga telah dilaksanakan pada Oktober 2021 melibatkan pelaku industri pariwisata (selam dan snorkling), UPT KKP Nusa Penida, dan Pihak terkait. Terkait dengan persiapan kajian, telah teridentifikasi titik kemunculan Mola-mola, selain di crystal bay (spot inti untuk Mola-mola). Kajian ini nantinya juga akan mencakup penerapan/ pembaharuan kode etik



Keterangan: Kegiatan Survei bawah laut untuk identifikasi area rehabilitasi ekosistem terumbu karang

interaksi dengan ikan Mola-mola. Kajian naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi dasar pembuatan kebijakan untuk melindungi Mola-mola berkelanjutan.

Sedangkan untuk kajian di wilayah Gili Matra, salah satu sumber daya yang dimiliki Gili Matra selain keberadaan ekosistem terumbu karang terdapat biodiversitas fauna kharismatik yang dilindungi, yaitu hiu dan penyu. Keberadaan fauna inilah yang menjadikan Gili Matra menjadi area prioritas untuk program konservasi sekaligus

objek wisata. Estimasi populasi penyu selama 3 tahun survei, diperoleh sekitar 140 green (*Chelonia mydas*) dan 60 hawksbill (*Eretmochelys imbricate*) dan beberapa ekor Olive ridley (*Lepidochelys olivacea*) turtle (Saputra, R. A. 2020). Species penyu tersebut tergolong dalam species dalam status decreasing (IUCN, 2004). Kajian ini diperlukan untuk mengetahui status terbaru sebagai bahan laporan peningkatan dua spesies *National Plan of Action*

(NPOA). Selain itu juga, keterbatasan data pendukung, baik itu yang bersumber dari monitoring stakeholder terkait dan dari referensi ilmiah juga menjadi masalah. Hal ini penting untuk memonitor status dan dinamika populasi penyu. Kegiatan di wilayah Gili Matra ini merupakan bagian dari Paket Kegiatan 2.

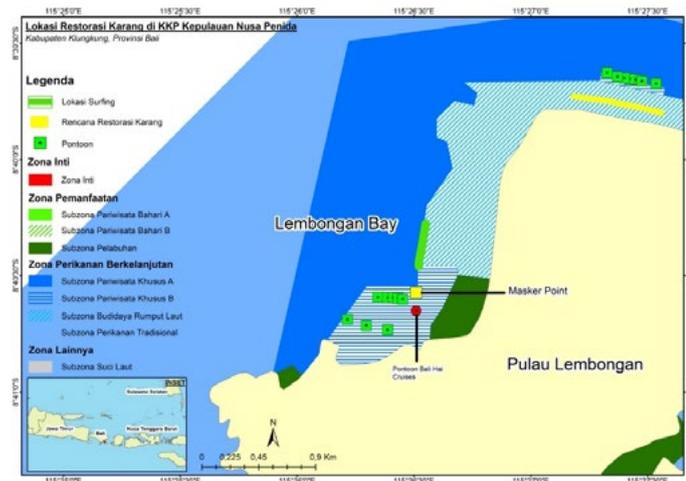
Sedangkan untuk hiu, berdasarkan survey bawah air, ditemukan hanya pada dua stasiun yaitu pada stasiun pengamatan *Shark Point* dengan jumlah enam ekor hiu dan pada stasiun pengamatan *Sunsite Point*. Jenis hiu yang ditemukan pada *Shark Point* adalah White Tip Shark dengan nama latin *Triaenodon obesus*. Pada kedalaman 17 Meter, jenis ini ditemukan sebanyak empat ekor dan mendiami sebuah *cave*. Hal ini dimungkinkan sebagai salah satu cara bagi sekelompok bayi hiu tersebut untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Adapun aktivitas yang dilakukan oleh kelompok bayi hiu tersebut adalah berdiam diri. Hal tersebut terus dilakukan bahkan sampai waktu pengamatan bagi penyelam telah habis. Hiu tersebut diasumsikan cenderung nocturnal dan bergerak aktif pada malam hari untuk mencari makan. Demikian juga yang disampaikan oleh para penyelam dan *guide diver* di beberapa *dive shop* dimana mereka sering menemukan hiu yang masih bayi dan masih kecil dengan ukuran 45-75 cm aktif bergerak pada malam hari dan memangsa ikan-ikan kecil yang tengah tidur di sekitar terumbu karang.



2.2 Kajian dan Konservasi Terumbu Karang dan Mangrove

Terkait dengan konservasi, mitra pelaksana COREMAP-CTI ADB juga melakukan kajian dan kegiatan untuk mendukung konservasi. Mitra pelaksana Paket Kegiatan 4 di wilayah Nusa Penida telah mengidentifikasi 13 titik lokasi konservasi, dimana genus dan spesies terbanyak ditemukan di wilayah Lembongan. Berdasarkan survey, terdapat 3 titik yang akan direstorasi yaitu di wilayah Suana, Ped dan Lembongan. Terdapat teknik-teknik yang akan digunakan dalam konservasi yaitu *fishdome* yang akan menjadi rumah karang(di Suana), *reefstar* akan digunakan di wilayah Ped, dan bentuk *masker* dan *snorkle* akan diterapkan di wilayah Lembongan. Luasan restorasi terumbu karang adalah sebanyak 5% dari luasan terumbu karang. Partisipan yang akan terlibat dalam kegiatan konservasi yaitu, kelompok Nuansa Pulau (kebun karang/ penyedia bibit karang), masyarakat UPT KKP Nusa Penida, *dive operator* dan pihak-pihak terkait.

Sedangkan untuk restorasi mangrove, luasan yang teridentifikasi adalah 20% dari populasi hutan mangrove. Terdapat beberapa titik sampel survey mangrove yang dilakukan di wilayah Ceningan, Lembongan dan Jungutbatu. Survey mangrove meliputi, kerapatan pohon, spesies, kanopi/ tutupan ranting dan daun, biota yang berada di dalam



transek (jangkauan luasan sample area). Dari hasil survey ditemukan 22 jenis tanaman dari hasil survey dan area yang akan direstorasi.

Terkait konservasi terumbu karang di wilayah Gili Matra sebagai bagian dari Paket Kegiatan 5, telah teridentifikasi Area Target Restorasi/Rehabilitasi Terumbu Karang TWP Gili Matra. Berdasarkan hasil survei awal yang telah dilakukan selama penyusunan laporan pendahuluan (*inception report*) diketahui bahwa kegiatan rehabilitasi di TWP Gili Matra telah dilakukan sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 oleh beberapa Lembaga, Yayasan dan kelompok yang bergerak dibidang pemerhati lingkungan. Hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 10 *site* lokasi rehabilitasi dengan total luasan 2.674,74 m². yang terbagi 3 *site* berada di perairan Gili Air dengan luasan 1150,30 m² (0,11 hektar), di Gili Meno terdapat 3 *site* dengan luasan 323,44 m² (0,032 hektar) dan di Gili Trawangan terdapat 4 *site* (1.201 m² / 0,12 hektar). Pemetaan kondisi terumbu karang akan dilengkapi dengan survei terumbu karang yang diterapkan pada sampel sistem satuan laut (berdasarkan deliniasi area kondisi terumbu karang). Survei akan menghasilkan detail kondisi terumbu karang di setiap unit pemetaan. Oleh karena itu, tim konsultan dalam hal ini, Ahli Restorasi Terumbu Karang



Keterangan: Survey kondisi mangrove untuk identifikasi lokasi rehabilitasi ekosistem mangrove

(CRE) melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk menentukan lokasi prioritas yang menjadi sasaran rehabilitasi/restorasi. Serangkaian konsultasi bersama pemangku kepentingan lebih lanjut juga akan diadakan untuk menentukan metodologi yang tepat untuk rehabilitasi/restorasi terumbu karang seperti, media transplantasi dan fragmen karang, serta infrastruktur terumbu karang buatan jika diperlukan.

Selain itu, sebagai bagian dari Paket Kegiatan 6, kegiatan konservasi mangrove di wilayah Gili Balu telah dimulai. Pada Kuartal 3 2021, program penanaman mangrove dilaksanakan pada September 2021, dihadiri oleh Bupati dan perangkat pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta komponen masyarakat diantaranya pelajar SMP dan SMU, guru-guru pendamping siswa, LSM-LOH, perwakilan masyarakat dan Pokmaswas.

Kegiatan penanaman ini turut dihadiri oleh Direktur Kelautan dan Perikanan BAPPENAS, Direktur Eksekutif ICCTF serta perwakilan dari PT. Sucofindo (Persero) dan tenaga ahli. Lokasi penanaman mangrove dilakukan di Pulau Kalong dan Pulau Namo masing-masing seluas 1 ha di Pulau Namo dan 1 ha lainnya di Pulau Kalong. Penanaman dilakukan dengan bekerja sama dengan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat dan telah mencapai 100%. Berdasarkan monitoring pada bulan November 2021 diketahui terdapat sekitar 20 - 30% tumbuhan yang rusak karena dihantam gelombang. Tanaman yang mati telah diganti dengan tanaman baru yang berasal dari bibit cadangan dari hasil semaian. Luas keseluruhan lahan yang ditanami dari 20 % kawasan yang rusak adalah 2 ha dan 20.000 bibit yang telah ditanam dengan cadangan bibit untuk penyulaman yang disiapkan sebanyak 3000 - 5000 bibit mangrove jenis *Rhizophora stylosa*.



Penanaman Mangrove oleh Masyarakat di Gili Balu



2.3 Infrastruktur Pendukung Pengelolaan Konservasi Ekosistem Terumbu Karang



Untuk mendukung pengawasan konservasi ekosistem terumbu karang, COREMAP CTI-ADB juga mendukung pembangunan pos pengawasan yang merupakan bagian dari Paket Kegiatan 4 di Nusa Penida, Paket Kegiatan 5 di Gili Matra dan Paket Kegiatan 6 di Gili Balu. Pembangunan Pos pengawasan di wilayah Nusa Penida saat ini dalam proses finalisasi DED yang berlokasi di desa Batununggal dimana terdapat perubahan lokasi dari rencana awal atas masukan masyarakat setempat agar nantinya dapat memakai lahan tersebut untuk acara upacara keagamaan. Lahan yang akan digunakan tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi Bali sehingga memudahkan proses administrasi, termasuk ketika nantinya dikelola oleh UPT. Desain yang diusulkan adalah bangunan berlantai dua yang memiliki ruang terbuka di lantai bawah sehingga nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Lantai atas akan digunakan sebagai tempat melakukan pengawasan/pemantauan dan juga tempat menyimpan sarana/ prasarana pendukung.

Sedangkan untuk Mangrove *tracking* dan menara pemantau burung, terletak di Ceningan dengan status pinjam lahan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Peninjauan juga dilakukan bersama Bupati Klungkung dan perwakilan dinas terkait. Terkait dengan penggunaan lahan, saat ini sedang dipersiapkan penerbitan surat penggunaan lahan dan pengecekan topografi. *Tracking* yang dibuat, akan terhubung ke menara pantau burung dan diintegrasikan dengan aktivitas ekowisata. Infrastruktur pendukung pengawasan berupa Pos pengawas juga akan dibangun di wilayah Gili Matra. Bangunan ini juga akan dijadikan sebagai pusat aktivitas dan kantor resmi untuk Pokmaswas TWP Gili Matra. Bangunan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat pengawas di TWP Gili Matra.

Pada mulanya bangunan infrastruktur pengawas yang diusulkan oleh tim adalah bangunan menara pengawas, namun karena adanya

Peraturan Daerah (Perda) terkait pembangunan di kawasan pesisir yang mempersyaratkan tinggi bangunan tidak lebih dari empat lantai maka tim diarahkan oleh Pemda untuk merevisi kembali desain bangunan menara pengawas menjadi kantor pos pengawasan. Saat ini DED bangunan pos pengawas telah selesai direvisi dan masih menunggu jadwal asistensi DED Bersama Tim tenaga ahli DED ICCTF.

Pos pengawas ini akan dilengkapi dengan panggung pemantauan yang merupakan menara pendek yang berdiri tegak setinggi enam meter dari atap lantai satu. Bagian ini digunakan untuk memantau kondisi perairan yang berada tepat di depan pos pengawas. Kawasan perairan yang berada di depan pos pengawas merupakan salah satu zona inti di Kawasan konservasi TWP Gili Matra. Berdasarkan informasi dari beberapa anggota Pokmaswas, lokasi tersebut

sering dijadikan lokasi penangkapan ikan yang dilakukan nelayan dari luar kawasan.

Sedangkan untuk wilayah Gili Balu, lokasi yang dipilih untuk dibangun Menara Pantau adalah di Pulau Paserang dan Pulau Namu. Tinggi menara pantau adalah 12 meter dengan ukuran 4x4 meter. Ijin lokasi yang akan dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan awalnya harus dilengkapi dengan UKL-UPL, akan tetapi karena saat pengurusan terjadi perubahan peraturan maka UKL-UPL tidak lagi diperlukan dan cukup dengan SPPL. Proses ini tetap harus mendapatkan rekomendasi Perencanaan Teknis (Pertek) dari Dinas Penanaman Modal NTB dan Surat Persetujuan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Denpasar. Dokumen-dokumen tersebut saat ini masih dalam proses penyelesaian.



Output **3**

Output 3. Pengembangan Usaha Sumber Daya Kelautan dan Perikanan





3.1 Budidaya Sumber Daya Kelautan

COREMAP-CTI ADB memberikan dukungan kepada masyarakat dan kelompok yang tinggal di wilayah kawasan konservasi berupa peningkatan kapasitas dalam hal usaha alternatif sumber daya kelautan. Untuk mendukung usaha, dilakukan juga kajian yang nantinya dapat menjadi referensi dalam pengembangan usaha.

Di wilayah Nusa Penida, mitra pelaksana Paket Kegiatan 4 memberikan dukungan berupa penyediaan laporan teknis lokasi budi daya rumput laut. Rumput laut yang dibudidayakan di ketiga lokasi sampling (Desa Suana, Desa Lembongan, dan Desa Jungut Batu) adalah *Kappaphycus alvarezii* dengan nama dagang Sakol, dan *Eucheuma denticulatum* dengan nama dagang Spinosum. Diketahui secara umum bahwa keberhasilan budi daya rumput laut *Cottonii*, Sakol, dan *Spinosum* membutuhkan perairan yang hangat, kecerahan tinggi, perairan yang kaya nutrisi dan pergerakan arus yang tinggi. Suhu, intensitas cahaya dan nutrisi dipercaya merupakan faktor terpenting yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan.

Di kawasan Gili Balu, prioritas perkembangan didasarkan pada hasil kajian sementara yang dilaksanakan hingga bulan Oktober 2021 diantaranya adalah sumber daya ikan, upaya tangkap, ekonomi perikanan, persepsi dan aspirasi masyarakat sasaran terhadap pemanfaatan sumber daya ikan. Beberapa informasi penting berdasarkan hasil yang diperoleh terkait dengan sumber daya ikan diantaranya adalah jenis ikan yang tertangkap oleh nelayan Gili Balu terdiri dari 55 jenis yang terdiri dari ikan pelagis besar dan kecil.

Selain ikan pelagis, terdapat juga ikan demersal yang ditangkap oleh sebagian besar nelayan Gili Balu diantaranya adalah kerapu, kakap, jenis-jenis moluska dan krustasea. Ikan yang paling dominan tertangkap oleh nelayan Gili Balu diantaranya adalah kembung, tembang, gurita, tongkol, lemuru, kakap dan baronang. Sedangkan produksi ikan tuna masih di bawah daerah tetangga yaitu Taliwang dengan rata-rata 26,17 ton/tahun (madidihang) dan 18,51 ton/tahun (tuna mata besar), sedangkan jumlah armada tangkap di Gili Balu lebih banyak daripada nelayan Taliwang.





BLUE FINANCE

Policy Note Blue Financing

Bappenas-ICCTF didukung oleh PROBLUE Program – World Bank telah menyusun kajian *Blue Finance Policy Notes* sejak November 2020. *Policy note* memuat hasil kajian tentang Komitmen Indonesia pada *Blue Economy, Sustainable Financing, Challenges & Opportunities, Potential Blue Finance Mechanism, dan Blue Finance Roadmap*.

Selama Januari-Oktober 2021, telah dilaksanakan beberapa pertemuan dengan berbagai institusi, yaitu BPD LH, BLU LPMUKP, Kehati, BNI, World Bank, dan ADB untuk membahas skema dan konsep dari blue finance dan potensi kerja sama terkait *Blue Financing* sebagai bagian penyusunan *Policy Note*. Konsep final *Policy Note* telah selesai disusun pada November 2021 dan sedang dalam *review* oleh panel expert World Bank.

SDGs 14 Bond (Blue Bond)

Sebagai hasil kajian *Policy Note* dan berdasarkan *roadmap Blue Financing*, disepakati fokus pengembangan instrumen pendanaan untuk *Blue Financing* yaitu *Blue Bond*. Selama 2021 telah dilakukan rangkaian diskusi dengan berbagai pihak yaitu SDGs Bond, Kemenkeu, Kehati, BNI, WB, UNDP, dan ADB untuk mengidentifikasi potensi pengembangan konsep *Blue Bond*.

Kerjasama Bappenas dan KKP

Sebagai tindak lanjut dari MoU antara Sesmen PPN/Sestama Bappenas dan Sekjen KKP tentang Program Kolaborasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan Melalui dukungan *Sustainable Blue Financing* pada Desember 2020 perlu dibuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) pada unit Eselon 2 terkait.

Selama tahun 2021, telah dilaksanakan diskusi teknis untuk penyusunan SPK antara Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas/ICCTF dan BLU LPMUKP KKP untuk menentukan lingkup kerjasama dan tata kelolanya. Konsep final SPK telah disampaikan kepada Biro Hukum Bappenas untuk dilakukan *Legal Review*. Biro Hukum Bappenas telah menyelesaikan *Legal Review* dokumen SPK. Selanjutnya konsep SPK antara ICCTF dengan BLU LPMUKP tersebut telah disampaikan kepada BLU LPMUKP dan sedang dalam tahap *Legal Review* oleh Biro Hukum dan Direktorat Teknis di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

SK Advisory Panel Blue Financing

Sebagai tindak lanjut dari MoU antara Sesmen PPN/Sestama Bappenas dan Sekjen KKP tentang Program Kolaborasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan

Perikanan melalui dukungan *Sustainable Blue Financing* pada Desember 2020 perlu disusun *Advisory Panel* yang berasal dari K/L terkait.

Pada tahun 2021 ini telah disusun konsep SK dari Sekretaris Menteri PPN/ Sekretaris Utama Bappenas (Sesmen PPN/Sestama Bappenas) tentang pembentukan Komite Pengarah dan Tim Teknis Kelompok Kerja Program Kolaborasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan

Perikanan melalui dukungan Sustainable Blue Financing di Kementerian PPN/Bappenas. Selanjutnya telah dilakukan diskusi tim *Blended Finance* dan World Bank untuk mengembangkan SK tersebut hingga dihasilkan 2 (dua) konsep SK yaitu: SK terdiri atas stakeholders yang luas terkait *Blended Finance* dan SK dengan stakeholders spesifik terkait *Blue Bond*. Sesuai arahan Bappenas maka opsi utama yang dipilih adalah SK spesifik terkait Blue Bond. Telah dilakukan stakeholders mapping untuk mengidentifikasi para pihak utama untuk mendukung SK ini.



BLUE CARBON

Pada tahun 2021, secara garis besar ICCTF melakukan kerjasama dengan dua mitra pembangunan di dalam *window Blue Carbon*, yaitu dengan Department of Industry, Science, Energy and Resources (DISER), Australia, dan dengan Agence Française de Développement (AFD), Perancis. Selain itu ICCTF juga turut berpartisipasi dalam *Webinar of Renewable Energy Summit 2021*.

Penyusunan *Concept Note* dengan AFD, Perancis

Kementerian PPN/Bappenas dan ICCTF bersama dengan AFD saat ini sedang dalam proses penyusunan proposal *ICCTF-AFD Concept Note on Blue Carbon to 2050 Facility Program*. Dalam kerjasama ini, rencananya AFD akan menyiapkan hibah sebesar EUR 600.000. Daerah prioritas yang diusulkan oleh ICCTF untuk dijadikan *pilot project* salah satunya adalah Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Kondisi ekosistem mangrove di Likupang masih sangat baik dan alami. Dengan kerapatan mangrove yang tinggi dan

monokultur membuat mangrove di kawasan ini membentuk gugusan pulau-pulau yang terbentang seluas 1.473 ha. Di kawasan ini juga dilaporkan oleh masyarakat sering muncul dugong atau ikan duyung karena arusnyanya yang tenang dan banyak terdapat lamun sebagai tempat mencari makan. Ekosistem lamun di sekitar kawasan ini juga cukup potensial namun belum teridentifikasi luasnya. Dengan *value* tersebut, kawasan ini memiliki potensi pengembangan pengelolaan ekosistem *blue carbon* yang berkelanjutan. Diskusi penyusunan *concept note* bersama dengan AFD akan dilanjutkan kembali pada awal tahun 2021.

Side Event COP 26 pada Pavillium Australia dengan DISER, Australia

Sebagai tindak lanjut kerjasama antara Bappenas dan ICCTF dengan DISER dalam rangkaian kegiatan *Policy Dialogue* tahun 2020 lalu, pada tahun 2021 ini kedua belah pihak kembali bekerjasama dalam pelaksanaan Webinar “How Can Blue Carbon Policies be Designed to Drive Sustainable and Effective Change” pada Side Event COP 26 yang berlangsung tanggal 6 November 2021, bertempat di Paviliun Australia. Pada kegiatan ini, Bappenas dan ICCTF turut berpartisipasi sebagai narasumber secara *online*.

Dalam sambutannya, Hon. Angus Taylor, Menteri Energi dan Pengurangan Emisi Pemerintah Australia, menyampaikan bahwa Pemerintah Australia tengah mengimplementasikan dua program kerja sama dengan tiga negara yaitu, Indonesia, Fiji dan Papua Nugini. Pemerintah Indonesia melalui Deputy bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/ Bappenas, menyambut baik kerja sama di kawasan Pasifik ini. Beliau juga menekankan bahwa komitmen Indonesia dalam mendukung pengurangan emisi karbon ditunjukkan melalui penyerahan dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC), termasuk pembahasan karbon biru. Dokumen yang diberikan kepada UNFCCC ini memuat strategi jangka panjang untuk



Gambar. Poster Side Event COP 26

ketahanan karbon dan iklim 2050. Direktur Eksekutif ICCTF selanjutnya menambahkan mengenai pengembangan framework dalam mendukung pengarusutamaan isu *blue carbon* di Indonesia. Framework ini memuat tiga strategi utama, yaitu institusional, tata kelola, dan pendanaan.

Sebagai tindak lanjut, ICCTF dan DISER akan terus berkoordinasi pada tahun 2022 untuk mengawal implementasi dua program *blue carbon* tersebut, yaitu:

- Dokumen implementasi IPCC *Wetlands Supplement*
- Kursus pelatihan kebijakan karbon biru untuk negara di kawasan Pasifik

Webinar of Renewable Energy Summit 2021: Blue Carbon sebagai Bagian Proses Dekarbonisasi untuk Net Zero Emission di Indonesia

Sebagaimana diketahui bersama, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi menuju *Net Zero Emission* (netralitas karbon) pada tahun 2060 atau lebih cepat sesuai Strategi Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (*Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience/LTS-LCCR*). Untuk itu, diperlukan perumusan sejumlah kebijakan, salah satunya mengenai *blue carbon* Chakra Giri Energi Indonesia sebagai salah satu private sector yang bergerak dalam bidang *research, database, dan advisory firm*



Gambar. Poster Webinar of Renewable Energy Summit 2021

untuk *renewable energy* mewadahi diskusi melalui webinar dengan judul “*Blue Carbon* sebagai Bagian Proses Dekarbonisasi untuk *Net Zero Emission* di Indonesia”. Tujuan dari webinar ini adalah membahas peran *blue carbon* dalam pengurangan emisi serta potensi Energi Baru Terbaharukan (EBT) dari sektor kelautan. Webinar ini juga merupakan bagian dari rangkaian webinar *renewable energy summit* yang diselenggarakan oleh Chakra Giri Energi pada tahun 2021.

Pada kegiatan ini, Direktur Eksekutif ICCTF memberikan paparan mengenai potensi dan tantangan dari *blue carbon* di Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa, ekosistem *blue carbon* di

Indonesia mampu menyimpan hingga 3,3 giga ton karbon. Namun terdapat sejumlah ancaman terhadap ekosistem *blue carbon* antara lain deforestasi, penebangan liar, reklamasi, sedimentasi, dan pencemaran. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan bersama dan terintegrasi antar pihak terkait, tidak hanya dari Pemerintah Pusat tetapi juga dari Pemerintah Daerah. Dalam mengarusutamakan isu *blue carbon* ini, Bappenas dan ICCTF mengelaborasi SDGs, RPJMN 2020-2024 dan *blue economy*. Selain ekosistem *blue carbon* yang memiliki peran penting dalam menyerap karbon, Direktur Eksekutif ICCTF juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi EBT. potensi tersebut diantaranya energi biomassa pesisir berupa arang kayu bakau yang dapat dikembangkan melalui Hutan Tanaman Industri (HTI) mangrove, serta potensi energi laut yang dapat dikembangkan dari energi pasang surut, energi gelombang dan energi panas laut.



KEGIATAN STRATEGIS DAN PROJECT PIPELINE

Inisiasi Kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) – Sustainable Shrimp Aquaculture

Pada tahun 2021 ini KKP telah mengajukan indikasi pagu pendanaannya sebesar 5 Juta US Dollar melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Nomor B.229/SJ/RC.2020/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang perbaikan usulan *Readiness Criteria* untuk daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/Green Book) 2021.

Proposal untuk GEF telah disusun dan dibahas bersama Direktorat Jendral Perikanan Budidaya KKP. Usulan kegiatan dalam proposal tersebut, antara lain: *traceability, zero conversion, controlled intensification, capacity building, private engagement* serta *policy & regulatory reform*.



COMMUNICATION OUTREACH

Penjangkauan Komunikasi

Berbagai kegiatan komunikasi dan publikasi yang terkait dengan penanggulangan perubahan iklim bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai dampak perubahan iklim, sekaligus mensosialisasikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Bappenas pada satker ICCTF dalam melaksanakan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Pada tahun 2020 hingga di tahun 2021 ini, kegiatan komunikasi dan publikasi ICCTF juga diarahkan untuk mendukung implementasi Bappenas dalam

konteks RPJMN serta monitoring ekosistem pesisir prioritas dan Rehabilitasi Terumbu Karang.

Kegiatan komunikasi ICCTF terbagi atas dua strategi yaitu komunikasi internal dan eksternal. Melalui kegiatan-kegiatan komunikasi ini, eksistensi ICCTF sebagai satu-satunya lembaga perwalian dana perubahan iklim yang dimandatkan oleh pemerintah di Indonesia diharapkan dapat lebih dikenal dan diakui, baik oleh pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri. Komunikasi internal kepada seluruh staf ICCTF di semua level untuk meningkatkan

manajemen pengetahuan seluruh staf tentang visi-misi ICCTF, menginternalisasi nilai-nilai strategis organisasi, dan membangun solidaritas staf agar terbangun suatu budaya kerja positif di ICCTF.

Sedangkan untuk kegiatan komunikasi eksternal, ICCTF menekankan pada pengenalan visi-misi organisasi, peranan strategis organisasi, serta eksistensi dan fungsi dari pengembangan program-program ICCTF. Selain itu juga menyebarluaskan capaian serta pembelajaran program-program ICCTF yang layak untuk disebarluaskan dan direplikasi di daerah lainnya yang memiliki karakteristik dan permasalahan serupa. Upaya pengenalan dan penjangkauan publik ICCTF dilakukan secara intens dengan pola yang beragam dan target yang variatif. Pola komunikasi yang diterapkan secara umum tidak hanya

dalam bentuk sosialisasi dan ekspose program-program ICCTF, tetapi juga dalam bentuk kunjungan ke lokasi program, pameran dan seminar, optimalisasi sosial media, website ICCTF, dan podcast Cerita Dari Laut serta peningkatan relasi dengan media melalui kegiatan press conference. Komunikasi lebih fokus pada komunikasi eksternal melalui penyelenggaraan kegiatan monev, seminar publik, serta pelatihan maupun training. Pada tahun 2021 ini ICCTF melakukan strategi pendekatan komunikasi digital karena dinilai lebih interaktif dan real time, melalui pengelolaan media sosial ICCTF yang terdiri atas Facebook (Indonesia Climate Change Trust Fund) <https://www.facebook.com/IndonesiaClimateChangeTrustFund> ; Twitter (@ICCTF_ID) https://twitter.com/ICCTF_ID ; Instagram (@icctfofficial) <https://www.instagram.com/icctfofficial/> ; Youtube (ICCTF Official) <https://www.youtube.com/channel/ICCTFOfficial> dan Website ICCTF <https://www.icctf.or.id/>.

Jumlah Pengikut

sampai dengan Desember 2021



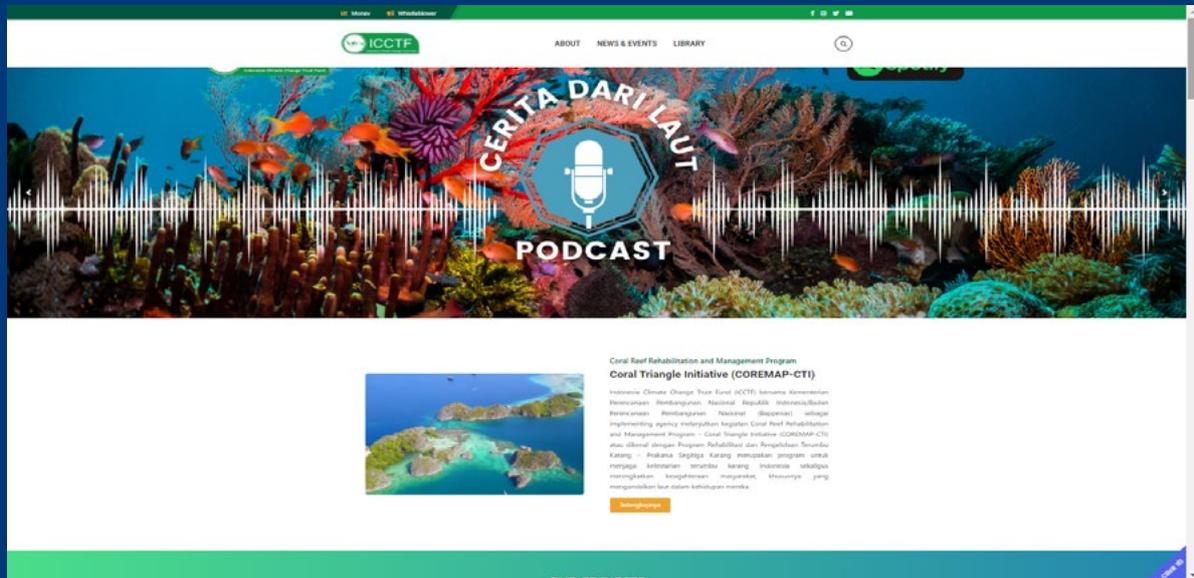
Gambar. Jumlah Pengikut Sosial Media ICCTF hingga 2021

Sosial Media

Hingga akhir Desember 2021, jumlah *followers* pada Sosial Media ICCTF adalah sebagai berikut: **Facebook 986 Akun; Instagram 2351 Akun; dan Twitter 616 Akun.** Kemudian untuk Website ICCTF, diketahui telah dikunjungi oleh sebanyak **102.631 Akun** dengan jumlah kunjungan sebanyak **403.717 Visit** dalam setahun.

Publikasi

Sepanjang 2021, ICCTF juga telah melakukan Publikasi Media sebanyak **70 Publikasi Pemberitaan** melalui berbagai media masa baik secara *online* maupun cetak dalam setahun. Selain itu ICCTF juga melakukan publikasi melalui media audio Podcast dengan judul Cerita Dari Laut dan sampai saat ini telah terposting sampai dengan **8 Episode.**



Gambar. Tampilan Website ICCTF



Gambar. Podcast “Cerita dari Laut” di Spotify



Gambar. Booth Kementerian PPN/ Bappenas Geopark Exhibition



Gambar. Indonesia Climate Change Trust Fund Page on Geopark Indonesia Summit 2021

ICCTF turut serta dalam Geopark Indonesia Summit Exhibition 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/ Bappenas secara virtual. Dalam *event virtual* ini ICCTF berkontribusi melalui produksi media secara digital dalam bentuk materi cetak, visual foto, serta video. Produksi media cetak ini berupa *factsheet* ICCTF 2021 dan ICCTF *Credentials*, selain itu juga *factsheet* materi program dari COREMAP-CTI World Bank dan Asian Development Bank.



Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan *Media Monitoring* terhadap kegiatan yang melibatkan media massa baik cetak maupun *online*. Pada Tahun 2021 ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan *Media Monitoring* terhadap kegiatan yang melibatkan media massa di antaranya:

- Seminar Bioekonomi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Studi Bioekonomi Udang.
- Kick-Off Meeting COREMAP-CTI Asian Development Bank.
- Entry Meeting COREMAP-CTI ADB di Nusa Tenggara Barat.
- Dialog Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur di Jakarta.
- Penanaman Mangrove, Monitoring & Evaluasi COREMAP-CTI ADB di Gili Balu.
- Exit Strategy COREMAP-CTI World Bank di Kupang, Nusa Tenggara Timur.





Inovasi Pembangunan Melalui Program dan Kegiatan ICCTF

A

COREMAP-CTI WORLD BANK

Dalam kegiatan COREMAP-CTI WB, terdapat beberapa inovasi pembangunan yang dihasilkan yaitu:



Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi RZWP3K

Sistem berbasis *website* ini dikembangkan untuk mendukung Pemerintah Papua Barat dalam memonitor implementasi indikatif program RZWP3K yang dilakukan di Papua Barat baik oleh organisasi pemerintah daerah maupun lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu juga mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai alokasi ruang maupun kegiatan ilegal lainnya. Diharapkan data dan informasi yang didapat dari sistem ini dapat digunakan sebagai masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan di Papua Barat. Sistem ini diharapkan dapat direplikasi di Provinsi lain



Science-based policy

COREMAP-CTI mempromosikan *science-based policy* dimana kegiatan yang dilakukan oleh mitra pelaksana berkontribusi terhadap penyediaan data dan informasi berbasis keilmuan (*science*) untuk perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan dan juga konservasi jenis terancam punah. Sebagai contoh dalam penyusunan *policy brief* pengembangan ekowisata di TNP Laut Sawu, terlebih dahulu dilakukan kajian tentang investasi bisnis wisata di TNP Laut Sawu yang kemudian menjadi masukan dalam penyusunan *policy brief*. Hal lainnya adalah dalam pengembangan wisata berbasis spesies dilakukan kajian pengembangan wisata untuk memetakan potensi wisata spesies yang dapat dikembangkan dan kesenjangan informasi maupun kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat agar dapat mengembangkan wisata tersebut. Terkait dengan pengelolaan jenis terancam, beberapa kajian dan survey dilakukan untuk memastikan kondisi dan status dari masing-masing jenis terancam



Pemberian akses pengelolaan sumber daya perikanan kepada masyarakat adat

Salah satu kegiatan COREMAP-CTI adalah mendorong penatalayanan sumber daya perikanan kepada masyarakat adat. Program ini merevitalisasi Lembaga adat yang ada dan mendorong masyarakat adat untuk mengenali dan mengimplementasikan kembali pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan sumber daya laut berdasarkan adat istiadat yang mereka miliki yang sejalan dengan pelestarian dan keberlanjutan sumber daya.



Pengembangan sarana *mobile cold storage* dengan *solar system*

Salah satu kendala yang sering dikeluhkan oleh para nelayan adalah ketiadaan sarana untuk pengawetan ikan seperti es batu dan juga kotak pendingin (*cool box*). Oleh karena itu melalui program ini dibuat suatu tempat pendingin yang dapat dipindahkan dan menggunakan tenaga surya untuk mengatasi permasalahan ketiadaan listrik di pemukiman masyarakat. Diharapkan inovasi ini bisa direplikasi dan disebarluaskan terutama untuk wilayah-wilayah yang tidak memiliki akses terhadap listrik.

Inovasi dan kebaruan Program COREMAP-CTI ADB yang dilakukan bersama Mitra Pelaksana adalah sebagai berikut:



Payment Ecosystem Services (PES) yang berkelanjutan

Payment Ecosystem Services (PES) atau Imbal Jasa Lingkungan dalam proyek COREMAP-CTI bantuan ADB akan disusun untuk Nusa Penida, Bali dan Gili Matra, NTB. PES dimaknai atas berbagai manfaat dari lingkungan alam dimana para pihak penerima manfaat kemudian melakukan pembayaran. Dalam hal ini, pembayaran dapat dilakukan melalui retribusi yang dilegalkan melalui Peraturan Daerah ataupun Surat Keputusan dari Pimpanan Daerah Provinsi maupun Kabupaten, Maupun melalui mekanisme Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dari dua Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Perairan yang menjadi target Proyek COREMAP-CTI, Kawasan Konservasi Nusa Penida merupakan Kawasan konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Nusa Penida. Sementara Tawan Wisata Perairan (TWP) Gili Matra merupakan Kawasan konservasi dikelola oleh Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Kelautan Perikanan melalui Badan Koordinasi Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Wilayah Kerja Gili Matra.

Nusa Penida

Pemerintah Provinsi Bali sedang mendorong kebijakan TWO Nusa Penida melalui pembentukan Tim kelompok kerja penyusunan dokumen teknis pungutan jasa konservasi berdasarkan daya dukung lingkungan pada Kawasan Konservasi di Provinsi Bali. Pembentukan Tim Pokja melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor 19 Tahun 2021. Salah satu tugas antara Menyusun usulan pungutan jasa konservasi untuk merevisi Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.

Proyek COREMAP-CTI sedang bekerjasama dengan Tim Pokja dalam melakukan FGD pada tanggal 29 November 2021, di Denpasar, Bali guna merancang strategi mekanisme pungutan retribusi untuk konservasi dikawasan konservasi di Provinsi Bali. Dalam FGD diperoleh kesepakatan, yaitu:

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha di KKP Bali agar berjalan efektif dan

efektif maka diperlukan Kerjasama dan koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait secara berkelanjutan

Pemungutan retribusi jasa usaha di KKP Bali agar tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta kelestarian lingkungan di sekitar Kawasan konservasi melalui mekanisme digital

Mekanisme penyetoran retribusi di daerah disampaikan ringkas

Dinas kelautan dan perikanan provinsi Bali/UPTD Kawasan konservasi perairan Bali agar segera Menyusun SOP Mekanisme Pemungutan Retribusi Jasa Usaha di Kawasan Konservasi

Perlu upaya integrasi retribusi jasa usaha di KKP dengan retribusi tempat rekreasi dan olah raga kabupaten Klungkung dan manajemen pariwisata Nusa penida dalam satu sistem aplikasi Portal Bali

Sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas perda No. 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha kepada stakeholder terkait memanfaatkan Kawasan konservasi perairan

Pembahasan hal teknis dan permasalahan yang dihadapi akan dilaksanakan melalui pertemuan lanjutan sesuai dengan kebutuhan

Gili Matra

TWP Gili Matra menyediakan asset sumberdaya alam dan lingkungan bagi masyarakat saat ini hingga generasi mendatang. TWP Gili Matra terdiri dari tiga pulau kecil, yaitu Gili Trawangan, Gili Ayer dan Gili Meno seluas 711,6ha.

Terletak di wilayah administrative Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat.

TWP Gili Matra adalah satu dari lima puluh destinasi pariwisata nasional dan menjadi bagian penting dari bentang laut sunda kecil (Lesser Sunda) dengan habitat bagi beragam jenis mangrove. Lamun dan terumbu karang.

Sejarah pengelolaan Kawasan konservasi, pada tahun 1993, ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut (TWAL) melalui Surat keputusan Menteri Kehutanan No: 85/Kpts-II/1993, kemudian diubah menjadi Kawasan Pelestarian Alam Perairan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 99/Kpts-II/2001. Sejak tahun 2009 pengelolaan Kawasan Gili Matra dipindahkan ke Departemen kelautan dan perikanan, sehingga pada tahun 2014 kawasan Konservasi Gili Matra memiliki Rencana Pengelolaan dan Zonasi menurut Kepmen KP No. 57 Tahun 2014.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, pada tahun 2020 menetapkan nilai ekonomi Kawasan berdasarkan komponen ekosistem pesisir. Sesuai dengan hasil perhitungan Nilai ekonomi terumbu karang tahun 2020 adalah Rp 36,59 Milyar, kemudian untuk Nilai Ekonomi Ekosistem Lamun adalah Rp 6,59 Milyar dan Nilai Ekonomi Ekosistem Mangrove Rp 3,11 Milyar.

Melalui Proyek COREMAP-CTI bantuan ADB, akan membantu dalam menyusun naskah akademik terkait mekanisme PES menyampaikan

tentang potensi dan karakteristik dari Kawasan Gili Matra, potensi apa yang sudah ada dan dikembangkan di Gili Matra, bagaimana operational cost dan hasil kajian *willingness to pay* (WTP) di Gili Matra. Bentuk kelembagaan yang ada serta kelembagaan apa yang harus dikembangkan di Gili Matra ini.

Dalam penyusunan perumusan Naskah Akademik PES Gili Matra harus mengacu pada status TWP Gili Matra yang dikelola oleh Pusat (Nasional) dalam hal ini adalah KKP, maka instrumen yang dapat dilakukan

hanya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagai instrument Ekonomi di Gili Matra. Untuk itu, Tim ahli Proyek COREMAP-CTI akan melakukan *stakeholder analysis*, rencana pemanfaatan berdasarkan RPZ (Rencana pengelolaan Zonasi) TWP Gili Matra, mendukung kegiatan *livelihood* yang berkelanjutan, dukungan pelatihan-pelatihan,

Untuk Lembaga pelaksana yang perlu mendapat perhatian adalah Badan Layanan Umum (BLU) dengan melakukan kajian PP 75 dan PP 85, serta penerapan Permen KP No. 35 yang telah di perbaiki dalam Permen KP No. 39.



Integrasi Tourist Management Sistem (TMS) dengan Payment Ecosystem Services (PES)

Setidaknya ada tiga spesies karismatik yang menjadi focus intervensi proyek COREMAP-CTI bantuan ADB, yaitu Sunfish (Mola-mola) di Nusa Penida, Hiu dan Penyu di perairan Gili Matra. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan berbagai Lembaga atau organisasi non-pemerintah (LSM) dari dalam dan luar negeri, serta instansi pemerintah pusat dan daerah, mengemukakan bahwa jumlah kegiatan pariwisata untuk melihat ketiga spesies karismatik tersebut sulit dikendalikan. Terutama kondisi menjelang COVID-19 di musim kemunculan spesies tersebut. Melalui Proyek COREMAP-CTI, kajian PES yang dilakukan juga di dukung dengan sistem manajemen wisata *online* yang dapat mengendalikan jumlah kunjungan wisata seperti pembangunan *Tourist Management System* yang akan di operasikan di TWP Nusa Penida dan TWP Gili Matra.

Sedikitnya ada lima tahap dalam pengembangan sistim manajemen wisata *online*, yaitu tahap pengumpulan dan analisa data, tahap penyusunan desain tampilan sistem dan penetapan modul, tahap implementasi hasil desain TMS menggunakan bahasa pemrograman, tahap testing dan tahap *maintenance* sistem atau tahap perawatan sistem.

Secara detail dalam pembangunan sistem manajemen wisata *online*, *stakeholder* sudah menyampaikan tanggapan terkait design manajemen wisata berbasis *online*, diantaranya melakukan pembatasan untuk kegiatan wisata Mola-mola atau manta dan TMS dapat menjadi tools UPTD KKP dalam melakukan pengendalian tersebut. Melakukan kajian kapasitas sumberdaya untuk mendukung TMS, sebagai contoh salah seorang anggota kelompok ahli dari pemerintah daerah provinsi sudah mengkaji dengan hasil maksimal 70 (tujuh

puluh orang) yang dapat melakukan kegiatan selama satu hari. Terdapat tiga komponen utama dalam sistem yang harus terlibat, yaitu *dive operator*, *dive centre*, dan *dive community*. Selanjutnya biaya retribusi harus sesuai dengan kajian PES termasuk mendorong sistem retribusi.

Upaya mengendalikan jumlah kunjungan wisatawan pada Kawasan konservasi dengan potensi kekayaan alam yang sangat tinggi, seperti keberadaan karismatik spesies di Nusa Penida dan Gili Matra perlu diimbangi dengan kebijakan pengendalian jumlah kunjungan wisata dan juga sistem retribusi yang berpihak juga pada upaya preservasi dan konservasi.

Kajian Rantai Pasok tiga komoditas kelautan dan perikanan Tuna, Kakap dan Rumput laut



Tujuan dari Proyek COREMAP-CTI melakukan kajian rantai pasok adalah Menyusun analisa strategis untuk mendukung peningkatan pasar sumberdaya perikanan dan kelautan Indonesia di tingkat domestik dan juga internasional serta untuk mempromosikan industri perikanan yang ramah lingkungan dengan memastikan perilaku yang benar dan memenuhi peraturan sub-regional, dalam hal ini Wilayah Pengelolaan Perikanan WPP 713 dan 573. Kajian survei biofisik yang akan dilakukan terfokus pada komoditas tuna, kakap dan rumput laut di Kawasan Konservasi Nusa Penida, Gili Balu dan Gili Matra.

Tujuan utama dari kajian tuna untuk menganalisis produktivitas relatif armada tuna rawai yang berbasis di Pelabuhan Benoa. Kajian perikanan dapat dibagi menjadi segmen sesuai kategori berdasarkan spesies yang ditargetkan dan tonase kotor dari empat spesies tuna utama yang ditargetkan oleh rawai yaitu albacore (ALB), mata besar (BET), dan tuna sirip kuning (YFT) dengan beberapa tangkapan insidental tuna sirip biru selatan. (SBT).

Kajian Kakap bertujuan untuk melakukan serangkaian kajian dan analisis strategis rantai pasok perikanan kakap dan analisis pasar di Bali, NTB dan NTT. Ketiga provinsi tersebut dikenal sebagai produsen utama kakap di Bentang Laut Sunda Kecil, serta di WPP 713 dan 573 Indonesia. Kajian ini akan mengumpulkan informasi tentang pengetahuan dan pemahaman tentang pola perdagangan dan pasar perikanan kakap di tiga provinsi, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Analisis strategis lebih lanjut akan dilakukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan perikanan kakap, mendorong industri perikanan yang bertanggung jawab dan praktik yang baik yang sesuai dengan peraturan, serta peningkatan pasar domestik dan internasional.

Sementara tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pasar dan rantai pasokan rumput laut Indonesia di Lesser Sunda. Ada dua metode paralel untuk mengarahkan proyek ini, yaitu: yang pertama adalah melihat lebih dekat situasi rantai pasokan rumput laut saat ini dari Kepulauan Lesser Sunda, terutama dari petani lokal hingga pembeli terdekat. Strategi kedua, yang digunakan bersama dengan yang pertama, adalah menentukan permintaan kritis pasar rumput laut, terutama untuk produk alternatif yang baru-baru ini diperkenalkan berdasarkan turunan rumput laut. Model kerangka kerja menunjukkan bagaimana rantai pasokan rumput laut Indonesia terkait dengan penciptaan berbagai produk rumput laut yang memenuhi permintaan pasar.

Survei Biofisik diperlukan untuk menilai kondisi lingkungan saat ini di tiga Kawasan konservasi, yaitu Nusa Penida, Gili Matra, dan Gili Balu. Untuk lebih memahami kondisi hidrologi dan oseanografi di kawasan ini akan dilakukan beberapa survei pada ekosistem utama yaitu ekosistem terumbu karang, ikan karang, mangrove, ekosistem lamun. Selain itu, *water property* dan dinamika juga akan disurvei untuk mengetahui penyebaran larva. Hasil survei biofisik akan digunakan untuk mendukung badan pengelola Kawasan konservasi ini untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya.

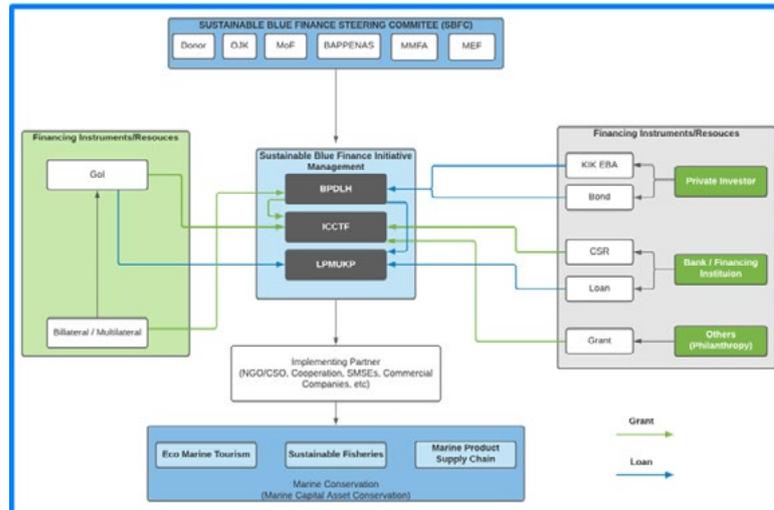
Melalui kajian rantai pasok terhadap tiga komoditas sumber daya perikanan dan kelautan serta kajian biofisik akan menghasilkan output untuk peningkatan pengelolaan, kualitas serta aspek pasar komoditas yang lebih terarah dalam peningkatan industry perikanan dan kelautan Indonesia.

Terdapat beberapa instrumen pendanaan untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan seperti dana perwalian, investasi berdampak, *debt for nature swaps*, dana pinjaman bergulir, dana kompensasi, dana kekayaan negara, konversi hutang, kredit karbon, *Corporate Social Responsibility* (CSR), produk asuransi parametrik, obligasi, dan *blended finance* (pendanaan campuran). Pada tahun 2018, Bank Dunia mendukung Seychelles untuk pengembangan *Sovereign Blue Bond* pertama di dunia, yang menunjukkan kemampuan beradaptasi menggunakan berbagai mekanisme pendanaan ini khusus untuk *blue economy* (ekonomi biru). Indonesia secara khusus sebelumnya telah menerbitkan *green bonds/sukuku* dan selanjutnya Pemerintah Indonesia juga mengadaptasi pengembangan *bond* dan instrumen *blended finance* secara umum untuk mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan. Contoh dari inisiatif tersebut yang saat ini menerapkan *blended finance* sebagai mekanisme di Indonesia adalah *Meloy Fund for Sustainable Community Fisheries*.

Blended finance adalah sumber pendanaan pembangunan strategis yang umum digunakan untuk memobilisasi pembiayaan tambahan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. *Blended finance* menggunakan uang publik atau filantropi untuk mempromosikan peningkatan modal swasta untuk mencapai dampak pembangunan. Investor swasta dalam struktur *Blended finance* mungkin hanya mencari *market-rate financial return*. Pembiayaan publik juga dapat digunakan untuk menguji kelayakan sektor inovatif atau potensial untuk mengurangi risiko skema serta menarik investasi sektor swasta di masa depan, sehingga pemanfaatan dana sektor publik yang kecil dapat menarik pendanaan sektor swasta dimasa depan dan lebih besar. Secara keseluruhan, pendanaan ini diharapkan dapat menghasilkan pengembalian finansial yang positif. Investor yang berbeda dalam struktur *blended finance* akan memiliki ekspektasi pengembalian yang berbeda, mulai dari yang lunak hingga harga pasar. Publik dan/atau pihak filantropi adalah katalisator. Partisipasi dari pihak-pihak ini meningkatkan profil risiko/pengembalian transaksi untuk menarik partisipasi dari sektor swasta.

Blended finance bukan hanya tentang struktur keuangan atau '*stacking*' berbagai jenis modal publik dan swasta, tetapi percampuran keahlian serta tujuan antara sektor publik dan swasta dengan cara yang memberikan keuntungan finansial maupun dampak sosial/lingkungan yang lebih besar dan lebih baik daripada pencapaian melalui investasi publik atau swasta saja.

Pada akhir Juni 2021, saat World Bank menjadi tuan rumah *kegiatan Indonesia Ocean Development Partner* (IODP), ICCTF Satker di Bappenas sedang menyusun skema SBFI (gambar 1). Direktur Eksekutif ICCTF memaparkan skema dukungan pendanaan dalam rangka mengembangkan dan mengisi gap financing di sektor kelautan dan perikanan yang disebut *Sustainable Blue Financing Initiative* (SBFI).



Gambar. Skema Pengembangan *Sustainable Blue Financing Initiative* (SBFI)

Alasan utama untuk mengembangkan SBFI berdasarkan beberapa latar belakang sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 membutuhkan pendanaan sebesar Rp 24.214,5 triliun (USD 1,7 T), dimana hanya 20-25% dapat ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terdapat kekurangan dana sebanyak 75%-80% yang perlu dicari dari sumber lain diluar pendanaan Pemerintah Indonesia.
2. Dalam program prioritas nasional bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan membutuhkan diperkirakan membutuhkan pendanaan sebesar USD1,1 Miliar.
3. *Major Project* Nasional terkait Revitalisasi tambak udang & bandeng membutuhkan Rp 25 T (USD 1,7 M). APBN hanya dapat menutupi Rp 3,3 triliun (USD 0,2 M).
4. *Major Project* Nasional terkait Pelabuhan Perikanan Internasional membutuhkan Rp 30 triliun (USD 2,1 Miliar). APBN hanya dapat menutupi Rp 7,2 T (USD 0,5 M).
5. Untuk dapat menarik pendanaan swasta dan non pemerintah, lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pendanaan untuk sektor kelautan dan perikanan yang masih tersebar dan belum berkoordinasi perlu ditingkatkan kerjasama antar lembaga sebagai awal untuk memitigasi risiko atau sebagai katalisator untuk memadukan pendanaan dari publik, swasta dan filantropi.

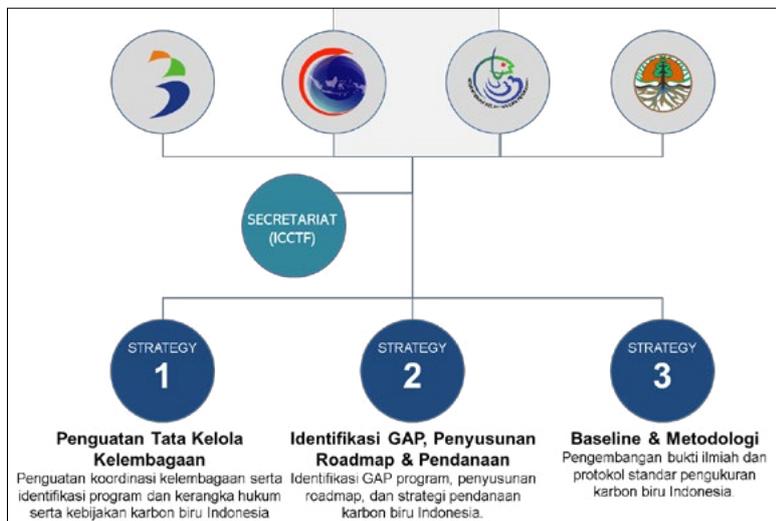
Bappenas melalui ICCTF mencoba mengembangkan inisiatif dengan menerapkan pendekatan *Blended Finance* guna mengisi gap pendanaan dan organisasi khususnya untuk sektor kelautan dan perikanan sebagaimana disebutkan pada latar belakang di atas yang disebut dengan *Blue Finance*. Secara umum, skema tata kelola SBFI terdiri dari empat kelompok, yaitu:

1. Komite Pengarah *Blue Finance* (*Blue Finance Steering Committee*), sebagai tingkat koordinasi tertinggi tidak hanya untuk skema *blended finance*, tetapi juga untuk seluruh inisiatif *blue finance* di Indonesia.

2. Manajemen *Blended Finance* (SBFI) dengan peran utama mengelola dana termasuk penerimaan, perguliran, *endowment* dan penyaluran dana.
3. *The blended sources of fund* termasuk dana publik, bantuan pembangunan dari mitra bilateral dan multilateral serta investasi sektor swasta sebagai penyedia dana gabungan dalam bentuk pinjaman, hibah dan jenis pendanaan lainnya.
4. Mitra Pelaksana dengan peran utama menyalurkan dana untuk wisata bahari, perikanan berkelanjutan, atau rantai pasok hasil laut.

D BLUE CARBON

Inovasi yang dilakukan Bappenas melalui ICCTF dalam *windows blue carbon* salah satunya adalah pengembangan kerangka kerja *Indonesia Blue Carbon Strategy Framework* (IBCSF). Tujuannya adalah untuk mengarusutamakan berbagai inisiatif dan rencana kebijakan terkait inisiatif *blue carbon* dalam skema perencanaan pembangunan Indonesia khususnya di bidang ekosistem pesisir dan lautan. IBCSF mengintegrasikan upaya adaptasi dan mitigasi dengan memperkuat kerjasama sama antar lembaga, terutama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar. Struktur dan strategi IBCSF

ICCTF sebagai institusi pendanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berinisiasi untuk mengadakan rangkaian kegiatan pertemuan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga (*Multi-Agency Meeting*) untuk membahas kerjasama lintas sektoral guna menunjang perencanaan pembangunan yang holistik dalam pengarusutamaan isu *blue carbon* dan Bappenas berperan sebagai *lead*.

Pembahasan dilakukan tidak hanya melibatkan Pemerintah Pusat saja tetapi juga Pemerintah Daerah untuk menghimpun berbagai masukan. Masukan-masukan tersebut akan menjadi sebagai salah satu acuan dalam penyusunan peta jalan (roadmap) *blue carbon* di Indonesia. *Multi-Agency Meeting* ini juga merupakan inovasi pembangunan lainnya dari *window Blue Carbon*.



Daftar Liputan Media Tentang Program ICCTF 2021 ---



Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Studi Bioekonomi Udang

Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Studi Bioekonomi Udang - Ekonomi I (rri.co.id)



Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto

KBRN, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melakukan kajian bioekonomi sebagai kegiatan percontohan terkait Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) berbasis jenis, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan penerapan dari *science-based policy* dengan menggunakan *community based* sebagai dasar implementasi.

“Kebijakan berbasis sains ini menjembatani perencanaan pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan, pelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pendapatan negara dengan mendorong perekonomian nasional,” ungkap Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto dalam Seminar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Studi Bioekonomi Udang di Laut Arafura, di Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Contoh implementasi pengelolaan WPP 718, Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memastikan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan WPP dengan penguatan

pendataan stok sumberdaya ikan, penerapan tracking kapal laut, serta pelaksanaan kajian bioekonomi perikanan yang potensial seperti udang.

Laut Arafura yang termasuk ke dalam WPP 718 dikenal dengan kelimpahan udang dengan produksi mencapai 283,4 ribu ton atau sekitar 11% dari produksi nasional (KKP, 2019). Namun pengelolaan sumber daya udang di WPP ini menghadapi banyak tantangan beberapa tahun ke belakang karena adanya *illegal fishing*, *overcapacity* dan belum diketahui tingkat optimal alokasi kapal dan manfaat sumber daya yang seharusnya diperoleh pemerintah.

“Arah kebijakan kemaritiman, kelautan, dan perikanan dalam RPJMN di antaranya menjadikan WPP sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi, mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto.

Selain itu juga meningkatkan produksi, produktivitas, standarisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan, meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan,

kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan, dan perlindungan usaha skala kecil, serta meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset, serta penguatan database.

Beberapa catatan penting untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan di antaranya keberhasilan pengelolaan perikanan berkelanjutan sangat tergantung pada ketersediaan data dan informasi, kebijakan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah (implementasi itu tidak bersifat one fit for all), implementasi dalam pengelolaan WPP dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder mulai dari Perguruan Tinggi sampai dengan pelaku usaha dan masyarakat, perlu adanya lembaga yang mengelola data dan informasi yang bersifat permanen dengan memperhatikan prinsip independensi.

Tak hanya itu, dukungan political will untuk memanfaatkan data tersebut dalam pengambilan kebijakan kedepan, serta adanya data center untuk pengelolaan data yang dipublikasikan dan dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan (*sharing data*).

“Harapannya pengelolaan WPP berbasis sains dengan mengkombinasikan aspek keberlanjutan ekosistem dan pertumbuhan ekonomi ini mendukung perikanan berkelanjutan di Indonesia. Kajian bioekonomi yang telah dilakukan ini dapat menentukan pengaturan input dan output untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan peningkatan ekonomi dan penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak,” jelas Sri Yanti, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas.

Kajian bioekonomi ini masih terus akan disempurnakan seiring dengan ketersediaan data yang lebih komprehensif. Namun demikian studi ini dapat menjadi acuan awal untuk pengelolaan perikanan udang di Arafura yang berbasis kaidah-kaidah ilmiah yang transparan dan akuntabel.

“Hasil kajian bioekonomi ini digunakan untuk membuat kebijakan yang berkelanjutan dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan, kajian bioekonomi udang ini diharapkan dapat mendukung inovasi pembangunan di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia,” tutup Sri Yanti.

Kick Off COREMAP-CTI, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir untuk Penguatan Ekonomi Berkelanjutan

Kick Off COREMAP-CTI,
Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir untuk Penguatan Ekonomi
Berkelanjutan - <https://baliilu.com>



Kegiatan Kick Off COREMAP-CTI, di Nusa
Dua, Bali, Selasa (30/3/2021)

Badung, baliilu.com – Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya pesisir dan laut yang sangat kaya dan dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Indonesia memiliki 596 jenis terumbu karang, kita memiliki 14 persen dari luas terumbu karang dunia, dengan 39 persen jenis ikan karang dunia. Pengelolaan sumber daya pesisir merupakan strategi dan program jangka panjang untuk menguatkan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

“Kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir Indonesia merupakan Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) terutama untuk mendukung ketahanan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Provinsi Bali & Nusa Tenggara Barat memiliki terumbu karang dengan keanekaragaman tinggi, sehingga kita perlu berkomitmen untuk menjaganya. Dan kegiatan Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) ini merupakan triger atau stimulus pasca-pandemi COVID-19 untuk menggerakkan kegiatan lain di bidang ekonomi,” ujar Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Himawan Hariyoga dalam kegiatan Kick Off COREMAP-CTI, di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/3/2021).



Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Himawan Hariyoga saat membuka kegiatan Kick Off COREMAP-CTI, di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/3/2021).

Himawan Hariyoga lanjut memaparkan, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai *implementing agency* kegiatan COREMAP-CTI atau dikenal dengan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang – Prakarsa Segitiga Karang, program ini merupakan program untuk menjaga kelestarian terumbu karang Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang mengandalkan laut dalam kehidupan mereka.

Kick off COREMAP-CTI di Bali ini merupakan kolaborasi multi-pihak untuk pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan terutama dengan dukungan pendanaan dari Asian Development Bank yang akan dilakukan oleh Indonesia Climate Change Trust Fund serta para mitra pelaksana.

Kegiatan Kick-off COREMAP-CTI ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) TB Haeru Rahayu, Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang diwakili Asisten I, Pejabat Kementerian/Lembaga, mitra pembangunan, pemerintah daerah, serta NGO/CSO pelaksana program COREMAP-CTI di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Himawan Hariyoga menjelaskan, intervensi yang dilakukan oleh program COREMAP-CTI adalah melalui berbagai kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat. Selain itu, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Bappenas terus menekankan bahwa tidak ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. “Pelestarian sumber daya pesisir dalam hal ini terumbu karang dapat menjadi salah satu contoh nyata bagaimana upaya menjaga lingkungan dapat sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat dan nasional,” ujarnya.

Dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2025 dalam pembangunan kelautan dan perikanan, ucap Hariyoga, Bappenas berperan sebagai enabler bagi para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah dan masyarakat melalui pendekatan convergence dimana Bappenas menjadi wadah dalam pembangunan partisipatif. Pelaksanaan COREMAP-CTI dengan dana hibah Asian Development Bank ini merupakan bentuk pilot project dimana Nusa Penida, Bali lokasi pilot project.

Tak hanya itu, Gili Matra dan Gili Balu, Nusa Tenggara Barat juga menjadi area pilot project pelestarian terumbu karang ini. “Yang pada akhirnya, pilot project itu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh berbagai pihak terkait,” katanya.



Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc, Ph.D. bersama Executive Director Dr. Tonny Wagey.

Sementara itu, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/ Bappenas Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc, Ph.D. menuturkan, “COREMAP- CTI juga mendukung Sustainable Development Goals 14 (Life Below Water) yaitu konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk mencapai 3 target utama SDG’s antara lain perlindungan

ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, mengkonservasi setidaknya 10% area pesisir laut dan meningkatkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan”.

Tujuan program pelestarian terumbu karang ini adalah untuk mencapai efektivitas pengelolaan 80% level biru. Bentuk intervensi COREMAP – CTI dengan pendanaan Asian Development Bank di Nusa Penida, Gili Matra, dan Gili Balu tersebut dilakukan dalam bentuk Penguatan Kelembagaan dan pengelolaan terumbu karang, pengembangan rencana pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem dan peningkatan mata pencaharian berkelanjutan.

Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Sri Yanti mengemukakan, pada tahun 2019 Bappenas melalui ICCTF telah dipercaya untuk mengelola proyek COREMAP-CTI dengan pendanaan hibah yang berasal dari Global Environment Facility (GEF), yang disalurkan melalui World Bank dan Asian Development Bank. “Latar belakang pelaksanaan COREMAP-CTI dengan dana hibah dari ADB di antaranya adalah target untuk mencapai 10% Kawasan Konservasi Perairan (KKP) pada tahun 2030, meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Lesser Sunda, khususnya Nusa Penida di Bali, Gili Matra dan Gili Balu di Nusa Tenggara Barat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan,” jelas Sri Yanti.

Dukungan COREMAP-CTI Asian Development Bank sebesar US\$ 5,2 juta telah dimulai pada 4 Maret hingga 31 Desember 2022 ini bertujuan untuk mencapai 80% Kategori Biru di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida, mencapai 80% Kategori Biru di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra, dan mencapai 100% Hijau Taman Pulau Kecil (TPK) Gili Balu.

Bappenas Mulai Garap Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang di NTB

Bappenas Mulai Garap Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang di NTB | TIMES Indonesia



Suasana peluncuran program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang Kementerian PPN/Bappenas untuk Provinsi NTB. (FOTO: Anugrah Dany/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, LOMBOK BARAT – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) memulai program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang atau Coral Reef Rehabilitation Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Program ini dilakukan dalam upaya untuk menjaga kelestarian terumbu karang Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang mengandalkan laut dalam kehidupan sehari-hari.

Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Hilmawan Hariyoga Djojokusumo mengatakan, langkah Indonesia untuk perlindungan ekosistem ini sejalan dengan komitmen global yang dituangkan dalam Tujuan 14: Kehidupan Bawah Laut dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals.

“Dalam SDGs 14 ini, pelestarian wilayah pesisir, pengelolaan dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut, serta peningkatan manfaat ekonomi menjadi kelompok target yang harus dicapai untuk menunjang pembangunan,”

katanya, dalam acara peluncuran COREMAP-CTI di Senggigi, Lombok Barat, Jumat (4/6/2021).

Menurut Hilmawan, substansi COREMAP-CTI merupakan kolaborasi multi-stakeholders untuk pengelolaan ekosistem terumbu karang dan pesisir secara keseluruhan menuju pesisir yang berkelanjutan, lestari, dan mandiri.

“COREMAP-CTI juga menjadi pengungkit ekonomi pascapandemi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian terumbu karang dan ekosistem pesisir berkelanjutan,” ungkapnya.

Jadi Prioritas RPJMN

Indonesia memiliki 596 jenis terumbu karang, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 14 persen dari luas terumbu karang dunia, dengan 39 persen jenis ikan karang dunia.

Pengelolaan sumber daya pesisir merupakan strategi dan program jangka panjang untuk menguatkan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Mengingat penting atas kekayaan pesisir yang dimiliki, sehingga pelestarian bawah laut ini masuk dalam prioritas pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai enabler bagi para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah dan masyarakat melalui pendekatan *convergence* dimana Bappenas menjadi wadah dalam pembangunan partisipatif.

Pelaksanaan COREMAP-CTI dengan dana hibah Asian Development Bank ini merupakan bentuk pilot project dimana Gili Matra dan Gili Balu, Provinsi NTB menjadi salah satu dari lokasi pilot project pelestarian terumbu karang, selain Nusa Penida, Bali. Yang pada akhirnya, pilot project itu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh berbagai pihak terkait.

Pendanaan Program

Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Sri Yanti menerangkan bahwa pada tahun 2019 Bappenas melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) telah dipercaya untuk mengelola proyek COREMAP-CTI dengan pendanaan hibah yang berasal dari Global Environment Facility (GEF), yang disalurkan melalui World Bank dan Asian Development Bank.

“Latar belakang pelaksanaan COREMAP-CTI dengan dana hibah dari ADB diantaranya adalah target untuk mencapai 10% Kawasan Konservasi Perairan (KKP) pada tahun 2030, meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Lesser Sunda, khususnya Nusa Penida di Bali, Gili Matra dan Gili Balu di Nusa Tenggara Barat, serta

peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan,” jelasnya.

Ia menyampaikan, dukungan COREMAP-CTI Asian Development Bank sebesar US\$ 5,2 juta telah dimulai pada 4 Maret hingga 31 Desember 2022 ini bertujuan untuk mencapai 80 persen Kategori Biru di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida, Bali.

“Kemudian mencapai 80% Kategori Biru di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra, dan mencapai 100% Hijau Taman Pulau Kecil (TPK) Gili Balu di NTB,” ujarnya.

Sementara, Sekda Provinsi NTB yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, Azhar menyatakan, Pemerintah Provinsi NTB mendukung program nasional penetapan kawasan konservasi seluas 20 juta Ha di tahun 2020 dan 30 juta Ha pada tahun 2030.

Komitmen Pemprov NTB itu ditunjukkan dengan mengalokasikan 341.641 Ha wilayah perairan NTB sebagai kawasan konservasi daerah (KKD).

“Kami memandang program ini telah banyak berperan besar terhadap kelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di NTB. Kami sangat berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan dari program yang konstruktif ini,” katanya.

“Pemprov NTB akan bersinergi melibatkan masyarakat serta akan melakukan upaya replikasi program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang di NTB dari Kementerian PPN/Bappenas ini,” imbuh Azhar.

Perikanan Berkelanjutan Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan

Perikanan Berkelanjutan Prioritas
Pembangunan Sektor Kelautan -
Nasional Tempo.com



Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas Sri Yanti JS

INFO NASIONAL - Hasil kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan sumber daya perikanan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia, terutama yang dekat dengan pantai atau pesisir (kurang dari 12 mil), saat ini mengalami degradasi karena tekanan penangkapan yang tinggi. Berkurangnya sumber daya perikanan ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir terutama para nelayan yang mayoritas adalah nelayan kecil dengan perahu kapasitas 5-10 GT dan wilayah penangkapan di sekitar pantai

Kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir menjadi salah satu perhatian utama pemerintah selain petani dan masyarakat rentan lainnya. “Kebijakan apapun yang disusun dalam sektor perikanan ini harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan rumah tangga perikanan,” ujar Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Bappenas, Sri Yanti dalam dialog ‘Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur’ di Jakarta, Selasa, 14 September 2021.

Menurut Yanti, kebijakan yang berorientasi pengelolaan berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis *science based policy* sangat diperlukan. “Tujuannya untuk menuju pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan mengakomodasi kompleksitas serta dinamika sumber daya dan usaha perikanan,” katanya.

Dalam konteks ini, Bappenas mendorong penerapan perikanan berkelanjutan menjadi kebijakan perencanaan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Seperti dalam tujuan ke-14 dalam SDGs, pembangunan perikanan tangkap memerlukan keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan disertai penyediaan data dan informasi.

“Untuk itu, Bappenas telah menjadikan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis dalam pembangunan perikanan berkelanjutan yang merupakan program prioritas dalam RPJMN 2020-2024,” ujar Yanti.

Yanti mengatakan, untuk menunjang perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis ilmu pengetahuan, Bappenas telah melakukan beberapa kajian ilmiah. Seperti studi bioekonomi perikanan udang di Laut Arafura (WPP 718) dan studi perikanan alat tangkap cantrang di perairan Utara Jawa meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur (WPP 712).

Berbagai kajian ini, jelas Yanti, dapat menjadi model percontohan dalam menyusun kebijakan sektor kelautan dan perikanan. “Bisa pula dilakukan untuk berbagai jenis komoditas lainnya melalui pengelolaan yang transparan dan berbasis sains untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan,” ungkapnya

Bappenas juga berharap kajian ini bisa mendorong peningkatan Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan. “Jadi, kami sangat menyambut baik rekomendasi studi bioekonomi perikanan yang dihasilkan Bappenas dapat digunakan sebagai alat dalam pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur yang diinisiasi KKP,” ujar Sri Yanti.

Sejalan dengan hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah mengeluarkan konsep penangkapan ikan terukur dalam mengelola sumber daya perikanan. Kebijakan ini berguna untuk menjaga ekosistem laut dan pesisir yang sehat dan produktif serta menjadikan Indonesia lebih makmur dari sisi ekonomi maupun sosial.

“Kegiatan ekonomi harus seimbang dengan ekologi. Di mana setiap aktivitas di ruang laut, harus memperhatikan kesehatan lautnya,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian KP, Muhammad Zaini.

Langkah pertama dalam menerapkan konsep penangkapan ikan terukur, yakni mengetahui kesehatan stok ikan di setiap WPP. “Kemudian diatur jumlah ikan yang boleh ditangkap, jumlah kapal yang menangkap, termasuk alat tangkapnya,” katanya.

Menurut Zaini, penerapan konsep penangkapan ikan terukur bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebab nantinya pendaratan ikan tidak lagi berpusat di Pulau Jawa, melainkan di pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditentukan.

“KKP juga menyambut baik dan akan memanfaatkan hasil kajian bioekonomi dari Bappenas tersebut guna mewujudkan Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur untuk dapat mewujudkan target PNBP Perikanan di 11 WPP mencapai Rp 12 Triliun pada 2024,” tutur Zaini.

Merawat Keindahan 8 Pulau di Gili Balu Sumbawa Barat

Merawat Keindahan 8 Pulau di Gili Balu Sumbawa Barat (idntimes.com)



Direktur Kelautan dan Perikanan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) Sri Yanti tanam mangrove

Sumbawa Barat, IDN Times - Terletak di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tepatnya di Selat Alas yang masuk dalam kawasan konservasi, terdapat delapan pulau di Gili Balu yang cukup memukau. Dalam bahasa Sumbawa, balu berarti delapan. Sementara gili merupakan sebutan untuk pulau kecil, sehingga Gili Balu berarti pulau delapan atau delapan pulau.

Salah satu di antaranya bernama Pulau Namu yang terletak di Kecamatan Poto Tano. Pulau-pulau kecil ini sangat menawan hingga mampu menarik perhatian wisatawan lokal.



Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat IDN Times/
Ahmad Viqi Wahyu Rizki

1. Dekat dengan Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat

Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat IDN Times/Ahmad Viqi Wahyu Rizki

Mengunjungi Pulau Namu dari Pelabuhan Poto Tano tak memakan waktu lama, sekitar 10 menit perjalanan menggunakan Speedboat atau perahu nelayan dari pesisir Pantai Poto Tano.

Tarif perahu menuju Pulau Balu, Pulau Kenawa, Pulau Paserang dan lima pulau lainnya di Gili Balu mencapai Rp250 ribu, dengan jumlah penumpang 5 sampai 10 orang. Harga ini sudah termasuk antar jemput sesuai permintaan pengunjung.

Selain memiliki pemandangan indah dengan pesona keragaman mangrove, ekosistem pesisir cukup lengkap di Pulau Namu.

Kendati berada di pinggir Pelabuhan Poto Tano, eksotisme Pulau Namu, baik dari ekosistem terumbu karang, lamun, dan ekosistem pantai serta bebatuannya cukup menarik untuk dikunjungi.

2. Dikelilingi mangrove dengan padang rumput di tengah pulau



Direktur Kelautan dan Perikanan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) Sri Yanti (IDN Times/Ahmad Viqi Wahyu Rizki)

Di Pulau Namo, terhampar ribuan pohon mangrove. Beragam jenis pohon mangrove ini menarik perhatian bagi peneliti biota laut.

“Ini seperti serpihan surga yang harus dijaga warga sekitar dan pemerintah daerah setempat,” kata Direktur Kelautan dan Perikanan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) Sri Yanti, usai menanam mangrove di Pulau Namo, Kamis (16/9/2021) pekan lalu.

Ekosistem biota laut baik terumbu karang, rumput laut, pasir putih maupun pohon mangrove di Gili Balu khususnya di Pulau Namo, Paserang, dan Pulau Kenawa masih terjaga kelestariannya.

Selain hamparan mangrove, di Pulau Namo juga terdapat padang rumput dengan luas 190,90 hektare hingga membuat keunikan tersendiri di Pulau Namo. Hamparan rumput yang dikelilingi pohon mangrove di tengah Pulau Namo menjadi magnet bagi wisatawan.

“Kawasan ini memang memiliki potensi ekosistem pesisir yang cukup lengkap,” ujar Sri Yanti lagi.

3. Gili Balu masuk kawasan konservasi



Kondisi Mangrove di Pulau Namo Gili Balu KSB IDN Times/Ahmad Viqi Wahyu Rizki

Gili Balu sendiri terdiri dari 8 pulau kecil bernama Pulau Kalong, Pulau Namo, Pulau Kenawa, Pulau Paserang, Pulau Kambing, Pulau Kalo, Pulau Pasir, dan Pulau Belang. Delapan gili ini berada di area konservasi dengan luas 568 hektare. Meski letaknya berdekatan, tapi masing-masing pulau punya ciri khas dan kecantikan berbeda-beda.

Luas area konservasi delapan pulau kecil di kawasan Gili Balu mencapai 568 hektare. Delapan pulau kecil seperti Pulau Kalong, Pulau Namo, Pulau Kenawa, Pulau Paserang, Pulau Kambing, Pulau Kalo, Pulau Pasir dan Pulau Belang memiliki kecantikan berbeda-beda.

“Delapan pulau ini sangat penting bagi perekonomian masyarakat. Jangan sampai kita kehilangan surga di Indonesia,” ungkap Sri Yanti.

Saat *IDN Times* berkunjung ke Pulau Namo, tampak puluhan pohon mangrove di Pulau Namo ditebang warga.

Menurut penuturan warga Desa Poto Tano, pohon mangrove memang ditebang untuk dijadikan rumah panggung. Tampak, puluhan rumah panggung milik warga menggunakan kayu mangrove.

“Mangrove ini juga dapat dijadikan sebagai kawasan wisata alam maupun untuk pendidikan. Karena saya melihat ini cukup bisa menarik wisatawan. Jadi kami minta ini untuk tetap dijaga,” kata Sri Yanti.

4. Keindahan Pulau Paserang dan Kenawa yang memukau

Dua pulau lainnya yang mencuri perhatian adalah Pulau Paserang dan Pulau Kenawa. Kecantikan kedua pulau ini begitu memukau. Di Pulau Paserang, terdapat bukit hijau dengan hamparan rumput di bawahnya.

Dari atas bukit Pulau Paserang kita bisa menikmati keindahan alam Kabupaten Sumbawa Barat. Bahkan wisatawan bisa menikmati pemandangan Gunung Rinjani.

Begitu juga dengan Pulau Kenawa. Pulau ini cukup populer di kalangan wisatawan lokal dan nasional. Kondisi yang sedikit datar dengan dua bukit di Kenawa membuat santai pengunjung.

Dari atas bukit Pulau Kenawa pengunjung bisa menikmati hamparan luas padang rumput Kenawa. Di atas padang rumput ini, pengunjung bisa mendirikan tenda dan bermalam.

Selain itu, di pantai Pulau Paserang dan Kenawa pengunjung bisa melakukan snorkeling untuk menikmati keindahan bawah laut Paserang dan Kenawa.



Hamparan rerumputan di tengah Pulau Kenawa
KSB IDN Times/Ahmad Viqi Wahyu Rizki

5. Pulau Pasir yang timbul tenggelam

Uniknya lagi, di antara Pulau Panjang dan Pulau Kenawa terdapat Pulau Pasir yang selalu timbul tenggelam. Pulau Pasir ini akan timbul selama tiga jam saja dalam sehari selama air pasang surut.

Terkadang Pulau Pasir yang luasnya diperkirakan 3 kali lapangan sepak bola ini bisa terlihat dari atas perahu.

“Jadi Pulau Pasir ini cukup indah,” kata Bupati KSB Musyafirin kepada *IDN Times*.



Pulau Kenawa di Kabupaten Sumbawa Barat/
ngetripkemana.com

6. Warga dibina untuk menjaga alam Gili Balu



Bekas penebangan liar pohon mangrove di Pulau
Namo IDN Times/Ahmad Viqi Wahyu Rizki

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Blue Carbon Strategy Framework (ICCTF) Tonny Wagey, ada 4 desa yang dibina untuk melestarikan kawasan konservasi di Gili Balu yaitu Desa Poto Tano, Senayan, Tuananga, dan Kiantar.

Masyarakat di empat desa tersebut diberikan pelatihan dan keterampilan dalam menjaga kawasan konservasi di Gili Balu. Para nelayan, baik laki-laki dan perempuan diberikan edukasi dalam melestarikan alam Gili Balu. Misalnya

mencegah pengeboman ikan, penebangan liar pohon mangrove, dan edukasi berupa restorasi pohon mangrove yang hampir punah.

Masyarakat pun diberdayakan untuk melakukan pembibitan dan penanaman, kemudian dilanjutkan dengan pemeliharaan mangrove.

Dalam pembinaan dan edukasi warga, ICCTF bersama pemerintah mendapat sokongan anggaran dari Asian Development Bank untuk kelestarian mangrove di tiga titik di Indonesia. Langkah ini demi tetap menjaga keindahan dan keasrian Gili Balu. Ayo berkunjung ke Gili Balu!

Bappenas sebut TNP Laut Sawu penyumbang terbesar kawasan konservasi

Bappenas sebut TNP laut sawu penyumbang terbesar kawasan konservasi - ANTARA News



Direktur Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sri Yanti (kanan) saat menjelaskan kepada pers soal pengembangan TNP Laut Sawu. ANTARA/Kornelis Kaha.

Kupang (ANTARA) - Direktur Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sri Yanti menyebut bahwa Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu di perairan NTT menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam hal luasan kawasan konservasi perairan di Indonesia.

“Dalam lima tahun ke depan ini target luas kawasan konservasi perairan di Indonesia ini akan mencapai 26,9 hektare. Nah penyumbang terbesar itu berasal dari TNP Laut Sawu di NTT,” katanya di Kupang, Rabu.

Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Exit Strategi Proyek Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) Coral Triangle Initiative (CTI) World Bank di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu di Kupang.

Luas TNP Laut Sawu saat ini mencapai 3,352 juta hektare, sumbangan untuk konservasi perairan Indonesia dari TNP Laut Sawu sendiri mencapai 18, 2 persen. Dan jumlah ini terbesar dari jumlah TNP lainnya di Indonesia.

Menurut dia, potensi yang dimiliki oleh Laut Sawu ini sangat istimewa karena terkenal dengan keanekaragaman hayati laut yang melimpah, di antaranya Cetacean (Paus, Lumba-lumba) serta Sirenian (Dugong) serta

ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, serta terumbu karang.

“Kita juga melihat bahwa ada karakteristik tertentu yang belum dieksplor dari Laut Sawu itu sendiri,” katanya.

Salah satunya migrasi mamalia laut seperti Paus yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Global agar bisa dijaga bersama-sama.

Sri juga menyebutkan bahwa Indonesia di dunia Internasional telah mengklaim bahwa 30 persen kawasan laut di Indonesia akan menjadi kawasan konservasi dan sangat dihargai oleh PBB.

“Kita (Indonesia) juga tengah mengklaim bahwa pengelolaan laut kita bisa dikelola dengan cara sustainable. Caranya adalah kita menjaga serta memperhitungkan luasan kawasan konservasi pada luasan tersebut dan ini dihargai betul di PBB,” kata dia.

Sementara itu Executive Director Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Dr Tonny Wagey menjelaskan, COREMAP-CTI merupakan salah satu upaya nyata dari Pemerintah Indonesia untuk menjaga kelestarian sumberdaya terumbu karang, ekosistem terkait, dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

COREMAP merupakan proyek jangka panjang yang didesain dalam tiga tahapan yaitu COREMAP Tahap I (1998-2004), COREMAP Tahap II (2004-2011), dan COREMAP yang merupakan tahap ketiga yang mulai sejak 2014.

Berdasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024, terdapat program prioritas yang menjadi dasar pelaksanaan COREMAP-CTI berupa program prioritas satu yakni peningkatan pengelolaan kemaritiman dan program prioritas 6 perikanan dan kelautan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Lebih lanjut Sri menambahkan bahwa Bappenas menyiapkan kondisi sebagai enabler untuk membangun wadah partisipatif lintas sektor serta membuat model inovasi pembangunan yang menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem melalui implementasi program COREMAP-CTI.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam COREMAP-CTI oleh Kementerian PPN/ Bappenas melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) meliputi penguatan kelompok masyarakat pengawas di targetkawasan konservasi, implementasi rencana aksi Pengelolaan zona pesisir terpadu, implementasi rencana aksi nasional untuk jenis prioritas di target kawasan konservasi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung untuk integrasi elemen ekowisata pada lokasi, pembangunan kapasitas pemangku kepentingan baik pada badan pengelola maupun masyarakat, serta pembangunan skema pendanaan berkelanjutan. Kegiatan COREMAP-CTI World Bank ini dilakukan di dilakukan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua Barat.

Di NTT, kegiatan diimplementasikan melalui kerja sama dengan empat mitra pelaksana yaitu Yayasan Terangi, Yapeka, PILI dan Yayasan Reef Check Indonesia (YRCI). Sedangkan dari 10 Kabupaten yang termasuk ke dalam kawasan TNP Laut Sawu, enam kabupaten mendapatkan intervensi kegiatan tersebut.

Menurut dia, pada 2021 ini adalah tahun kedua dalam pelaksanaan kegiatan dan merupakan tahun yang penting dalam implementasi kegiatan.

Ada banyak capaian yang sudah dihasilkan oleh para mitra pelaksana yakni pembangunan infrastruktur penunjang Ekowisata, instalasi PLTS untuk mendukung kegiatan perikanan masyarakat, kajian investasi bisnis ekowisata, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengawasan berbasis masyarakat, dan kajian mitigasi *bycatch* hiu.

Daftar Unggahan Publikasi Media Pada Kegiatan
**Seminar Bioekonomi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan:
 Studi Bioekonomi Udang**

No	Media Massa	Judul	Link
1	rri.co.id	Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Studi Bioekonomi Udang	https://m.rri.co.id/ekonomi/1005114/pengelolaan-perikanan-berkelanjutan-studi-bioekonomi-udang?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign
2	cakrawalanews.co.id	Kementerian PPN/Bappenas Lakukan Kajian Bioekonomi WPP Berbasis Jenis	http://www.cakrawalanews.co.id/artikel/4928/Kementerian-PPN-Bappenas-Lakukan-Kajian-Bioekonomi-WPP-Berbasis-Jenis/
3	sinarharapan.id	Inovasi Pembangunan Kajian Bioekonomi	https://sinarharapan.id/inovasi-pembangunan-kajian-bioekonomi/
4	fin.co.id	Bappenas Kaji Bioekonomi WPP	https://fin.co.id/2021/03/24/bappenas-kaji-bioekonomi-wpp/
5	poskota.co	Bappenas Lakukan Kajian Pengelolaan Bioekonomi Perikanan	https://poskota.co/nasional/bappenas-lakukan-kajian-pengelolaan-bioekonomi-perikanan/
6	tagar.id	Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Bappenas Lakukan Studi Bioekonomi Udang	https://www.tagar.id/pengelolaan-perikanan-berkelanjutan-bappenas-lakukan-studi-bioekonomi-udang/?source=twitter
7	topbusiness.id	Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Gunakan Community Based	https://www.topbusiness.id/48588/pengelolaan-perikanan-berkelanjutan-gunakan-bioekonomi-udang.html
8	suarakarya.id	Kemen PPN/Bappenas Kaji Bioekonomi Udang Terkait Wilayah Pengelolaan Perikanan	https://m.suarakarya.id/detail/129894/Kemen-PPNBappenas-Kaji-Bioekonomi-Udang-Terkait-Wilayah-Pengelolaan-Perikanan
9	gatra.com	Masyarakat Dilibatkan dalam Pengelolaan Ikan, Ini Alasannya	https://www.gatra.com/detail/news/507301/ekonomi/masyarakat-dilibatkan-dalam-pengelolaan-ikan-ini-alasannya
10	balipuspanews.com	Kementerian PPN/Bappenas Lakukan Kajian Bioekonomi WPP Berbasis Jenis	https://www.balipuspanews.com/kementerian-ppn-bappenas-lakukan-kajian-bioekonomi-wpp-berbasis-jenis.html

Daftar Unggahan Publikasi Media Pada
Kegiatan *Kick-off Meeting* COREMAP–CTI ADB.

No	Media Massa	Judul	Link
1	Baliilu.com	Kick Off COREMAP–CTI, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir untuk Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	https://baliilu.com/kick-off-COREMAP–CTI-pengelolaan-sumber-daya-pesisir-untuk-penguatan-ekonomi-berkelanjutan/
2	Redaksi9.com	Pengelolaan Sumber Daya Pesisir untuk Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	https://www.redaksi9.com/read/4234/Pengelolaan-Sumber-Daya-Pesisir-untuk-Penguatan-Ekonomi-Berkelanjutan.html
3	KABAR HITS BALI	Sumber Daya Pesisir Untuk Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	https://kabaralihits.com/2021/03/30/sumber-daya-pesisir-untuk-penguatan-ekonomi-berkelanjutan/
4	Balinesia	Bappenas Harapkan Nusa Penida Jadi Contoh Pengelolaan Pemanfaatan Terumbu Karang	https://balinesia.id/read/bappenas-harapkan-nusa-penida-jadi-contoh-pengelolaan-pemanfaatan-terumbu-karang
5	BALI PUSPA	Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Jadi Prioritas RPJMN	https://www.balipuspanews.com/pengelolaan-sumber-daya-pesisir-jadi-prioritas-rpjmn.html
6	RRI BALI	Ini Tiga Target Indonesia dalam Pengelolaan Terumbu Karang	https://m.rri.co.id/go/qS77zpK
7	Bali Post	Jaga Kelestarian, Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Dimulai	https://www.balipost.com/news/2021/03/30/183649/Jaga-Kelestarian,Program-Rehabilitasi-dan...html
8	Pos Bali	Nusa Penida Jadi Pilot Project COREMAP–CTI	https://posbali.co.id/nusa-penida-jadi-pilot-projek-COREMAP–CTI/
9	Kompas	Perairan Nusa Penida Masuk Lokasi Percontohan Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang	https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/03/30/perairan-nusa-penida-masuk-lokasi-percontohan-rehabilitasi-dan-pengelolaan-terumbu-karang/?utm_source=bebasakses_kompasid&utm_medium=whatsapp_shared&utm_content=sosmed&utm_campaign=sharinglink
10	Bali Portal	Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Sebagai Upaya Menjaga Ekosistem Laut Bali	https://baliportalnews.com/2021/03/program-rehabilitasi-dan-pengelolaan-terumbu-karang-sebagai-upaya-menjaga-ekosistem-laut-bali
11	Kabar Dewata	Tiga Target Indonesia dalam Pengelolaan Terumbu Karang, Ini Penjelasannya	http://kabdewata.com/berita/berita-utama/teknologi/tiga-target-indonesia-dalam-pengelolaan-terumbu-karang-ini-penjelasannya.html#.YGUp5ffb8IQ

12	Koran Media	Pengelolaan Terumbu Karang di Nusa Penida Didukung Kemen PPN-Bappenas	
13	Warta Bali	Bappenas Kejar 80% Level Biru Efektivitas Pengelolaan KKP Nusa Penida	 <p>Bappenas</p> <p>Sambungan Hal 1</p> <p>Pengelolaan yang baik, sambung dia, tentu menjadi hal yang penting. Agar tidak sampai terjadi eksploitasi berlebih, melalui pemahaman soal carrying capacity (daya dukung). "Untuk mencapai 80% biru, salah satunya sudah harus mempunyai staff yang mengurus soal administrasi, pencatatan, monitoring, dan evaluasi. Selain itu, juga harus mulai memikirkan soal kelangsungan secara berkelanjutan, baik dari segi pendanaan. Karena di level berikutnya, pemerintah tidak akan berikan dana lagi. Melainkan mereka harus bisa hidup sendiri. Itulah Level Gold," terangnya.</p> <p>Sementara Sekretaris Utama Bappenas Hutanawan Hariyoga menegaskan, Coremap-CTI tersebut adalah program untuk menjaga kelestarian terumbu karang Indonesia. Sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang mengandalkan laut.</p> <p>"Kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir Indonesia merupakan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024). Terutama untuk mendukung ketahanan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat memiliki terumbu karang dengan keanekaragaman tinggi, sehingga kita perlu berkomitmen untuk menjaganya. Kegiatan Coremap-CTI ini merupakan trigger atau stimulus pasca pandemi Covid-19 untuk menggerakkan kegiatan lain di bidang ekonomi," ungkap Hariyoga.</p> <p>Dia juga menegaskan, sesungguhnya tidak ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Menurut dia, pelestarian sumber daya pesisir dalam hal ini terumbu karang, justru dapat menjadi salah satu contoh nyata bagaimana menjaga lingkungan dapat sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat dan nasional.</p> <p>"Jadi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ber-</p> <p>kelanjutan dari target RPJMN 2020-2025 dalam pembangunan kelautan dan perikanan, Bappenas berperan sebagai enabler bagi para pemangku kepentingan. Baik Pemerintah Pusat, daerah, dan masyarakat melalui pendekatan convergence. Dimana Bappenas menjadi wadah dalam pembangunan partisipatif," tambahnya.</p> <p>Terpisah seperti disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan, Coremap-CTI juga dilaksanakan dalam rangka mendukung Sustainable Development Goals 14 (Life Below Water). Yaitu konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera, dan maritim, untuk mencapai 3 target utama SDG's antara lain perlindungan ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, mengkonservasi setidaknya 10% area pesisir laut, serta meningkatkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan.</p> <p>"Tujuan program pelestarian terumbu karang ini adalah untuk mencapai efektivitas pengelolaan 80% level biru. Bentuk intervensinya adalah penguatan kelembagaan dan pengelolaan terumbu karang, pengembangan rencana pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem, dan peningkatan mata pencaharian berkelanjutan," bebemnya.</p> <p>Lebih lanjut untuk diketahui pula, seperti disampaikan Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Sri Yanti, Bappenas melalui ICCTF sejak tahun 2019 silam telah dipercaya untuk mengelola proyek Coremap-CTI dengan pendanaan hibah yang berasal dari Global Environment Facility (GEF) yang disalurkan melalui World Bank dan Asian Development Bank.</p> <p>Dukungan senilai USD 5,2 juta itu rencananya dipergunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu kurang lebih selama 2 tahun. Yaitu dimulai 4 Maret 2021 hingga 31 Desember 2022 (adi,ita)</p>

Daftar Unggahan Publikasi Media Pada Kegiatan *Entry Meeting*

No	Media Massa	Judul	Link
1	Hariannusa.com	Gili Matra dan Gili Balu Jadi Pilot Project Pelestarian Terumbu Karang	https://hariannusa.com/2021/06/04/gili-matra-dan-gili-balu-jadi-pilot-project-pelestarian-terumbu-karang/
2	Gerbangindonesia.co.id	Konservasi Gili Matra dan Gili Balu Jadi Pilot Project Nasional	https://gerbangindonesia.co.id/2021/06/04/konservasi-gili-matra-dan-gili-balu-jadi-pilot-project-nasional/
3	Timesindonesia.co.id	Bappenas Mulai Garap Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang di NTB	https://www.timesindonesia.co.id/read/news/350888/bappenas-mulai-garap-program-rehabilitasi-dan-pengelolaan-terumbu-karang-di-ntb/
4	Detikntb.com	Bappenas bersama ICCTF danai 2 juta dolar untuk Konservasi terumbu karang di NTB	https://detikntb.com/2021/06/04/bappenas-bersama-icctf-danai-2-juta-dolar-untuk-konservasi-terumbu-karang-di-ntb/
5	Siarpost.com	Gili Matra dan Gili Balu Akan Jadi Pilot Project Pengelolaan Terumbu Karang oleh ICCTF	http://siarpost.com/2021/06/04/gili-matra-dan-gili-balu-akan-jadi-pilot-project-pengelolaan-terumbu-karang-oleh-icctf/
6	Globallombok.co.id	Pengelolaan Terumbu Karang oleh ICCTF, Dua Gili Menuju Rehabilitasi	https://www.globallombok.co.id/2021/06/pengelolaan-terumbu-karang-oleh-icctf.html?m=1
7	Rri.co.id	Gili Matra dan Gili Balu Menuju Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang oleh ICCTF	https://rri.co.id/mataram/daerah/1069376/gili-matra-dan-gili-balu-menuju-rehabilitasi-dan-pengelolaan-terumbu-karang-oleh-icctf
8	Diskomindotik.ntbprov.go.id	Gili Matra dan Gili Balu Menuju Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang oleh ICCTF	https://diskominfotik.ntbprov.go.id/post/gili-matra-dan-gili-balu-menuju-rehabilitasi-dan-pengelolaan-terumbu-karang-oleh-icctf688.html

Daftar Unggahan Publikasi Media Pada Kegiatan Dialog Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur di Jakarta.

No	Nama Media	Judul Berita	Link
1.	Tempo	Perikanan Berkelanjutan Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan	https://nasional.tempo.co/read/1506122/perikanan-berkelanjutan-prioritas-pembangunan-sektor-kelautan
2.	Indopos.co.id	WPP Dijadikan Basis Pembangunan Perikanan berkelanjutan	https://indoposco.id/wpp-dijadikan-basis-pembangunan-perikanan-berkelanjutan/
3.	Setiafakta.com	Bappenas dan KKP Rekomendasikan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur	https://www.setiafakta.com/ekonomi/pr-1161163462/bappenas-dan-kkp-rekomendasikan-perikanan-berkelanjutan-dan-terukur
4.	Pikiranrakyat.com	Tingkatkan Produksi Perikanan, Bappenas-KKP Rekomendasikan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur	https://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1782595725/tingkatkan-produksi-perikanan-bappenas-dan-kkp-rekomendasikan-perikanan-berkelanjutan-dan-terukur
5.	industry.co.id	Bappenas dan KKP Rekomendasikan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur	https://www.industry.co.id/read/93218/bappenas-dan-kkp-rekomendasikan-perikanan-berkelanjutan-dan-terukur
6.	tribunnews.com	Langkah Bappenas dan KKP Wujudkan Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur	https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/14/langkah-bappenas-dan-kkp-wujudkan-penerapan-perikanan-berkelanjutan-dan-terukur
7.	Pokokberita.com	Bappenas dan KKP Rekomendasikan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur	https://www.pokokberita.com/bappenas-dan-kkp-rekomendasikan-perikanan-berkelanjutan-dan-terukur
8.	Antaraneews.com	Bappenas dan KKP Rekomendasikan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur	https://www.antaraneews.com/berita/2392781/bappenas-dan-kkp-rekomendasikan-perikanan-berkelanjutan-dan-terukur
9.	Kompas.id	Sistem Kontrak untuk Industri Perikanan Diberlakukan pada 2022	https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/09/15/sistem-kontrak-untuk-industri-perikanan-diberlakukan-di-2022/
10.	Fortuneidn.com	Upaya Pemerintah Wujudkan Sektor Perikanan Berkelanjutan	https://www.fortuneidn.com/news/bayu/upaya-pemerintah-wujudkan-sektor-perikanan-berkelanjutan
11.	Viva.vo.id	Langkah Bappenas dan KKP Genjot Produksi Perikanan RI	https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1404499-langkah-bappenas-dan-kkp-genjot-produksi-perikanan-ri?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
12.	Siapgrak.com	Bappenas dan KKP Rekomendasikan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur	https://siapgrak.com/artikel/kxm86q
13.	pariwisataindonesia.id	Tingkatkan Produksi Perikanan, Bappenas-KKP Rekomendasikan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur	https://pariwisataindonesia.id/berita/tingkatkan-produksi-bappenas-kkp-rekomendasikan-perikanan-berkelanjutan-dan-teruku/
14.	Koran Indoposco	WPP Jadi Basis Pembangunan Perikanan Berkelanjutan	

8.	Harian Umum Gaung NTB	Bapennas RI Tanam Mangrove di Kawasan Gili Batu	
----	-----------------------	---	--

Daftar Unggahan Publikasi Media Pada **Kegiatan Exit Strategy COREMAP-CTI World Bank di Kupang, Nusa Tenggara Timur.**

No	Nama Media	Judul Berita	Link
1.	Indonesia Mandiri	COREMAP-CTI World Bank Kawal Pemberdayaan Laut Sawu.	https://www.indonesiamandiri.web.id/2021/12/COREMAP-cti-world-bank-kawal.html
2.	INews Surabaya.id	Sektor Kelautan dan Perikanan Jadi Tumpuan Masyarakat Indonesia Timur.	https://surabaya.inews.id/read/23180/sektor-kelautan-dan-perikanan-jadi-tumpuan-masyarakat-indonesia-timur
3.	RRI.co.id	COREMAP-CTI World Bank, Exit Strategy Untuk Menjamin Keberlanjutan Program.	https://rri.co.id/kupang/daerah/1293670/COREMAP-cti-world-bank-exit-strategy-untuk-menjamin-keberlanjutan-program
4.	Media Indonesia	Bappenas Targetkan Kawasan Konservasi Perairan Capai 26,9 Ha.	https://m.mediaindonesia.com/humaniora/458020/bappenas-targetkan-kawasan-konservasi-perairan-capai-269-juta-ha
5.	Antara News.com	Bappenas sebut TNP laut sawu penyumbang terbesar kawasan konservasi.	https://www.antaraneews.com/berita/2587317/bappenas-sebut-tnp-laut-sawu-penyumbang-terbesar-kawasan-konservasi#:~:text=Bappenas%20sebut%20TNP%20laut%20sawu%20penyumbang%20terbesar%20kawasan%20konservasi,-Rabu%2C%2015%20Desember&text=Luas%20TNP%20Laut%20Sawu%20saat,jumlah%20TNP%20lainnya%20di%20Indonesia
6.	Victory News.id	Laut Sawu NTT, Taman Nasional Perairan Paling Luas Dengan Ragam Hayati.	https://victorynews.id/cover/laut-sawu-ntt-taman-nasional-perairan-paling-luas-dengan-ragam-hayati/

7.	Victori News Cetak	Lawu Sawu Harus Dijaga karena Berdampak Ekonomi.	
8.	Timor Express	Bappenas Gelar Rapat Koordinasi di Kupang.	
9.	Kompas.com	26,9 Juta Hektar Perairan Indonesia Akan Dikonservasi, Sebagian Besar di NTT.	https://regional.kompas.com/read/2021/12/16/095904378/269-juta-hektar-perairan-indonesia-akan-dikonservasi-sebagian-besar-di-ntt
10.	Sindonews.com	Melihat Pusat Informasi Ekowisata TNP Laut Sawu di Pantai Oesina	https://photo.sindonews.com/view/22819/melihat-pusat-informasi-ekowisata-tnp-laut-sawu-di-pantai-oesina
11.	Surabaya INews.id	Pantai Oesina Kini Punya Pusat Informasi, Ada Kerangka Paus Pilotnya	https://surabaya.inews.id/read/23560/pantai-oesina-kini-punya-pusat-informasi-ada-kerangka-paus-pilotnya

12.	Antara.com	Program CTI World Bank di NTT dan Papua Barat diharapkan harus berkelanjutan	https://kupang.antarane.ws.com/berita/70869/program-cti-world-bank-di-ntt-dan-papua-barat-diharapkan-harus-berkelanjutan
13.	Indonesia Mandiri	ICCTF Ajak Masyarakat NTT Rawat Kawasan Konservasi Laut Sawu	https://www.indonesiamandiri.web.id/2021/12/icctf-ajak-masyarakat-ntt-rawat-kawasan.html
14.	Indonesia Mandiri	Yayasan Terangi Dampingi Masyarakat Sumba Barat Daya Jaga Perairan Sawu	https://www.indonesiamandiri.web.id/2021/12/yayasan-terangi-dampingi-masyarakat.html
15.	Indonesia Mandiri	Masyarakat Adat Rote Ndao Dapat Pendampingan Kelola Potensi Laut	https://www.indonesiamandiri.web.id/2021/12/masyarakat-adat-rote-ndao-dapat.html
16.	Sindonews.com	Melihat Pusat Informasi Ekowisata TNP Laut Sawu di Pantai Oesina	https://photo.sindonews.com/view/22819/melihat-pusat-informasi-ekowisata-tnp-laut-sawu-di-pantai-oesina

Indonesia Climate
Change Trust Fund



Laporan Tahunan 2021

Indonesia Climate Change Trust Fund

Lippo Kuningan 15th Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-12,

Jakarta 12940, Indonesia.

Phone : (+62 21) 80679386 (Hunting)

Fax : (+62 21) 80679387

Email : secretariat@icctf.or.id

 www.icctf.or.id

 Indonesia Climate Change Trust Fund

 [ICCTFofficial](https://www.instagram.com/ICCTFofficial)

 [@ICCTF_ID](https://twitter.com/ICCTF_ID)

